

**PENERAPAN APLIKASI SISTEM KEUANGAN DESA DALAM
MENINGKATKAN AKUNTABILITAS KEUANGAN
DESA BULUTELLUE KABUPATEN SINJAI**

SKRIPSI



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2025**

KARYA TUGAS AKHIR MAHASISWA

JUDUL PENELITIAN:

PENERAPAN APLIKASI SISTEM KEUANGAN DESA DALAM MENINGKATKAN AKUNTABILITAS KEUANGAN DESA BULUTELLUE KABUPATEN SINJAI

SKRIPSI

Disusun dan Diajukan Oleh:

INDRIANI

NIM:105731106521

**Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi pada Program Studi Akuntansi Fakultas
Ekonomi dan Bisnis**

Universitas Muhammadiyah Makassar

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2025**

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

**“Allah tidak mengatakan hidup ini mudah. Tetapi Allah berjanji bahwa
sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”**
(QS. Al-Insyirah: 5-6)

Senyumku manis, semangatku membawa, rumah adalah pangkalan,

dunia adalah medan

PERSEMBAHAN

**Puji syukur kepada Allah SWT atas ridho dan karunia-Nya sehingga
skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.**

**Skripsi ini saya persembahkan dengan tulus kepada keluarga
tercinta yang telah memberikan doa, dukungan, dan pengorbanan
tiada henti, sehingga penulis berkesempatan menempuh bangku
perkuliahan di Universitas Muhammadiyah Makassar. Serta untuk diri
saya sendiri sebagai bentuk penghargaan atas kesabaran,
ketekunan, dan semangat yang terus dijaga sepanjang perjalanan
studi. Semoga karya ini menjadi motivasi untuk terus berkembang
dan berkarya lebih baik di masa depan.**



PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt.7 Telp. (0411) 866972 Makassar

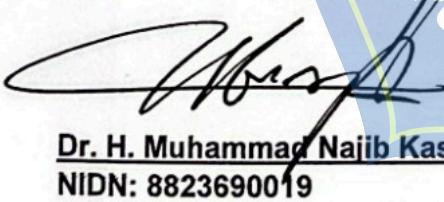
الحمد لله رب العالمين

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Penelitian : Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa dalam Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan Desa Bulutellue Kabupaten Sinjai
Nama Mahasiswa : Indriani
No. Stambuk/NIM : 105731106521
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyatakan bahwa skripsi ini telah diteliti, diperiksa dan diujikan didepan panitia penguji skripsi strata satu (S1) pada tanggal 26 Agustus 2025 di Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar

Pembimbing I


Dr. H. Muhammad Najib Kasim, S.E., M.Si
NIDN: 8823690019

Pembimbing II


Nurul Fuada, S.ST., M.Si
NIDN: 0925118802

Mengetahui

Ketua Program Studi


Dr. Mira, SE., M.Ak., Ak
NBM: 1286 844





PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 295 gedung iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866972 Makassar



HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi atas Nama : Indriani, Nim : 105731106521 diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 0013/SK-Y/62201/091004/2025 Tanggal 03 Rabiul Awal 1447 H/ 26 Agustus 2025 M. Sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar **Sarjana Akuntansi** pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

- UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
- PANITIA UJIAN
- Makassar, 09 Rabiul Awal 1447 H
01 September 2025 M
1. Pengawas Umum : Dr. Ir. H. Abd. Rakhim Nanda, ST., MT., IPU
(Rektor Unismuh Makassar)
2. Ketua : Dr. Edi Jusriadi, SE., MM
(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
3. Sekretaris : Agusdiwana Suarni, S.E., M.ACC
(Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
4. Penguji :
1. Dr. Mukminati Ridwan, S.E., M.Si
2. Dr. Ramly, S.E., M.Si
3. Nurul Fuada, S.ST., M. Si
4. Khadijah Darwin, SE., M.Ak., Ak
- (Handwritten signatures of the committee members are present to the right of the list)*

Disahkan Oleh,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar





**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 295 gedung iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866972 Makassar

SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Indriani
Stambuk : 105731106521
Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi : Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa dalam Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan Desa Bulutellue Kabupaten Sinjai

Dengan ini menyatakan bahwa:

Skripsi yang saya ajukan di depan Tim Penguji adalah ASLI hasil karya sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak dibuat oleh siapa pun.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia membawa sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 01 September 2025



Indriani
Nim: 105731106521

Diketahui Oleh:

Ketua Program Studi

Dr. Mira, SE., M.Ak., Ak
NBM: NBM: 1286 844



HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR

Sebagai sivitas akademik Universitas Muhammadiyah Makassar, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Indriani
NIM : 105731106521
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Makassar Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Nonexclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa dalam Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan Desa Bulutellue Kabupaten Sinjai

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah Makassar berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Makassar, 01 September 2025

Yang membuat pernyataan,


Indriani
NIM: 105731106521

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang tiada putus tercurah kepada hamba-Nya. Shalawat serta salam senantiasa penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya yang setia mengikuti sunnah beliau. Merupakan nikmat yang tiada terkira ketika penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul: "Penerapan aplikasi Sistem Keuangan Desa dalam Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan Desa Bulutellue Kabupaten Sinjai."

Skripsi ini disusun oleh penulis sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program Sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Teristimewa dan terutama, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga tercinta yang selalu memberikan harapan, semangat, perhatian, kasih sayang, serta doa yang tulus. Kepada saudara-saudara yang senantiasa mendukung dan memberikan motivasi hingga penulis dapat menyelesaikan studi ini dengan baik. Penulis berterima kasih atas segala pengorbanan, dukungan moral maupun materi, serta doa restu yang tak henti-hentinya diberikan demi keberhasilan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga segala kebaikan dan kasih sayang mereka menjadi amal ibadah serta penerang kehidupan di dunia dan akhirat.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Begitu pula penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih banyak disampaikan dengan hormat kepada:

- 
1. Bapak Dr. Ir. H. Abd. Rakhim Nanda, S.T., M.T., IPU., Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
 2. Bapak Dr. H. Andi Jam'an, SE., M.Si Dekan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
 3. Ibu Dr. Mira, S.E., M. Ak. Ak Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar.
 4. Bapak Dr. H. Muhammad Najib Kasim, S.E., M.Si selaku Pembimbing I dan Nurul Fuada., S.ST., M.Si selaku Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu bagi penulis hingga dapat menyempurnakan tugas akhir ini.
 5. Bapak/Ibu dan Asisten Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang tak kenal lelah banyak menuangkan ilmunya kepada penulis selama mengikuti kuliah di Universitas Muhammadiyah Makassar.
 6. Segenap Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
 7. Kepada keluarga tercinta, khususnya mama Ade dan mama Marni, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas doa, kasih sayang, serta dukungan tanpa henti yang senantiasa menyertai penulis. Semangat, pengorbanan, dan perhatian dari keduanya menjadi sumber kekuatan dan inspirasi bagi penulis dalam menyelesaikan studi ini.
 8. Kepada rekan-rekan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi Angkatan 2021, penulis mengucapkan terima kasih atas kebersamaan dan dukungan selama ini. Terima kasih telah menjadi teman yang

selalu membantu dan mendukung penulis, khususnya saat menghadapi berbagai pertanyaan dalam proses penyelesaian skripsi ini. Terima kasih kepada semua kerabat yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu.

9. Terakhir terima kasih untuk diri sendiri Indriani telah bertahan hingga sejauh ini, menunjukkan keberanian untuk terus melangkah dan menyelesaikan skripsi ini dengan sepenuh hati. Terima kasih karena memilih untuk tidak menyerah, betapapun berat proses yang dilalui, serta menuntaskannya dengan sebaik dan semaksimal mungkin. Semoga langkah ini menjadi awal bagi deretan pencapaian baru.

Semoga semua pihak tersebut di atas mendapat pahala yang berlipat ganda di sisi Allah SWT dan skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi penulis, rekan-rekan, masyarakat serta bangsa dan negara. Amin.



ABSTRAK

INDRIANI, Tahun 2025, Penerapan aplikasi Sistem Keuangan Desa dalam Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan Desa Bulutellue Kabupaten Sinjai. Skripsi. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing Oleh: Muhammad Najib Kasim dan Nurul Fuada.

Penelitian ini bertujuan mengetahui penerapan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan Desa Bulutellue Kabupaten Sinjai. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data difokuskan pada pelaksanaan penggunaan SISKEUDES sesuai regulasi dan dampaknya terhadap aspek akuntabilitas keuangan desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan aplikasi SISKEUDES di Desa Bulutellue telah dilakukan secara lengkap dan konsisten sesuai Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Seluruh tahapan pengelolaan keuangan dilaksanakan sesuai tugas perangkat desa, didukung dokumentasi fisik dan digital yang lengkap, serta melalui musyawarah dengan masyarakat. Penerapan ini meningkatkan akuntabilitas keuangan desa melalui pelaporan digital cepat dan akurat, transparansi informasi, pencatatan dan verifikasi berlapis, partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan evaluasi anggaran, serta penguatan integritas dan pengawasan.

Kata Kunci: SISKEUDES, Akuntabilitas Keuangan, Permendagri Nomor 20 Tahun 2018



ABSTRACT

INDRIANI, 2025, *Implementation of Village Financial System Application in Improving Financial Accountability of Bulutellue Village, Sinjai Regency. Thesis. Accounting Study Program, Faculty of Economics and Business, Muhammadiyah University of Makassar. Supervised by: Muhammad Najib Kasim and Nurul Fuada.*

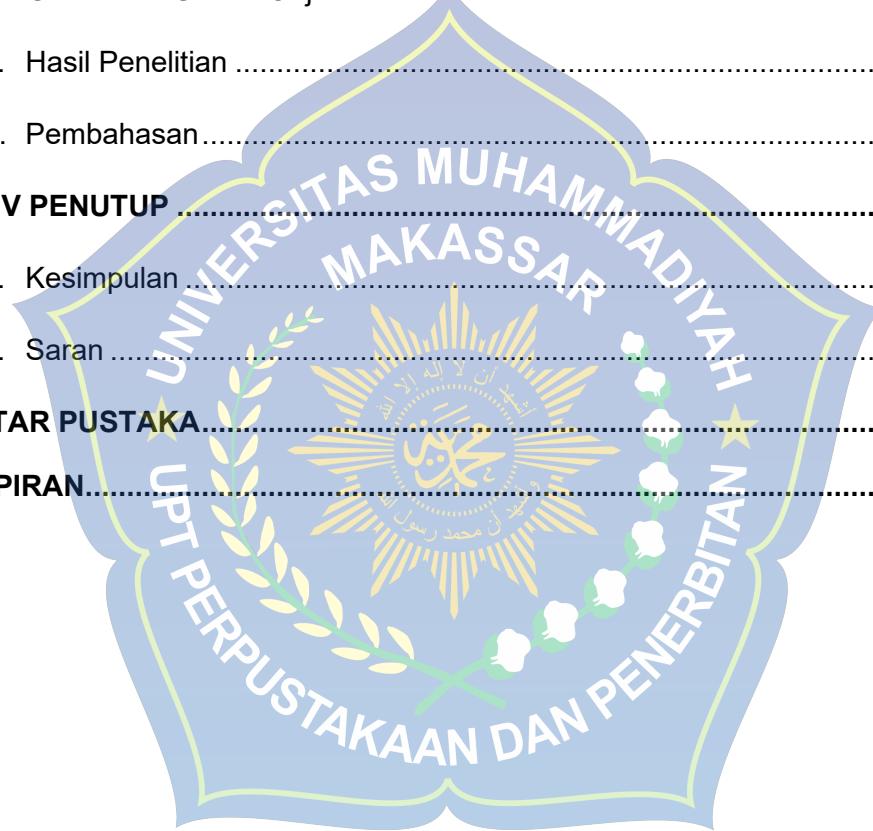
This study aims to examine the implementation of the Village Financial System (SISKEUDES) application in improving the financial accountability of Bulutellue Village, Sinjai Regency. The research employed a descriptive qualitative approach, with data collected through interviews, observations, and documentation. The data focused on the implementation of SISKEUDES in accordance with regulations and its impact on various aspects of village financial accountability. The findings reveal that the implementation of SISKEUDES in Bulutellue Village has been carried out comprehensively and consistently in compliance with Minister of Home Affairs Regulation Number 20 of 2018. All stages of financial management were conducted in accordance with the responsibilities of village officials, supported by complete physical and digital documentation, and through deliberations with the community. This implementation has enhanced village financial accountability through fast and accurate digital reporting, transparency of information, layered recording and verification, community participation in budget planning and evaluation, as well as strengthening integrity and oversight.

Keywords: SISKEUDES, Financial Accountability, Minister of Home Affairs Regulation Number 20 of 2018

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
HALAMAN SAMPUL	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN PERNYATAAN.....	vi
HALAMAN PUBLIKASI AKHIR	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK.....	xi
ABSTRACT.....	xii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Kajian Teori.....	7
B. Penelitian Terdahulu	22
C. Kerangka Pikir Penelitian.....	30
BAB III METODE PENELITIAN.....	32
A. Jenis Penelitian.....	32

B. Fokus Penelitian	32
C. Situs dan Waktu Penelitian	33
D. Jenis dan Sumber Data	33
E. Informan Penelitian	34
F. Teknik Pengambilan Data	35
G. Metode Analisis Data.....	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	39
B. Hasil Penelitian	52
C. Pembahasan.....	76
BAB V PENUTUP	82
A. Kesimpulan	82
B. Saran	83
DAFTAR PUSTAKA	84
LAMPIRAN	90



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Siklus Manajemen Keuangan dari Presiden hingga Pemerintah Daerah pada Sektor Publik dan Swasta.....	15
Gambar 2.2	Siklus Manajemen Keuangan.....	17
Gambar 2.3	Kerangka Pikir Penelitian.....	30
Gambar 4.1	Peta Letak Geografis Desa Bulutellue.....	39
Gambar 4.2	Struktur organisasi Pemerintah Desa Bulutellue.....	45
Gambar 4.3	Tampilan halaman awal SISKEUDES Versi 2.0.7.....	48
Gambar 4.4	Flowchart Sistem Keuangan Desa.....	49
Gambar 4.5	Keterangan Simbol Flowchart.....	49
Gambar 4.6	Rincian SPP Pelaksanaan kegiatan (SISKEUDES).....	56
Gambar 4.7	Buku Kas Umum Desa Bulutellue TA 2025 (SISKEUDES).....	58
Gambar 4.8	Buku Kas Pembantu Kegiatan Desa Bulutellue TA 2025 (SISKEUDES).....	58
Gambar 4.9	Laporan Penatausahaan Keuangan Desa Bulutellue (SISKEUDES).....	60
Gambar 4.10	Tanda Bukti Pengeluaran Uang (SISKEUDES).....	62
Gambar 4.11	Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SISKEUDES).....	63

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Dimensi, Aspek dan Indikator Kunci Akuntabilitas Keuangan.....	12
Tabel 2.2	Penelitian Terdahulu.....	22
Tabel 3.1	Informan Penelitian.....	35
Tabel 3.2	Aspek dan Indikator Penerapan Aplikasi SISKEUDES Berdasarkan PERMENDAGRI No.20 Tahun 2018	36
Tabel 4.1	Daftar Nama Kepala Desa Bulutellue.....	41
Tabel 4.2	Data Kondisi Demografis Desa Bulutellue 2025.....	42
Tabel 4.3	Tingkat Pendidikan Terakhir.....	43
Tabel 4.4	Mata Pencaharian Utama.....	43
Tabel 4.5	Coding key informan.....	52



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengelolaan keuangan desa memegang peranan penting dalam mewujudkan *good governance* di tingkat desa. Penerapan sistem yang mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan berfokus pada kepentingan masyarakat menjadi kunci tercapainya tata kelola pemerintah desa yang baik. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menjadi dasar hukum utama yang memberikan kewenangan bagi desa untuk mengatur dan mengurus kebutuhan masyarakatnya secara menyeluruh, termasuk dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Ketentuannya dipertegas melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri, salah satunya Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, yang menetapkan secara rinci mekanisme pengelolaan keuangan desa dengan susunan yang jelas dan teratur (Eo Kutu Goo & Sanda., 2022). Tujuan utama dana desa adalah untuk memberdayakan masyarakat desa dan membiayai pengeluaran pembangunan (Tomi et al., 2024). Sejalan dengan itu, penting bagi setiap desa untuk memiliki sistem pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, dan efisien guna mencapai tujuan pembangunan (Pasaribu et al., 2023).

Berdasarkan regulasi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, pemerintah pusat telah mengalokasikan dana desa secara bertahap. Pada tahun 2015, dana yang disalurkan mencapai Rp20,7 triliun, dan angka ini terus meningkat setiap tahunnya hingga mencapai Rp71 triliun pada tahun 2024. Peningkatan alokasi Dana Desa yang signifikan ini

menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperkuat pembangunan desa, sehingga menuntut pengelolaan keuangan desa yang lebih profesional dan akuntabel (Mariyadi, 2024).

Baik di perusahaan maupun pemerintah, akuntabilitas merupakan konsep krusial yang perlu diterapkan dalam pengelolaan keuangannya. Salah satu prinsip utama tata kelola pemerintahan yang baik adalah akuntabilitas, khususnya terkait pengelolaan keuangan. Akuntabilitas merupakan kewajiban setiap orang, organisasi, atau lembaga untuk melaksanakan tugas yang diberikan (Puspa & Prasetyo., 2020). Laporan keuangan yang dapat dijelaskan kepada masyarakat dan pihak terkait lainnya harus menunjukkan akuntabilitas dalam konteks pengelolaan keuangan desa. Lebih lanjut, untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, individu atau unit organisasi memiliki kewajiban untuk menjalankan tanggung jawab atas pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan sesuai dengan mandat yang telah dipercayakan (Sabir et., (2022).

Sebagai langkah untuk meningkatkan akuntabilitas, pemerintah meluncurkan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) yang berfungsi sebagai alat bantu dalam administrasi keuangan desa. Aplikasi ini dikembangkan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk membantu pemerintah desa merencanakan, menganggarkan, mengelola, dan melaporkan keuangan desa dengan lebih berhasil dan efisien. Diharapkan bahwa aplikasi ini akan membantu membuat semua prosedur pengelolaan keuangan menjadi bertanggung jawab dan terdokumentasi dengan baik. Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) diberlakukan untuk mengefisienkan pengelolaan keuangan desa dan

memfasilitasi pelaporan, dengan tujuan menjadi standar untuk pengelolaan keuangan desa yang mematuhi hukum dan peraturan. Sebagai alat untuk mendukung pengelolaan keuangan desa, termasuk pencatatan realisasi anggaran dan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), BPKP mengembangkan aplikasi SISKEUDES bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri (Rambu et al., 2024).

Penelitian empiris mengenai penggunaan aplikasi SISKEUDES menunjukkan dampak positif terhadap efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Studi yang dilakukan di Desa Permisan, Kecamatan Jabon, menemukan bahwa implementasi SISKEUDES meningkatkan efisiensi dalam pelaporan keuangan serta memberikan akses lebih transparan bagi masyarakat (Setiowati & Agustina, 2024). Karakteristik kualitas sistem dan informasi terbukti memiliki dampak yang signifikan terhadap kepuasan pengguna dan pemanfaatan aplikasi SISKEUDES di 55 desa di Kota Pariaman (Ramadhan, 2025). Sementara itu, penelitian di Desa Balaqtaroang, Kabupaten Bulukumba, mengungkap bahwa penggunaan SISKEUDES telah sesuai dengan regulasi, khususnya Permendagri No. 20 Tahun 2018, dengan implementasi versi terbaru aplikasi (R. Saputra, 2023).

Temuan dari analisis data tahun 2014 dan 2018 juga menunjukkan bahwa penerapan SISKEUDES berkontribusi pada peningkatan status desa berdasarkan Indeks Pembangunan Desa (IPD) di berbagai daerah. Studi lain di Desa Rantau Jaya mengindikasikan bahwa sejak penerapan SISKEUDES pada tahun 2017, desa mampu membuat laporan keuangan secara lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, mendukung prinsip good

governance dalam tata kelola keuangan desa (Fikriyani, 2019). Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menegaskan bahwa implementasi SISKEUDES membantu desa dalam mengelola dana secara lebih sistematis, mengurangi potensi penyalahgunaan anggaran, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.

Desa Bulutellue merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia pada tahun anggaran terakhir yakni 2025, Dana Desa yang diterima Desa Bulutellue tercatat sebesar Rp943.445.000 (DJPK Kemenkeu, 2025). Jumlah dana tersebut menunjukkan adanya kepercayaan dan komitmen pemerintah pusat dalam memperkuat kapasitas desa, khususnya dalam mendukung pengelolaan keuangan yang akuntabel.

Seiring dengan besarnya jumlah Dana Desa, pengelolaan keuangan desa menjadi aspek krusial untuk menjamin terciptanya tata kelola keuangan yang transparan, tertib, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dana yang besar tanpa pengelolaan yang baik berpotensi menimbulkan penyimpangan, penggunaan dana yang kurang efisien, dan hilangnya kepercayaan masyarakat. Dengan demikian, pemerintah desa dituntut untuk melaksanakan penerapan SISKEUDES sesuai dengan regulasi. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan berjudul **“Penerapan aplikasi Sistem Keuangan Desa dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan Desa Bulutellue Kabupaten Sinjai”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, dapat ditetapkan rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan aplikasi Sistem Keuangan Desa di Desa Bulutellue Kabupaten Sinjai sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018?
2. Bagaimana penerapan aplikasi Sistem Keuangan Desa dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan Desa Bulutellue Kabupaten Sinjai?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai:

1. Untuk mengkaji penerapan aplikasi Sistem Keuangan Desa di Desa Bulutellue Kabupaten Sinjai sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018.
2. Untuk mengkaji penerapan aplikasi Sistem Keuangan Desa dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan Desa Bulutellue Kabupaten Sinjai.

D. Manfaat Penelitian

Kajian ini diharapkan mampu memberikan dampak positif dalam beberapa aspek sebagai berikut:

1. Manfaat Akademik

Memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan khususnya terkait penerapan aplikasi Sistem Keuangan Desa

(SISKEUDES) dan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah Desa Bulutellue dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Selain itu, hasil penelitian ini mendorong partisipasi masyarakat melalui akses informasi yang lebih transparan dan akuntabel.

3. Manfaat Metodologis

Menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang tertarik mengkaji topik serupa, terutama terkait pengelolaan keuangan desa dan penerapan sistem informasi keuangan berbasis aplikasi.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Teori Administrasi Publik

Administrasi publik merujuk pada pelaksanaan sistematis kebijakan pemerintah serta pengelolaan program-program publik dengan tujuan melayani masyarakat secara efektif. Dalam praktiknya, administrasi publik mencakup aktivitas seperti perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, koordinasi, dan pengendalian sumber daya yang dimiliki sektor publik (Madan, 2022). Sebagai bidang studi akademis, administrasi publik memadukan ilmu politik, manajemen, dan hukum guna menjamin akuntabilitas serta responsivitas dalam pemerintahan. Peran administrasi publik sangat krusial dalam penyediaan layanan publik, pemenuhan kebutuhan masyarakat, serta mendukung pembangunan dan keadilan (Sandfort & Moulton, 2015).

Administrasi publik merupakan proses di mana sumber daya dan personel publik diorganisasikan dan dikoordinasikan untuk merumuskan, melaksanakan, dan mengelola keputusan dalam kebijakan publik (Peters, 2018; Molenveld *et al.*, 2020). Dengan demikian, untuk mencapai tujuan administrasi publik diperlukan suatu proses atau mekanisme yang dilakukan oleh seluruh personel yang ada dengan menggunakan seluruh sumber daya yang ada, terorganisir dengan baik dan terkoordinasi dalam melaksanakan suatu keputusan yang telah ditetapkan dalam suatu kebijakan (Carey & Crammond, 2015). Salah satu bentuk mekanisme

agar terbentuknya administrasi publik yang ideal adalah melalui mekanisme berbasis akuntabilitas.

2. Akuntabilitas Keuangan Desa

Akuntabilitas merupakan konsep fundamental dalam tata kelola organisasi modern, baik di sektor publik maupun swasta. Secara umum, akuntabilitas dapat diartikan sebagai kewajiban seseorang, sekelompok orang, atau suatu lembaga untuk mempertanggungjawabkan segala tindakan, keputusan, pengelolaan sumber daya, serta hasil yang telah dicapai dalam menjalankan tugas dan wewenangnya kepada pihak yang berwenang atau berkepentingan (stakeholders) (Sulfiani & Reski, 2020).

Dalam konteks administrasi dan pengelolaan keuangan, akuntabilitas berarti bahwa pihak yang diberikan mandat untuk mengelola dana atau sumber daya publik harus dapat memberikan laporan yang transparan, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai bagaimana dana tersebut digunakan, untuk tujuan apa, serta capaian yang dihasilkan (Nurizkiana *et al.*, 2016).

Akuntabilitas merujuk pada kewajiban individu, organisasi, atau institusi untuk bertanggung jawab atas tindakan, keputusan, dan kebijakan yang mereka ambil serta memberikan pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan (Lindberg, 2013). Akuntabilitas mencakup transparansi, integritas, dan kepatuhan terhadap standar etika serta hukum guna memastikan bahwa sumber daya dikelola secara efektif dan tujuan dapat tercapai (Hall *et al.*, 2016). Dalam pengelolaan keuangan, akuntabilitas memastikan bahwa catatan keuangan akurat, dana digunakan dengan tepat, dan proses pengambilan keputusan dapat

dipertanggungjawabkan (McGrath, 2018). Mekanisme akuntabilitas yang efektif dapat meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan, memperkuat tata kelola, serta mengurangi risiko kecurangan atau penyalahgunaan (Fan, 2024).

Aspek akuntabilitas dalam keuangan mengacu pada tanggung jawab individu, organisasi, dan institusi untuk memastikan transparansi, ketepatan, dan integritas dalam pengelolaan keuangan. Hal ini mencakup pencatatan keuangan yang jelas, kepatuhan terhadap peraturan serta standar etika, serta penggunaan sumber daya keuangan secara efisien dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan (Osho & Afolabi, 2014). Akuntabilitas keuangan mengharuskan organisasi atau instansi pemerintah (layanan masyarakat) untuk menyusun laporan keuangan yang tepat waktu dan akurat, melakukan audit, serta menerapkan pengendalian internal guna mencegah kecurangan dan penyalahgunaan. Selain itu, akuntabilitas keuangan juga mencakup kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan, seperti investor, lembaga pemerintah, dan masyarakat, dengan menjelaskan keputusan keuangan yang diambil serta menunjukkan tanggung jawab fiskal (Bingilar & Temitope, 2019). Akuntabilitas keuangan yang efektif dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap suatu organisasi atau instansi, memperbaiki tata kelola organisasi atau instansi tersebut hingga berkontribusi terhadap stabilitas dan keberlanjutan sistem keuangan secara keseluruhan pada suatu organisasi atau instansi (Gaspar *et al.*, 2022; Osho & Afolabi, 2014).

Indonesia sebagai negara yang berdaulat dan taat pada hukum serta menekankan pada kemaslahatan masyarakat hingga transparansi instansi pemerintah harus memiliki prinsip pada akuntabilitas terutama pada mekanisme keuangan salah satunya keuangan desa dengan tingkat sensitivitas yang tinggi. Prinsip-prinsip akuntabilitas keuangan desa di Indonesia dirancang untuk memastikan transparansi, efisiensi, dan integritas dalam pengelolaan dana desa. Prinsip-prinsip ini didasarkan pada regulasi seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, yang menekankan pentingnya pengelolaan keuangan yang bertanggung jawab guna mendukung pembangunan pedesaan (Nurlinda, 2018).

Prinsip utama meliputi transparansi mengharuskan semua transaksi keuangan dan alokasi anggaran diumumkan secara terbuka kepada masyarakat melalui musyawarah desa dan papan informasi akuntabilitas di mana aparat desa harus bertanggung jawab atas keputusan keuangan mereka serta melaporkan pengeluaran dengan akurat kepada otoritas yang lebih tinggi dan berdasarkan pada partisipasi dengan memastikan bahwa masyarakat desa terlibat secara aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pengelolaan keuangan (Saputra *et al.*, 2018).

Selain itu, prinsip efektivitas dan efisiensi menuntut agar dana desa digunakan secara optimal untuk mencapai tujuan pembangunan tanpa pemborosan atau penyalahgunaan. Kepatuhan terhadap regulasi memastikan bahwa seluruh aktivitas keuangan sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan daerah, sehingga dapat mengurangi risiko korupsi

atau penyimpangan. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan desa, membangun kepercayaan masyarakat, serta memastikan bahwa dana desa digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk desa (Rahmani, 2022).

Kondisi keuangan dianalisis melalui tiga dimensi utama yaitu keberlanjutan (*sustainability*), fleksibilitas (*flexibility*), dan kerentanan (*vulnerability*). Keberlanjutan (*sustainability*) mengacu pada kemampuan suatu organisasi atau suatu instansi pemerintahan untuk mempertahankan program-programnya sambil tetap memenuhi kewajiban kredit tanpa meningkatkan utangnya. Fleksibilitas (*flexibility*) menunjukkan sejauh mana suatu organisasi atau instansi pemerintahan dapat menambah sumber daya keuangannya untuk menanggapi peningkatan komitmen, baik melalui peningkatan pendapatan maupun penambahan utang. Sementara itu, kerentanan (*vulnerability*) menggambarkan sejauh mana suatu organisasi atau instansi pemerintahan bergantung pada sumber daya yang berada di luar kendalinya (Lacuzzi, 2022).

Dimensi dari keuangan tersebut memiliki korelasi terhadap aspek dan indikator kunci dari akuntabilitas keuangan sehingga dari dimensi yang telah dijelaskan dapat diturunkan menjadi beberapa aspek dan indikator kunci. Berikut pada Tabel 2.1 dicantumkan mengenai dimensi, aspek dan indikator kunci akuntabilitas dalam keuangan didasarkan pada Lacuzzi (2022) dan Tkachenko (2020).

Tabel 2.1 Dimensi, Aspek dan Indikator Kunci Akuntabilitas dalam Keuangan

No.	Dimensi	Aspek	Indikator Kunci
1.	Keberlanjutan	Transparansi (<i>transparency</i>)	Ketersediaan laporan keuangan bagi pemangku kepentingan; Dokumentasi transaksi keuangan yang jelas; Akses terbuka terhadap alokasi anggaran dan pengeluaran.
		Kepatuhan (<i>compliance</i>)	Kepatuhan terhadap regulasi dan kebijakan keuangan; Kesesuaian dengan standar akuntansi; Audit internal dan eksternal secara berkala.
		Tanggung Jawab (<i>responsibility</i>)	Peran dan tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan; Akuntabilitas pejabat keuangan atas keputusan dan pengeluaran; Tindakan korektif terhadap kesalahan pengelolaan keuangan.
		Ketepatan (<i>accuracy</i>)	Ketepatan pencatatan dan pembukuan keuangan yang akurat; Rekonsiliasi data keuangan secara tepat waktu; Pelaporan keuangan bebas dari kesalahan.
2.	Fleksibilitas (<i>Flexibility</i>)	Efisiensi (<i>efficiency</i>)	Pengalokasian sumber daya keuangan secara optimal; Pengambilan keputusan keuangan yang hemat biaya;

No.	Dimensi	Aspek	Indikator Kunci
			Pengurangan pengeluaran yang tidak perlu.
3.	Kerentanan (<i>Vulnerability</i>)	Integritas (<i>integrity</i>) Keterlibatan Pemangku Jabatan (<i>stakeholder involvement</i>)	Pengelolaan keuangan secara etis; Pencegahan kecurangan, korupsi/penyalahgunaan keuangan; Mekanisme pengendalian internal yang kuat. Partisipasi publik dalam perencanaan dan evaluasi anggaran; Pelaporan dan komunikasi dengan pemangku kepentingan; Mekanisme umpan balik dan pengaduan terkait keuangan.

(Sumber: Diadaptasi dari Lacuzzi (2022) dan Tkachenko (2020))

Regulasi terkait akuntabilitas keuangan desa di Indonesia diatur dalam beberapa kerangka hukum utama yang bertujuan untuk memastikan transparansi, efisiensi, dan integritas dalam pengelolaan dana desa. Regulasi utama yang mengatur hal ini adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang wajibkan pengelolaan keuangan desa dilakukan secara transparan, akuntabel, partisipatif, dan tertib sesuai dengan peraturan yang berlaku (Kadir et al., 2016). Undang-undang ini diperjelas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, yang mengatur prosedur pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, termasuk perencanaan anggaran, alokasi dana, dan pelaporan keuangan (Junaidi, 2022). Selain itu, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 memberikan pedoman

khusus mengenai pengelolaan keuangan desa, yang mewajibkan penggunaan aplikasi SISKEUDES (Sistem Keuangan Desa) untuk memastikan pencatatan yang akurat serta mencegah penyalahgunaan dana (Rosari & Manabulu, 2020).

3. Konsep Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES)

Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) adalah aplikasi pengelolaan keuangan yang dikembangkan oleh pemerintah Indonesia, khususnya oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri. Sistem ini dirancang untuk memfasilitasi pengelolaan keuangan desa yang efisien, transparan, dan akuntabel (Milenia et al., 2023). SISKEUDES berfungsi sebagai alat digital yang membantu pemerintah desa dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, dan audit keuangan desa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Tujuan utama SISKEUDES adalah menyederhanakan administrasi keuangan, mengurangi kesalahan dalam pencatatan keuangan, dan meminimalkan risiko penyalahgunaan dana atau korupsi (Faizah & Sari, 2022; Milenia et al., 2023). Secara normatif, pengelolaan keuangan desa merupakan serangkaian kegiatan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Kelima aspek ini menjadi struktur operasional yang digunakan dalam implementasi SISKEUDES sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 (Setiawan et al., 2024).

Melalui pengintegrasian seluruh aspek transaksi keuangan desa ke dalam satu sistem yang terstandarisasi, SISKEUDES meningkatkan akurasi data, kepatuhan terhadap regulasi, dan akuntabilitas keuangan. Selain itu, SISKEUDES memperkuat transparansi publik dengan memungkinkan masyarakat untuk memantau aktivitas keuangan desa, sehingga memastikan bahwa dana desa digunakan secara efektif untuk pembangunan pedesaan. Melalui penerapan sistem ini, pemerintah bertujuan untuk meningkatkan tata kelola di tingkat desa, mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dan mendukung tujuan pembangunan daerah yang merata di Indonesia (Triwibowo & Malik, 2023).

Sistem keuangan yang ideal harus berada pada tatanan manajemen yang baik sehingga seluruh dana yang diberikan oleh pemerintah pusat dapat dialokasikan secara adil, ideal, efektif dan efisien. Manajemen keuangan yang ideal diatur melalui langkah yang sistematis seperti yang dicantumkan pada Gambar 2.1 tentang siklus manajemen keuangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah berdasarkan Lawson (2015).

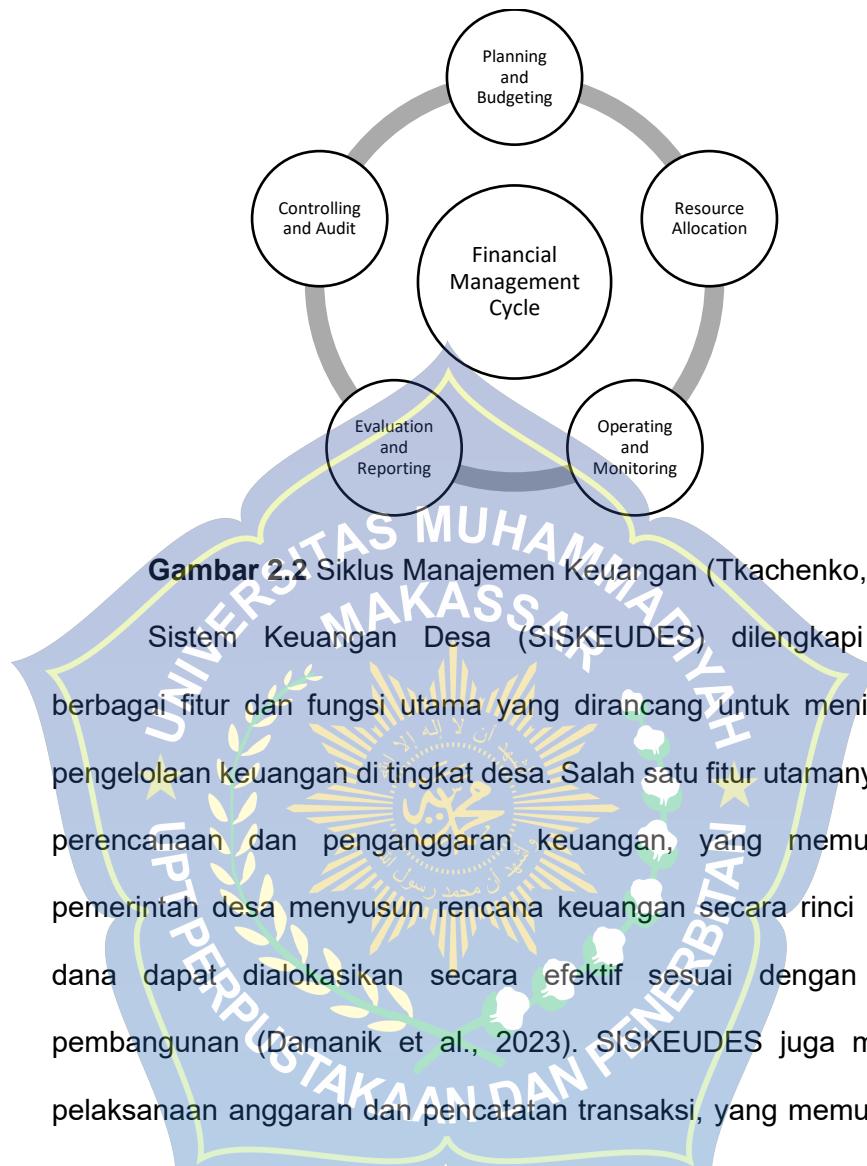


Gambar 2.1 Siklus Manajemen Keuangan dari Presiden hingga Pemerintah Daerah pada Sektor Publik dan Swasta (Lawson, 2015)

Gambar 2.1 menampilkan siklus manajemen keuangan di sektor publik dan swasta, yang menggambarkan proses utama serta pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengelolaan keuangan. Pusat siklus ini terdapat Kantor Presiden, Kementerian Keuangan, Sektor-sektor, dan Pemerintah Daerah, yang mengawasi aktivitas keuangan serta proses pengambilan keputusan. Siklus ini dimulai dengan perumusan kebijakan, yang dipengaruhi oleh partai politik, akademisi, dan lembaga penelitian. Kebijakan tersebut menjadi dasar bagi perumusan anggaran, yang kemudian diajukan untuk persetujuan anggaran oleh legislatif guna memastikan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Setelah disetujui, tahap berikutnya adalah pelaksanaan anggaran, di mana dana dialokasikan dan digunakan sesuai dengan rencana kegiatan yang telah ditetapkan. Tahap ini diawasi oleh audit internal serta dipantau oleh masyarakat sipil untuk memastikan transparansi. Setelah anggaran dieksekusi, dilakukan proses akuntansi dan pencatatan keuangan, yang melibatkan lembaga seperti Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) dan Badan Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ). Akuntabilitas keuangan dijaga melalui proses audit eksternal yang ditinjau oleh legislatif dan diawasi oleh kelompok masyarakat sipil (Lawson, 2015).

Siklus manajemen keuangan oleh Lawson (2015) kemudian disederhanakan oleh Tkachenko (2020) agar lebih mudah dipahami oleh masyarakat secara lebih luas sehingga meningkatkan kesadaran (awareness) terhadap mekanisme sistem keuangan khususnya sistem

keuangan desa (SISKEUDES). Gambar 2.2 dicantumkan siklus manajemen keuangan berdasarkan Tkachenko (2020).



Gambar 2.2 Siklus Manajemen Keuangan (Tkachenko, 2020)

Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dilengkapi dengan berbagai fitur dan fungsi utama yang dirancang untuk meningkatkan pengelolaan keuangan di tingkat desa. Salah satu fitur utamanya adalah perencanaan dan penganggaran keuangan, yang memungkinkan pemerintah desa menyusun rencana keuangan secara rinci sehingga dana dapat dialokasikan secara efektif sesuai dengan prioritas pembangunan (Damanik et al., 2023). SISKEUDES juga mencakup pelaksanaan anggaran dan pencatatan transaksi, yang memungkinkan pemantauan penerimaan dan pengeluaran secara real-time guna menjaga transparansi keuangan dan mencegah penyalahgunaan dana (Ardiansyah & Wibowo, 2024).

Fungsi penting lainnya adalah pelaporan keuangan, di mana SISKEUDES secara otomatis menghasilkan laporan keuangan yang terstandarisasi, memastikan kepatuhan terhadap regulasi nasional, serta

memudahkan proses audit. SISKEUDES juga terintegrasi dengan mekanisme pengendalian internal, termasuk jejak audit dan alat validasi, untuk meningkatkan akuntabilitas serta meminimalkan kesalahan dalam transaksi keuangan (Damanik, 2023). Selain itu, SISKEUDES mendukung transparansi publik dan keterlibatan pemangku kepentingan dengan menyediakan akses terhadap data keuangan, memungkinkan masyarakat untuk memantau penggunaan dana desa dan berpartisipasi dalam proses pemerintahan. Melalui otomatisasi dan standarisasi pengelolaan keuangan, SISKEUDES mengurangi beban administratif, meminimalkan risiko korupsi, serta meningkatkan tata kelola di tingkat desa, sehingga berkontribusi pada pembangunan pedesaan yang berkelanjutan di Indonesia (Kesa et al., 2024).

Penerapan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam pengelolaan keuangan desa memainkan peran penting dalam mengurangi korupsi, ketidakefisienan, dan penyalahgunaan dana desa oleh individu yang tidak bertanggung jawab. Dengan mendigitalkan transaksi keuangan dan mengintegrasikan mekanisme pengendalian internal, SISKEUDES meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, sehingga mempersempit peluang terjadinya kecurangan. Sistem ini memastikan bahwa setiap transaksi keuangan, mulai dari perencanaan anggaran hingga pelaporan, dicatat secara standar dan dapat diverifikasi, sehingga mengurangi kemungkinan penggelapan atau manipulasi dana (Warsaleh et al., 2023).

Selain itu, otomatisasi dalam proses keuangan mengurangi campur tangan manusia dalam aspek-aspek kritis, yang pada gilirannya

menekan risiko kesalahan, ketidakefisienan, serta pengelolaan dana yang tidak semestinya. SISKEUDES juga memperkuat kepatuhan terhadap regulasi keuangan nasional, memastikan bahwa dana desa dialokasikan dan digunakan sesuai dengan rencana pembangunan yang telah ditetapkan (Mahmud et al., 2024). Lebih lanjut, sistem ini menyediakan akses publik terhadap data keuangan, memungkinkan masyarakat untuk memantau penggunaan dana serta menuntut pertanggungjawaban dari aparatur desa, sehingga mencegah penyalahgunaan dana untuk kepentingan pribadi (Usman & Sundari, 2024).

4. Penerapan Teknologi dalam Pengelolaan Keuangan Desa

Digitalisasi telah mengubah hampir setiap aspek kehidupan di era modern, membentuk kembali cara individu, bisnis, dan pemerintah beroperasi. Dalam komunikasi, teknologi digital telah mempercepat dan meningkatkan efisiensi interaksi melalui pesan instan, media sosial, dan konferensi video. Sektor ekonomi juga mengalami perubahan besar dengan hadirnya e-commerce, fintech, dan perbankan digital yang memungkinkan transaksi lebih mudah serta memperluas inklusi keuangan (Müller-Salo, 2024). Pada bidang pendidikan, platform pembelajaran online, perpustakaan digital, dan kelas virtual telah merevolusi akses terhadap pengetahuan, menjadikan pendidikan lebih fleksibel dan inklusif. Sektor kesehatan juga mendapat manfaat dari digitalisasi melalui telemedicine, rekam medis elektronik, dan diagnostik berbasis kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI), yang

meningkatkan layanan medis serta perawatan pasien (Gualano et al., 2023; Kryzhanovskij et al., 2021).

Layanan e-government dalam pemerintahan telah meningkatkan efisiensi administrasi publik, mengurangi birokrasi, dan meningkatkan transparansi. Namun, meskipun menawarkan berbagai keuntungan, digitalisasi juga menghadirkan tantangan seperti ancaman keamanan siber, masalah privasi data, dan kesenjangan digital yang dapat memperdalam ketidaksetaraan sosial serta ekonomi (Hartika et al., 2023). Dalam langkah memaksimalkan manfaat dari digitalisasi, pemerintah dan organisasi harus berinvestasi dalam literasi digital, langkah-langkah keamanan siber yang kuat, serta kebijakan inklusif yang memastikan akses teknologi yang merata bagi seluruh komunitas (Duggappa, 2024).

Digitalisasi dalam sistem keuangan publik merujuk pada transformasi proses pengelolaan keuangan melalui penggunaan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Pemerintah di seluruh dunia mengadopsi sistem keuangan digital guna menyederhanakan perencanaan anggaran, pemantauan pengeluaran, pengumpulan pendapatan, serta pelaporan keuangan (Olaru et al., 2022). Melalui pengintegrasian platform digital, seperti sistem pembayaran elektronik, perangkat lunak akuntansi otomatis, dan transaksi berbasis blockchain, pengelolaan keuangan publik menjadi lebih aman, mengurangi kesalahan, serta meminimalkan peluang terjadinya korupsi (del Paso et al., 2023). Digitalisasi juga memungkinkan pemantauan keuangan secara real-time, sehingga membuat kebijakan

dan pemangku kepentingan dapat mengambil keputusan berdasarkan data yang akurat dan terkini. Selain itu, penerapan sistem keuangan digital meningkatkan aksesibilitas, memungkinkan masyarakat untuk memantau pengeluaran publik, berpartisipasi dalam tata kelola pemerintahan, dan menuntut akuntabilitas dari institusi pemerintah (Long, 2023).

Penerapan teknologi dalam administrasi desa menghadirkan tantangan dan peluang yang berdampak signifikan terhadap tata kelola, pelayanan publik, dan manajemen keuangan. Salah satu tantangan utama adalah kesenjangan digital, di mana banyak daerah pedesaan masih mengalami keterbatasan akses internet, infrastruktur teknologi yang belum memadai, serta rendahnya literasi digital di kalangan aparat desa dan masyarakat (Choiriyah et al., 2022). Hambatan lainnya adalah resistensi terhadap perubahan, karena beberapa administrator mungkin enggan mengadopsi sistem baru akibat ketidaktahuan atau kekhawatiran terhadap transparansi dan akuntabilitas (Nadaa & Priyanti, 2023).

Selain itu, ancaman keamanan siber juga menjadi risiko yang perlu diantisipasi dengan langkah-langkah perlindungan data yang kuat untuk menjaga keamanan informasi keuangan dan administrasi desa (Elfirar & Putri, 2024). Meskipun demikian, integrasi teknologi dalam administrasi desa menawarkan berbagai peluang. Aplikasi digital seperti SISKEUDES memungkinkan pengelolaan keuangan yang lebih efisien, meningkatkan transparansi, serta mengurangi risiko korupsi. Platform e-government memfasilitasi komunikasi yang lebih baik antara pemerintah

daerah dan warga, sehingga meningkatkan pelayanan publik dan partisipasi masyarakat (Nadaa, 2023).

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang akan dimuat pada Tabel 2.2 merupakan kajian penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan dilaksanakan. Judul dari penelitian yang akan dilaksanakan adalah “Analisis Penerapan Aplikasi SISKEUDES Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan Desa Bulutellue Kabupaten Sinjai” sehingga relevansi penelitian terdahulu didasarkan pada kata kunci “penerapan aplikasi SISKEUDES”, “akuntabilitas dana desa” “manajemen keuangan desa” dan “keberhasilan aplikasi SISKEUDES dalam meningkatkan akuntabilitas dana desa”. Penelitian terdahulu yang relevan dengan kata kunci tersebut dikaji fokus permasalahan penelitian, penggunaan metode penelitian hingga hasil penelitian dengan tujuan menemukan “research gap” atau kesenjangan dalam penelitian sehingga ditemukan aspek kebaruan “novelty” pada penelitian yang akan dilaksanakan melalui kajian sejumlah lima artikel.

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Alat Analisis	Hasil Penelitian
1.	Elfirar, Indah dan Putri, N.E. (2024). <i>Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa</i> , 5(1): 1-11. Doi: 10.47134/villages.v5i1.90	Penerapan Penggunaan Aplikasi SISKEUDES dalam Upaya Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan	Lembar wawancara dan lembar observasi	Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil pengelolaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa di Nagari Selayo menunjukkan bahwa proses pelimpahan dan pelaporan melibatkan

No.	Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Alat Analisis	Hasil Penelitian
		Desa di Nagari Selayo		pertanggungjawaban yang relevan dan aplikasi ini dijalankan dengan struktur yang baik. Namun, kendala yang dihadapi dalam penerapan Aplikasi SISKEUDES di Nagari Selayo termasuk kurangnya sumber daya yang tersedia dan perubahan peraturan yang tiba-tiba, yang mengakibatkan perlunya perubahan data yang telah dimasukkan dan memakan waktu yang cukup panjang dalam prosesnya.
2.	Kesa, D.D. Nurfikri, Ari dan Lee, Cheng-Wen. (2024). <i>Khazanah Sosial</i> , 6(3). Doi: 10.15575/ks.v6i3.38933	<i>Evaluation of the Village Financial Information System (SISKEUDES) in Enhancing Governance and Financial Transparency in Indonesian Village Administration</i>	SPSS	Hasil penelitian menunjukkan bahwa informasi keuangan yang memiliki manajemen baik, transparansi yang baik hingga akuntabilitas yang tinggi melalui penggunaan aplikasi SISKEUDES yang telah disempurnakan oleh ahli teknologi informatika maupun pengembang aplikasi. Hal tersebut menunjukkan bahwa aplikasi SISKEUDES sukses dalam memberikan kualitas informasi, sistem informasi dan kualitas layanan terkait

No.	Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Alat Analisis	Hasil Penelitian
				keuangan dan dana desa kepada seluruh lapisan masyarakat pada suatu desa.
3.	Milenia, H.A. Effendy, Lukman dan Nurabiah, Nurabiah. (2022). <i>Jurnal Akuntansi dan Keuangan Unja (JAKU)</i> , 7(2). Doi: 10.22437/jaku.v7i2.18494	Efektivitas Penerapan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Laporan Keuangan Desa (Studi Kasus Desa Taman Sari Kecamatan Gunungsari).	Lembar observasi, lembar wawancara dan dokumentasi	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SISKEUDES dilihat dari indikator kesesuaian informasi yang diminta dalam template/program, kesesuaian jenis laporan, ketepatan dan kepastian waktu pelaporan, kesesuaian persyaratan, prosedur, dan tahapan pelaporan, dan umpan balik (<i>feedback</i>) dapat dikatakan sudah efektif. Kemudian mengenai akuntabilitas laporan keuangan desa dilihat dari indikator akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal, bahwa pelaporan dan pertanggungjawaban pemerintah desa secara vertikal dan horizontal dapat dikatakan sudah baik atau sudah akuntabel, meskipun masih terdapat kendala yaitu berkaitan dengan kecukupan atau kelengkapan SPJ (surat pertanggungjawaban) pada saat pelaporan dan

No.	Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Alat Analisis	Hasil Penelitian
				pertanggungjawaban yang dilakukan pemerintah Desa Taman Sari.
4.	Ramadhan, T.S. (2025). <i>Jurnal Manajemen dan Pemasaran Digital: JMPD</i> , 3(1). Doi: 10.38035/jmpd.v3i1.294	Menilai Keberhasilan Sistem Keuangan Desa Menggunakan Model Kesuksesan Sistem Informasi DeLone & McLean (Studi Empiris pada Pemerintah Desa di Kota Pariaman).	SmartPLS versi 3.0	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas informasi berpengaruh positif terhadap kepuasan pengguna, sedangkan kualitas sistem dan kualitas layanan tidak memengaruhi kepuasan pengguna. Lebih lanjut, kepuasan pengguna tidak memengaruhi pemanfaatan SISKEUDES.
5.	Maharani, D.N dan Akbar, F.S. (2020). <i>Behavioral Accounting Journal</i> , 3(1):1-20. Doi: 10.33005/baj.v3i1.55	Penerapan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam Mewujudkan Akuntabilitas Pemerintahan Desa	Lembar wawancara, Lembar observasi dan dokumentasi	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan SISKEUDES di Desa Banjaragung membantu proses akuntabilitas desa kepada pemerintah daerah dan masyarakat dengan adanya laporan keuangan desa yang dihasilkan oleh aplikasi ini. Desa Banjaragung telah menerapkan SISKEUDES yang disesuaikan dengan Permendagri No. 20 tahun 2018 tentang Akuntansi Keuangan Desa sehingga dapat dipertanggungjawabkan kualitas pelaporannya

No.	Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Alat Analisis	Hasil Penelitian
				berdasarkan pada akuntansi desa yang berlaku.
7.	Utami, O.P. Agustin, Erni dan Priyono, Nuwun. (2023). <i>Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi</i> , 3(1). Doi: 10.55606/jumia.v1i3.1489	Analisis Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Dalam Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Desa di Desa Karangrejo Kecamatan Selomerto	Lembar pedoman studi kepustakaan, Lembar observasi dan Lembar wawancara	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengelolaan aplikasi SISKEUDES di Desa Karangrejo Kecamatan Selomerto Kabupaten Wonosobo telah dilakukan secara akuntabel, hal ini bisa dilihat dari indikator akuntabilitas pada Pemerintah Desa Karangrejo sudah memenuhi indikator tersebut, yang meliputi adanya mekanisme complain dan respons, adanya mekanisme pertanggungjawaban kegiatan, dan adanya indikator kinerja. Dengan adanya aplikasi SISKEUDES, pemerintah desa sangat terbantu dalam mengelola keuangan maupun anggaran desa dan juga memberikan keakuratan pada pelaporan yang sudah dibuat serta menjunjung tinggi transparansi dan akuntabilitas pelaporan.
8.	Batee, Endianus dan Nasution, Minasari. (2024). <i>Innovative: Journal Of Social Science Research</i> , 4(2). Doi:	Analisa Pemanfaatan Aplikasi Sistem Keuangan Desa	Lembar pedoman sumber data penelitian	Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Desa Tanjung Selamat telah melakukan proses pertanggungjawaban secara relevan dengan

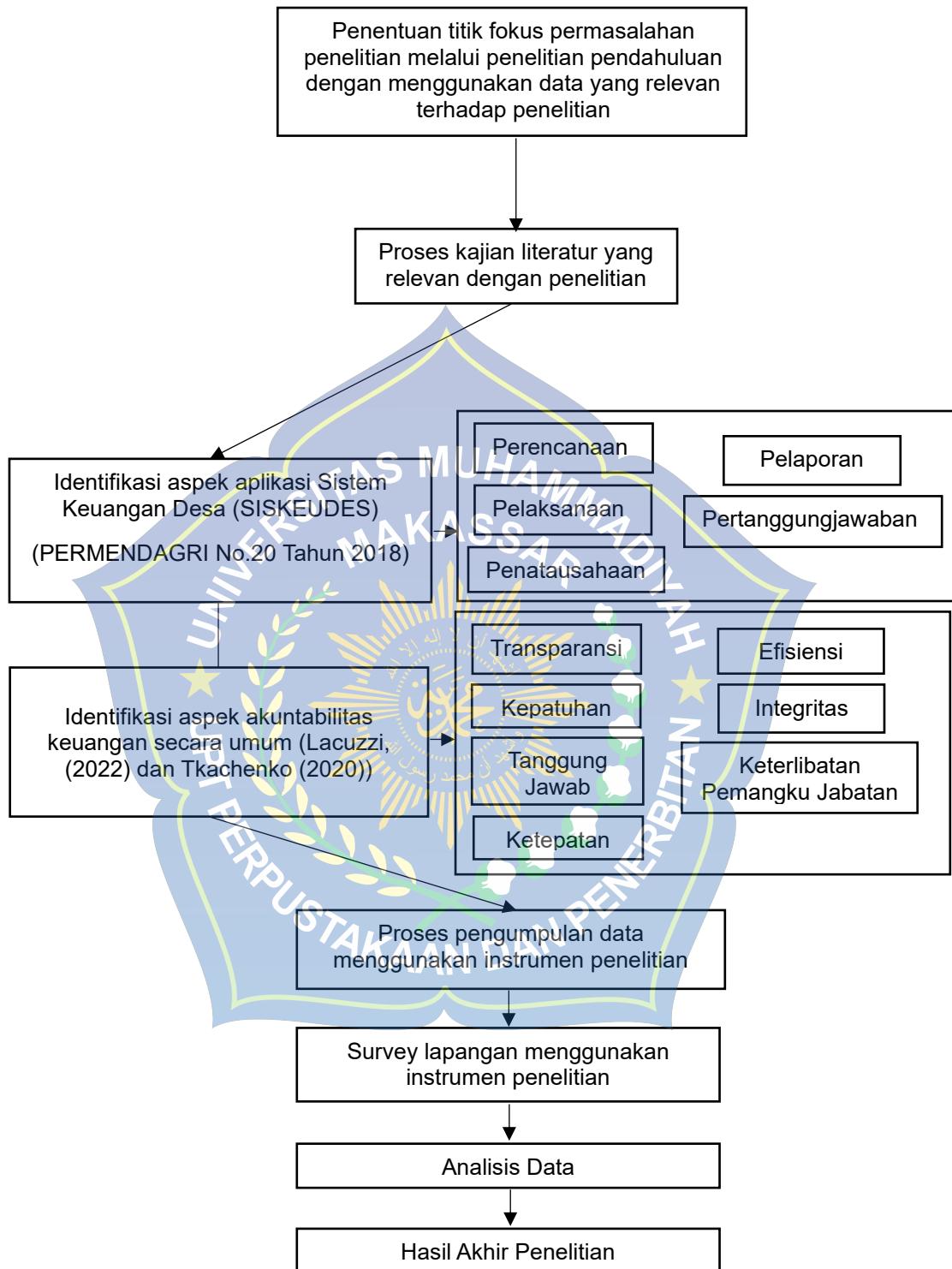
No.	Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Alat Analisis	Hasil Penelitian
		(SISKEUDES) dalam Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Kinerja Keuangan Kantor Desa Tanjung Selamat		menerapkan aplikasi sistem keuangan desa yang sudah disesuaikan dengan ketentuan yang ada secara baik. Aplikasi sistem keuangan desa di Desa Tanjung Selamat telah memberikan kemudahan bagi perangkat desa dalam melaporkan pertanggungjawaban sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang akurat.
9.	Diana, Putri. Hilendri, B.A.L dan Nurabiah, Nurabiah. (2023). <i>Jurnal Aplikasi Akuntansi</i> , 7(2): 298-314. Doi: 10.29303/jaa.v7i2.178	Peran Sistem Keuangan Desa dalam Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Desa di Desa Penujak	Lembar wawancara dan Dokumentasi	Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa, penerapan SISKEUDES dilihat dari indikator integritas keuangan, penungkapan dan ketaatan terhadap peraturan dikatakan efektif dalam penerapannya karena mampu memudahkan pemerintah Desa Penujak dalam mengatur tata Kelola keuangan pemerintahan dengan baik, terdapat fitur-fitur dalam aplikasi yang mampu menyediakan informasi (format) yang sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang ada. Selain itu juga dapat mempermudah

No.	Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Alat Analisis	Hasil Penelitian
				<p>pengelolaan keuangan baik dari perencanaan sampai ke pertanggungjawaban, yang menghasilkan laporan keuangan yang akurat, relevan dan terbaru serta menghasilkan laporan keuangan yang akuntabel. Namun ada kekurangan dari aplikasi SISKEUDES ini yakni terkena spam, tidak tersedianya lembar form realisasi penggunaan dana desa tahap pertama dan eror pada sistem saat dilakukan penginputan sehingga menghambat proses tersebut. Eror pada sistem ini terjadi karena koneksi internet tidak stabil. Kemudian mengenai akuntabilitas pelaporan keuangan desa dilihat dari sisi indikator akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal dapat dikatakan sudah baik atau akuntabel. Namun masih terdapat kendala yang berkaitan dengan kelengkapan SPJ (Surat Pertanggungjawaban), ketika pelaporan dan pertanggungjawaban</p>

No.	Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Alat Analisis	Hasil Penelitian
				yang dilakukan pemerintah Desa Penujak Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Masyarakat setempat melalui BPD setiap akhir tahun.
10.	Afriady, A. (2024). <i>Management Science Research Journal</i> , 3(3), 22–30. Doi: 10.56548/msr.v3i3.109	<i>The Influence of Village Financial System Applications on Fraud Prevention with Competence as Moderator in Village Fund Management.</i>	SEM-PLS	Hasil penelitian menunjukkan terdapat pengaruh langsung Aplikasi SISKEUDES terhadap Pencegahan Kecurangan dalam pengelolaan dana desa di Desa Babakan Cikao Purwakarta. Kompetensi juga mampu memperkuat pengaruh aplikasi SISKEUDES dalam mencegah penyelewengan pengelolaan dana desa. Hal ini menunjukkan pentingnya peningkatan kompetensi perangkat desa untuk mampu mengoperasikan aplikasi SISKEUDES. Kompetensi dapat berupa pelatihan, pendampingan rutin atau pendidikan formal yang dibutuhkan aparat desa.

(Sumber: Kajian Literatur Diolah oleh Peneliti, 2025)

C. Kerangka Pikir Penelitian



Gambar 2.3 Kerangka Pikir Penelitian

Kerangka pikir penelitian pada gambar 2.3 disusun untuk memberikan gambaran sistematis mengenai tahapan-tahapan dalam menganalisis penerapan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan Desa Bulutellue, Kabupaten Sinjai. Penelitian diawali dengan penentuan fokus permasalahan melalui studi pendahuluan, dengan cara mengumpulkan data yang relevan. Tahapan ini penting untuk memperoleh pemahaman awal terkait permasalahan yang ada di lapangan. Selanjutnya, dilakukan kajian literatur yang relevan untuk memperkuat landasan teoritis dan konseptual penelitian. Berdasarkan kajian tersebut, peneliti mengidentifikasi aspek-aspek utama dalam aplikasi SISKEUDES, yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Selain itu, aspek akuntabilitas manajemen keuangan desa secara umum juga diidentifikasi, meliputi transparansi, kepatuhan, tanggung jawab, ketepatan, efisiensi, integritas, dan keterlibatan pemangku jabatan. Keduanya menjadi dasar dalam penyusunan instrumen penelitian. Data dikumpulkan melalui survei lapangan menggunakan instrumen yang telah disusun, kemudian dianalisis secara sistematis untuk memperoleh temuan yang valid dan reliabel. Proses ini diharapkan menghasilkan kesimpulan yang dapat menggambarkan sejauh mana penerapan aplikasi SISKEUDES berkontribusi dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan Desa Bulutellue, Kabupaten Sinjai.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif yang bersifat deskriptif. Menurut Sugiyono (2016:9), desain penelitian deskriptif digunakan untuk menggambarkan fenomena sebagaimana adanya, dengan mengandalkan fakta-fakta di lapangan sebagai dasar analisis. Pendekatan kualitatif dalam penelitian ini menekankan pada pemahaman yang menyeluruh terhadap permasalahan sosial yang dihadapi oleh individu atau kelompok, dengan penyajian data secara deskriptif. Data dalam penelitian kualitatif lebih mengedepankan kemampuan peneliti dalam menangkap makna serta menginterpretasikan realitas sosial yang terjadi di lingkungan penelitian (Waruwu, 2024).

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah menganalisis penerapan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan Desa Bulutellue, Kabupaten Sinjai dengan memperhatikan aspek akuntabilitas keuangan secara menyeluruh, kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku, dan pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan Dana Desa. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai dampak digitalisasi keuangan desa terhadap peningkatan akuntabilitas Desa Bulutellue, serta merekomendasikan strategi yang dapat diadopsi untuk mengoptimalkan penggunaan SISKEUDES dalam pengelolaan keuangan desa yang lebih baik, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

C. Situs dan Waktu Penelitian

1. Situs Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Bulutellue Kabupaten Sinjai, yang diketahui menerima Dana Desa yang cukup besar yaitu Rp943.445.000 pada tahun anggaran 2025 (DJPK Kemenkeu, 2025). Besarnya alokasi dana tersebut menunjukkan pentingnya pengelolaan keuangan yang akuntabel, transparan, dan sesuai regulasi. Oleh karena itu, Desa Bulutellue menjadi lokasi yang tepat untuk mengkaji secara mendalam penerapan aplikasi SISKEUDES dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan desa melalui pendekatan kualitatif.

2. Waktu Penelitian

Pelaksanaan penelitian berlangsung selama dua bulan yaitu dari tanggal 09 April s/d 09 Juni 2025, dengan lokasi penelitian berada di Kantor Desa Bulutellue, Kabupaten Sinjai.

D. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini memakai jenis dan sumber data yang disesuaikan dengan kebutuhan serta tujuan yang ingin dicapai. Secara umum, data penelitian terbagi menjadi dua jenis utama, yang terdiri dari data primer dan data sekunder:

1. Data Primer

Data primer diperoleh langsung dari sumber pertama melalui proses pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti sendiri. Data ini umumnya diperoleh langsung dari informan atau objek yang diteliti. Metode pengumpulan data primer dalam penelitian ini meliputi wawancara dan observasi.

2. Data Sekunder

Informasi dalam penelitian ini berasal dari data yang telah tersedia sebelumnya dan diperoleh dari pihak lain, baik dalam bentuk dokumen resmi maupun hasil pencatatan administratif desa. Data ini digunakan untuk memperkuat dan melengkapi data primer yang diperoleh melalui wawancara dan observasi langsung.

E. Informan Penelitian

Penentuan informan penelitian dilakukan melalui purposive sampling, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memiliki pemahaman, pengalaman, dan peran langsung pada pengelolaan keuangan desa melalui aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES), digunakan untuk memilih informan dalam penelitian ini. Informan dipilih karena dinilai mampu memberikan informasi yang relevan terkait penerapan SISKEUDES dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan serta kesesuaianya dengan peraturan yang berlaku, khususnya Permendagri No. 20 Tahun 2018.

Penelitian ini awalnya dirancang dengan tiga orang informan, yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Kaur Keuangan Desa Bulutellue. Namun, pada saat pengumpulan data berlangsung, hanya dua informan yang dapat ditemui dan diwawancara secara langsung, yaitu Sekretaris Desa dan Kaur Keuangan. Kepala Desa tidak dapat ditemui karena adanya kesibukan pada waktu pelaksanaan wawancara. Oleh karena itu, analisis data dalam penelitian ini mengacu pada hasil wawancara dua informan utama yang terlibat aktif dalam operasional aplikasi SISKEUDES di tingkat

desa. Berikut pada Tabel 3.1 dicantumkan mengenai informan yang digunakan pada penelitian ini.

Tabel 3.1 Informan Penelitian

No.	INFORMAN	JABATAN	KETERANGAN
1.	Informan 1	Kepala Desa	Tidak dapat ditemui (kesibukan)
2.	Informan 2	Sekretaris Desa	Ditemui dan diwawancara
3.	Informan 3	Kaur Keuangan	Ditemui dan diwawancara

F. Teknik Pengambilan Data

Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif merupakan tahap utama karena kualitas dan kedalaman data sangat memengaruhi validitas temuan. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulatif, yaitu dengan memanfaatkan berbagai sumber informasi dan metode seperti wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi, guna memperoleh data yang akurat, mendalam, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan keabsahan temuan dengan cara membandingkan dan mengonfirmasi data dari berbagai perspektif (Nurfajriani *et al.*, 2024).

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi:

1. Wawancara; dilakukan secara terstruktur menggunakan pedoman wawancara yang disusun berdasarkan aspek indikator akuntabilitas keuangan desa dijelaskan pada tabel 2.1 pada Bab II. Informan yang diwawancara adalah Sekretaris Desa dan Kaur Keuangan, yang berperan aktif dalam pengelolaan keuangan desa menggunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES). Teknik ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang akurat dan relevan sesuai dengan indikator penelitian, terutama yang berkaitan dengan akuntabilitas

keuangan desa, berdasarkan pengalaman langsung para informan dalam menerapkan SISKEUDES.

2. Observasi; dilakukan secara partisipatif pasif, yaitu peneliti hadir secara langsung di Kantor Desa Bulutellue untuk mengamati praktik penggunaan aplikasi SISKEUDES, tanpa ikut terlibat dalam kegiatan administratif. Observasi difokuskan pada aspek teknis penerapan SISKEUDES yaitu. Perencanaan, pelaksanaan, Penatausahaan, pelaporan, dan Pertanggungjawaban berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018. Lembar observasi yang dibuat sesuai dengan aspek dan indikator peraturan tersebut digunakan untuk mencatat observasi.

Tabel 3.2 Aspek dan Indikator Penerapan Aplikasi SISKEUDES PERMENDAGRI No.20 Tahun 2018

No.	Aspek	Indikator
1.	Perencanaan Anggaran	Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dalam SISKEUDES
		Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) secara sistematis.
2.	Pelaksanaan Anggaran	Pengelolaan penerimaan dan pengeluaran keuangan desa secara digital
		Penatausahaan kas desa melalui aplikasi.
3.	Penatausahaan Anggaran	Pencatatan transaksi keuangan sesuai kode rekening yang berlaku
		Penggunaan bukti transaksi elektronik dalam pelaporan keuangan.
4.	Pelaporan	Penyusunan laporan realisasi APBDes secara otomatis;
5.	Pertanggungjawaban	Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban tepat waktu.

3. Dokumentasi; dilakukan dengan mengumpulkan dokumen administratif dan visual yang relevan dengan proses pengelolaan

keuangan desa. Dokumentasi ini digunakan sebagai bukti pendukung yang menguatkan hasil wawancara dan observasi, serta memberikan verifikasi terhadap pelaksanaan SISKEUDES dan prinsip akuntabilitas.

G. Metode Analisis Data

Penelitian ini menerapkan model analisis data interaktif yang dikembangkan oleh Miles & Huberman sebagai pendekatan utama dalam mengelola dan menafsirkan data kualitatif. Model ini digunakan untuk menelusuri makna yang tersembunyi dalam data penelitian secara sistematis dan mendalam. Tujuan utama dari proses ini adalah memperoleh temuan yang bersifat mendalam, membangun pemahaman yang utuh terhadap fenomena yang dikaji, serta menjawab pertanyaan atau fokus utama dalam penelitian (Qomaruddin & Sa'diyah, 2024). Adapun tiga tahapan utama dalam model ini, yaitu:

1. Reduksi Data

Untuk memudahkan peneliti menemukan pola, tema, dan makna yang signifikan, langkah ini melibatkan pengelompokan, pemilihan, dan penyederhanaan data yang relevan dengan fokus penelitian. Proses reduksi data ini dipengaruhi oleh kerangka konseptual yang digunakan, yaitu aspek akuntabilitas dan SISKEUDES sesuai regulasi Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Selanjutnya, arah proses penyaringan data dipengaruhi oleh metode pengumpulan data seperti pemeriksaan dokumen, wawancara mendalam, dan observasi langsung (Rijali, 2019).

2. Penyajian Data

Tahap ini mencakup penyusunan dan pengorganisasian data yang telah direduksi ke dalam format cerita (narasi), kutipan serta tabel, agar mempermudah peneliti dalam mengenali tren, korelasi, dan pola yang muncul dari lokasi penelitian. Data disajikan secara tematik berdasarkan aspek penerapan SISKEUDES dan akuntabilitas keuangan. Teknik penyajian ini memudahkan peneliti dalam menilai keterkaitan antara temuan dan tujuan penelitian, serta memfasilitasi proses interpretasi data secara lebih mendalam dan akurat (Rijali, 2019).

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, yang dilakukan secara induktif berdasarkan pola-pola, tema, dan keterkaitan temuan dari hasil wawancara, observasi, serta dokumentasi. Kesimpulan awal bersifat sementara dan terbuka terhadap revisi, namun akan berkembang menjadi lebih tajam dan mendalam seiring berjalannya proses penelitian. Dalam konteks penelitian ini, penarikan kesimpulan diarahkan untuk menjawab rumusan masalah mengenai penerapan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan di Desa Bulutellue. Untuk menjamin keabsahan data, peneliti melakukan verifikasi melalui triangulasi sumber, peninjauan ulang terhadap catatan lapangan, dan diskusi dengan rekan sejawat guna membangun kesepakatan intersubjektif (Rijali, 2019).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Letak Geografis Desa Bulutellue Kabupaten Sinjai

Desa Bulutellue merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan. Desa ini berjarak sekitar 30 km dari pusat pemerintahan Kabupaten Sinjai. Pembentukan Desa Bulutellue bersamaan dengan pembentukan kecamatan Bulupoddo di Kabupaten Sinjai. Adapun desa-desa yang berbatasan langsung dengan desa Bulutellue diantaranya:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Duampuanue
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Lamatti Riattang
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Sinjai Tengah
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Tompobulu



Gambar 4.1 Peta Letak Geografis Desa Bulutellue

Berdasarkan Gambar 4.1, dapat dilihat dengan jelas batas-batas wilayah antar dusun yang terdapat di Desa Bulutellue. Pembagian wilayah ini menjadi dasar dalam pengelompokan administratif serta pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat dusun. Secara geografis, wilayah Desa Bulutellue berada di kawasan pegunungan dengan topografi yang didominasi oleh perbukitan dan dataran tinggi. Ketinggian wilayah desa ini berkisar antara 200 hingga 500 meter di atas permukaan laut, menjadikannya daerah yang memiliki iklim sejuk dan cocok untuk kegiatan pertanian. Jenis tanah di Desa Bulutellue umumnya tergolong subur dengan komposisi tanah lempung dan latosol yang baik untuk berbagai jenis tanaman. Luas wilayah Desa Bulutellue mencapai 1.830,34 Ha. yang dimanfaatkan untuk berbagai keperluan seperti lahan persawahan, perkebunan, pemukiman warga, dan sebagian kecil berupa kawasan hutan. Potensi sumber daya alam yang dimiliki desa ini cukup melimpah, di antaranya terdapat beberapa sumber mata air yang tersebar di berbagai dusun, sungai kecil yang mengairi sawah, serta lahan pertanian dan perkebunan yang menghasilkan komoditas utama seperti padi, jagung, sayur-mayur, dan tanaman hortikultura lainnya. Kondisi geografis dan kekayaan sumber daya alam ini mendukung aktivitas ekonomi masyarakat yang mayoritas bergerak di sektor pertanian dan perkebunan. Adapun nama-nama kepala desa yang pernah menjabat dan yang menjabat sekarang adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1 Daftar Nama Kepala Desa Bulutellue

NO	NAMA KEPALA DESA	MASA JABATAN
1.	A. Hasanuddin. H	1985-2007
2.	A. Sudirman. H	2007-2014
3.	Iwan, SE	Plt. Kades 2014-2015
4.	Syamsuddin	Plt. Kades 2015-2015
5.	A. Sudirman	2015-2021
6.	Muhammad Basri, S. Sos, M. Si	Pj. Kades 2021-2022
7.	Syamsudin S, Sos	Kades Sekarang

2. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Bulutellue Kabupaten

Sinjai

Gambaran yang jelas mengenai kondisi sosial Ekonomi masyarakat Desa Bulutellue dapat dilihat melalui data demografis desa yang mencakup jumlah penduduk, tingkat pendidikan, mata pencaharian, serta struktur dusun yang ada di wilayah desa. Data demografis ini menjadi dasar dalam memahami potensi sumber daya manusia yang dimiliki desa, sekaligus menjadi latar belakang dalam menilai penerapan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam pengelolaan keuangan desa. Secara administratif, Desa Bulutellue terdiri dari 6 (enam) dusun, yaitu:

a. Dusun Samaenre

b. Dusun Satengnga

c. Dusun Bulu-Bulu

d. Dusun Bululohe

e. Dusun Tanah Tekko

f. Dusun Alehanuae

Berikut disajikan data kondisi demografis Desa Bulutellue berdasarkan profil desa tahun 2025.

Tabel 4.2 Data Kondisi Demografis Desa Bulutellue 2025

No.	Keterangan	Jumlah
1.	Jumlah Penduduk	5.386
2.	Laki-laki	2.671
3.	Perempuan	2.715
4.	Jumlah Kepala Keluarga	1.538
5.	Suku Majoritas	Bugis
6.	Agama Majoritas	Islam
7.	Jumlah Dusun	7

(Sumber: Website Resmi Desa Bulutellue, 2025)

Berdasarkan Tabel 4.2 kondisi demografis Desa Bulutellue pada tahun 2025. Berdasarkan data tersebut, jumlah penduduk desa mencapai 5.386 jiwa, dengan komposisi 2.671 laki-laki dan 2.715 perempuan. Jumlah kepala keluarga tercatat sebanyak 1.538 KK, yang menunjukkan struktur sosial berbasis keluarga masih kuat di desa ini. Dari sisi etnisitas, penduduk mayoritas merupakan suku Bugis, dan seluruhnya menganut agama Islam. Secara administratif, desa terbagi dalam 7 dusun, yang menunjukkan adanya pembagian wilayah kerja pemerintahan desa untuk mendukung efisiensi pelayanan publik. Informasi demografis ini penting sebagai dasar untuk memahami struktur sosial masyarakat, potensi SDM, serta sebagai acuan dalam perencanaan pembangunan desa.

Tabel 4.3 Tingkat Pendidikan Terakhir

No.	Keterangan	Jumlah
8.	Lulusan SD	210
9.	Lulusan SMP	168
10.	Lulusan SMA	260
11.	Diploma III	45
12	Strata Satu (S-1)	320

(Sumber: Website Resmi Desa Bulutellue, 2025)

Selanjutnya Tabel 4.3 menampilkan tingkat pendidikan terakhir penduduk Desa Bulutellue. Tercatat 210 orang merupakan lulusan SD, 168 lulusan SMP, 260 lulusan SMA, 45 lulusan Diploma III, dan 320 orang telah menyelesaikan pendidikan hingga jenjang Strata Satu (S-1). Data ini menunjukkan bahwa meskipun sebagian masyarakat masih berpendidikan rendah, terdapat proporsi penduduk yang telah menempuh pendidikan tinggi. Tingginya jumlah lulusan S-1 menunjukkan adanya potensi sumber daya manusia yang dapat diberdayakan, khususnya dalam mendukung penerapan sistem teknologi informasi, seperti aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam pengelolaan keuangan desa secara modern dan akuntabel.

Tabel 4.4 Mata Pencaharian Utama

No.	Keterangan	Jumlah
13	Petani/Pekebun	1466
14.	Wiraswasta	190
15.	Guru Swasta	16
16.	PNS	48
17.	Sopir	10
18.	Perangkat Desa	16
19.	TNI/polisi	4

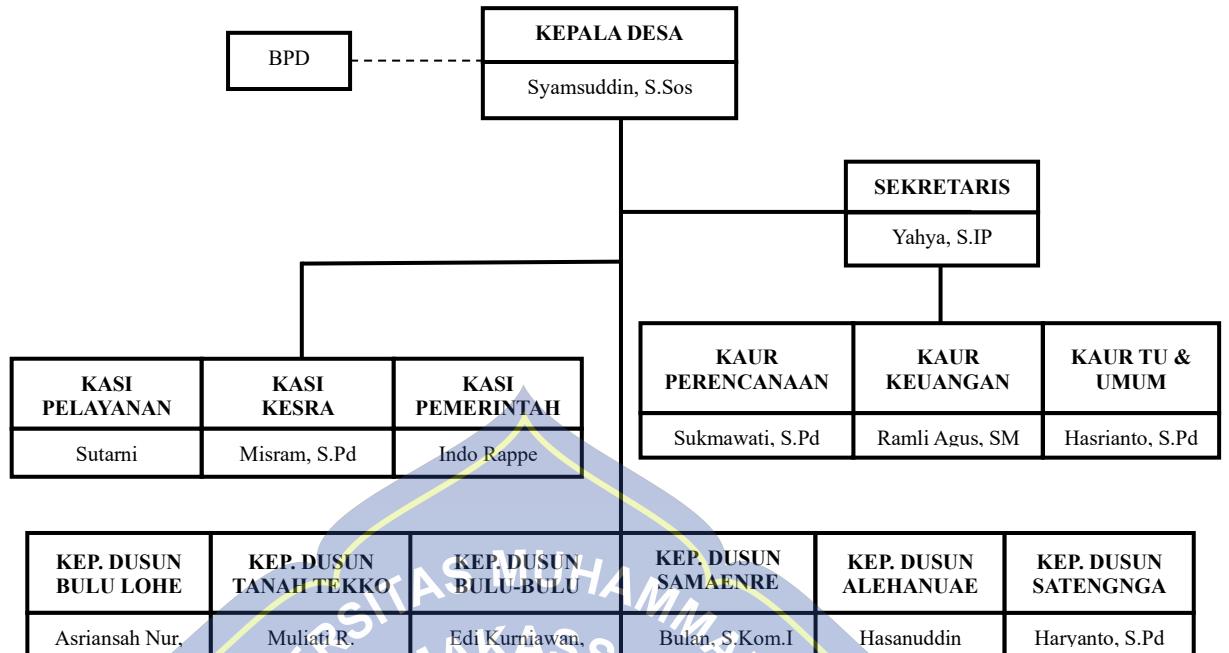
(Sumber: Website Resmi Desa Bulutellue, 2025)

Adapun Tabel 4.4 menggambarkan kondisi ekonomi masyarakat berdasarkan mata pencaharian utama. Sebagian besar penduduk bekerja sebagai petani atau pekebun, yakni sebanyak 1.466 orang, yang menandakan bahwa sektor pertanian merupakan tulang punggung ekonomi desa. Selain itu, terdapat 190 orang wiraswasta, 48 PNS, serta jumlah kecil lainnya seperti guru swasta (16 orang), perangkat desa (16 orang), sopir (10 orang), dan TNI/Polisi (4 orang). Komposisi mata pencaharian ini menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat bergantung pada sektor informal dan agraris. Oleh karena itu, pengelolaan Dana Desa yang baik sangat penting untuk mendukung sektor pertanian serta pemberdayaan ekonomi masyarakat desa secara berkelanjutan.

3. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Bulutellue Kabupaten

Sinjai

Struktur organisasi merupakan kerangka formal yang menggambarkan bagaimana tugas-tugas dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan dalam suatu organisasi. Struktur ini menjelaskan hubungan antara unit-unit kerja dan individu, serta wewenang, tanggung jawab, dan alur komunikasi dalam organisasi tersebut. Struktur organisasi tersebut disusun untuk menjalankan fungsi pemerintahan desa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta peraturan pelaksanaannya. Pemerintahan desa dipimpin oleh seorang Kepala Desa yang dibantu oleh perangkat desa, yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Urusan (Kaur), Kepala Seksi (Kasi), dan Kepala Dusun.



Gambar 4.2 Struktur organisasi Pemerintah Desa Bulutellue

Berdasarkan struktur organisasi pada gambar 4.2, tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat desa Bulutellue adalah sebagai berikut:

- Kepala Desa: Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa secara umum, menetapkan kebijakan, mengelola keuangan dan aset desa, serta membina kehidupan masyarakat desa agar tercapai pembangunan yang merata dan berkelanjutan.
- Sekretaris Desa: Membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan. Bertugas menyusun laporan, pengarsipan, surat-menjurut, serta mengelola data dan informasi desa.
- Kepala Urusan (KAUR):

- 1) Kaur Perencanaan: Bertanggung jawab atas perencanaan pembangunan desa, mulai dari pendataan kebutuhan hingga penyusunan RKPDes dan dokumen perencanaan lainnya.
 - 2) Kaur Keuangan: Mengelola keuangan desa, menyusun laporan keuangan, dan mengoperasikan sistem keuangan desa berbasis aplikasi seperti SISKEUDES.
 - 3) Kaur Tata Usaha dan Umum: Menangani administrasi umum, urusan perlengkapan, kepegawaian, serta dokumentasi kegiatan desa.
- d. Kepala Seksi (KASI):
- 1) Kasi Pemerintahan: Menangani administrasi kependudukan, pertanahan, dan ketertiban umum di wilayah desa.
 - 2) Kasi Kesejahteraan (Kesra): Bertugas dalam bidang sosial, kesehatan, pendidikan, dan bantuan masyarakat.
 - e. Kasi Pelayanan: Memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat dalam berbagai urusan administrasi, surat menyurat, dan informasi publik.
 - f. Kepala Dusun: Setiap dusun dipimpin oleh seorang Kepala Dusun yang menjadi perpanjangan tangan pemerintah desa di wilayahnya masing-masing. Tugas utamanya adalah menyampaikan program pemerintah desa kepada warga dan menghimpun aspirasi masyarakat dari bawah.
 - g. Badan Permusyawaratan Desa (BPD): Sebagai mitra strategis pemerintah desa, BPD berfungsi menetapkan peraturan desa

bersama kepala desa dan melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah desa.

4. Gambaran Penerapan Aplikasi SISKEUDES di Desa Bulutellue Kabupaten Sinjai

Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) merupakan sistem berbasis komputer yang dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri. Di Desa Bulutellue, penerapan aplikasi SISKEUDES telah dimulai sejak tahun 2016. Implementasi awal ini dilaksanakan pada masa kepemimpinan Kepala Desa sebelumnya, Bapak A. Sudirman. Tujuan utama dari penggunaan sistem ini adalah untuk memperbaiki tata kelola keuangan desa yang sebelumnya masih bersifat manual, serta sebagai bentuk tanggapan terhadap kebutuhan akan sistem yang mampu mencatat seluruh transaksi desa secara sistematis dan terdokumentasi dengan baik. Sebagaimana disampaikan oleh informan YA, selaku Sekretaris Desa Bulutellue dalam wawancara:

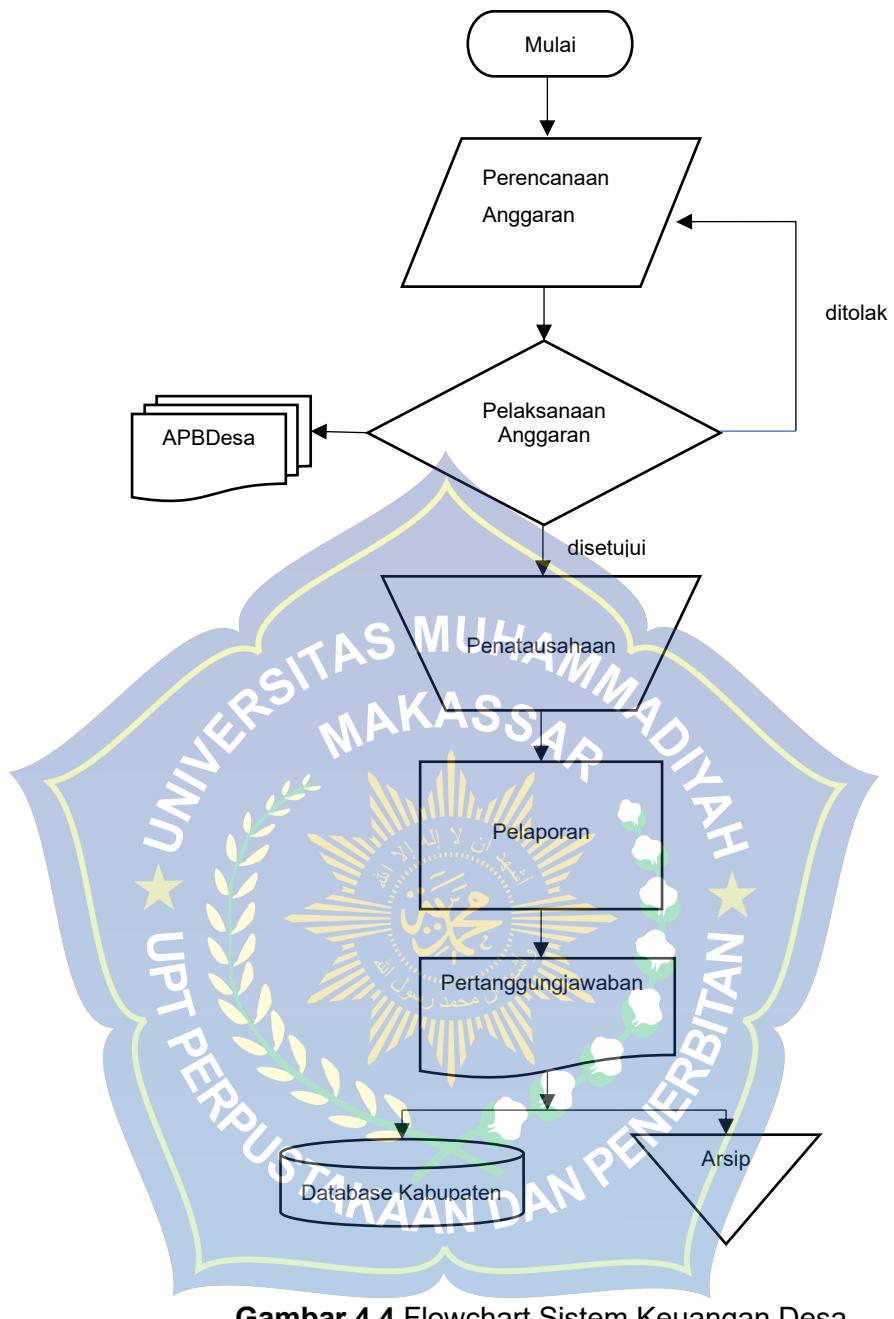
“Kami selalu berpedoman pada regulasi yang berlaku, terutama Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Untuk mendukung penerapannya, kami telah menggunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa sejak tahun 2016, tepatnya pada masa kepemimpinan Bapak A. Sudirman. Setiap ada kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa, kami selalu mengadakan rapat dan berkoordinasi terlebih dahulu dengan pendamping desa agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaannya.” (Wawancara YA, 15 April 2025)

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan pada tanggal 14 April 2025 di Kantor Desa Bulutellue, seluruh proses pencatatan keuangan desa telah dilakukan secara digital menggunakan aplikasi

Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) versi 2.0.7. Versi ini merupakan pembaruan terbaru yang memiliki fitur lebih stabil, lengkap, dan mudah digunakan dibandingkan versi sebelumnya. Aplikasi ini dirancang untuk mengintegrasikan seluruh tahapan pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pembu, pelaporan hingga pertanggungjawaban. SISKEUDES versi 2.0.7 juga dilengkapi dengan validasi otomatis pada setiap input transaksi, sehingga meminimalisir potensi kesalahan data. Selain itu, format pelaporan dalam aplikasi telah disesuaikan dengan standar akuntansi pemerintahan desa dan ketentuan dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

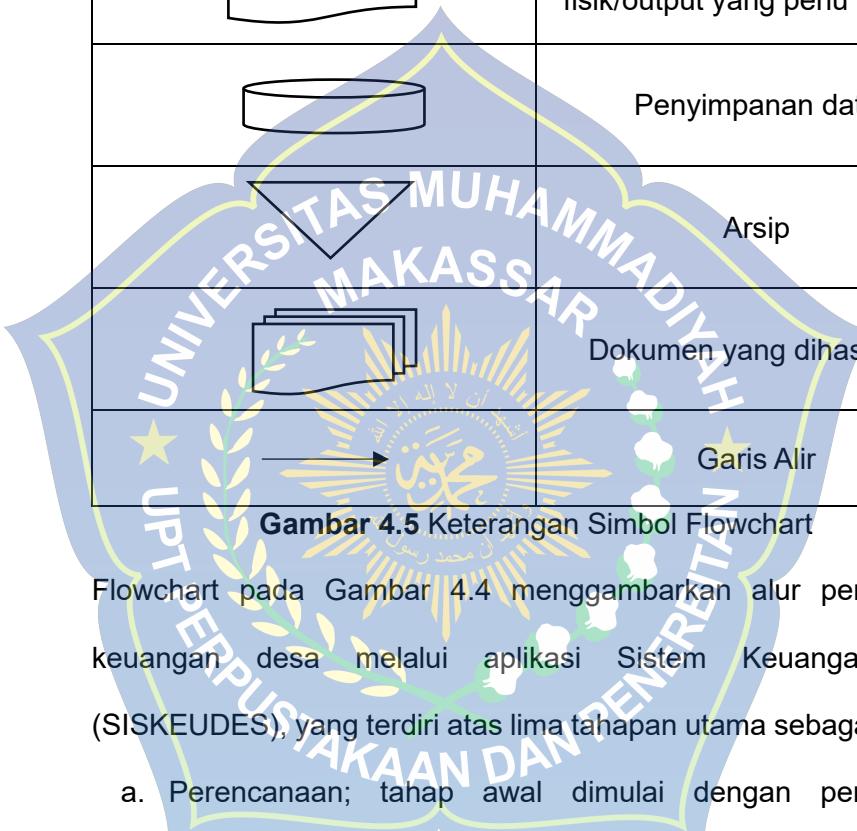


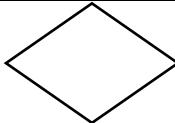
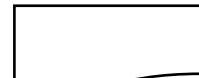
Gambar 4.3 Tampilan halaman awal SISKEUDES Versi 2.0.7



Gambar 4.4 Flowchart Sistem Keuangan Desa

Simbol	Keterangan
[oval]	Awal/akhir suatu program
[trapezoid]	Proses input/output tanpa peralatan



	Kondisi tertentu yang dapat menghasilkan dua kemungkinan jawaban (ditolak/disetujui)
	Proses yang tidak dilakukan oleh komputer
	Proses dilakukan di komputer
	Input berasal dari dokumen fisik/output yang perlu dicetak
	Penyimpanan data
	Arsip
	Dokumen yang dihasilkan
	Garis Alir

Gambar 4.5 Keterangan Simbol Flowchart

Flowchart pada Gambar 4.4 menggambarkan alur pengelolaan keuangan desa melalui aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES), yang terdiri atas lima tahapan utama sebagai berikut:

- Perencanaan; tahap awal dimulai dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa), yang memuat program dan kegiatan prioritas desa. Setelah ditetapkan, dokumen RPJMDesa dan RKPDesa diinput ke dalam aplikasi Siskeudes melalui menu Perencanaan. Proses

- ini menghasilkan dokumen resmi perencanaan desa yang menjadi acuan dalam pengelolaan keuangan selanjutnya.
- b. Pelaksanaan anggaran; diawali dengan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Data anggaran sementara dimasukkan melalui menu Penganggaran di Siskeudes. Setelah disusun, APBDesa disampaikan kepada Bupati untuk dievaluasi. Apabila disetujui, APBDesa diposting ulang oleh Pemerintah Kabupaten ke dalam sistem Siskeudes sebagai dasar pelaksanaan kegiatan anggaran di desa.
 - c. Penatausahaan; setelah dana APBDesa dicairkan, pemerintah desa melaksanakan kegiatan sesuai anggaran yang telah disahkan. Seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran kas dicatat secara berkala melalui menu Administrasi di Siskeudes, guna memastikan administrasi keuangan desa tertata rapi, akurat, dan siap digunakan untuk penyusunan laporan keuangan.
 - d. Pelaporan; berdasarkan data penatausahaan, pemerintah desa menyusun laporan realisasi anggaran melalui menu Pembukuan di Siskeudes. Laporan ini memuat seluruh transaksi keuangan desa yang telah dilakukan dan menjadi dasar evaluasi penggunaan anggaran.
 - e. Pertanggungjawaban; setelah laporan realisasi anggaran selesai, data keuangan desa dapat diakses langsung oleh Pemerintah Kabupaten melalui server yang terintegrasi dengan Siskeudes. Selanjutnya, pemerintah desa mengarsipkan dan

mencetak laporan keuangan sebagai dokumen pertanggungjawaban resmi atas penggunaan APBDesa.

Seluruh data tersimpan otomatis dalam database Siskeudes, baik di komputer desa maupun tersinkron dengan server kabupaten, sehingga menjamin keamanan data dan memudahkan proses evaluasi.

B. Hasil Penelitian

Pengumpulan data dilakukan pada tanggal 9 April hingga 9 Juni 2025 di Kantor Desa Bulutellue, Kabupaten Sinjai. Berikut ini disajikan hasil penelitian yang diklasifikasikan berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan.

1. Data Informan

Data hasil penelitian ini diperoleh dari dua orang informan utama, yaitu Sekretaris Desa dan Kaur Keuangan Desa. Sementara itu, Kepala Desa yang semula direncanakan sebagai informan tidak dapat diwawancara karena kesibukan dalam menjalankan tugas kedinasan. Oleh karena itu, penyajian data berikut difokuskan pada hasil wawancara dengan kedua informan tersebut yang memiliki peran langsung dalam pengelolaan keuangan desa melalui penggunaan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES).

Tabel 4.5 Coding key informan

No.	INFORMAN	KODE	JABATAN
1.	Yahya	YA	Sekretaris Desa
2.	Ramli Agus	RA	Kaur Keuangan Desa

2. Penerapan Aplikasi SISKEUDES di Desa Bulutellue Kabupaten

Sinjai Berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018

Penilaian terhadap penerapan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) di Desa Bulutellue, Kabupaten Sinjai dilakukan melalui observasi langsung di lokasi penelitian, yaitu Kantor Desa Bulutellue dan diperkuat dengan hasil wawancara bersama informan kunci, yakni Sekretaris Desa dan Kaur Keuangan. Fokus penelitian pada lembar observasi mengacu pada lima aspek utama pengelolaan keuangan desa sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Masing-masing aspek dievaluasi berdasarkan indikator pelaksanaan yang teramat di lapangan dan dikonfirmasi melalui data kualitatif. Uraian hasil penelitian berikut disusun berdasarkan lima aspek pengelolaan keuangan menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018, yaitu:

a. **Perencanaan Anggaran**

Perencanaan anggaran merupakan salah satu tahapan awal dalam siklus pengelolaan keuangan desa yang sangat menentukan arah dan keberhasilan pembangunan desa. Mengacu pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 20, proses ini diawali dengan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) yang menjadi dasar dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Proses perencanaan wajib dilaksanakan secara partisipatif dan sistematis, dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan di desa. Berdasarkan hasil observasi di Kantor Desa Bulutellue pada tanggal 14 April 2025, diketahui bahwa penyusunan RKPDes telah dilakukan melalui musyawarah desa

yang melibatkan perangkat desa dan masyarakat. Hasil musyawarah tersebut terdokumentasi dalam bentuk foto kegiatan sebagai bukti partisipasi publik dalam perencanaan. Selanjutnya, dokumen RKPDes diinput ke dalam aplikasi SISKEUDES versi 2.0.7 oleh Kaur Keuangan, dengan memasukkan daftar kegiatan yang telah direncanakan. Proses berlanjut pada penyusunan APBDes secara sistematis melalui aplikasi yang sama. Tahapan ini dimulai dari pengalokasian anggaran berdasarkan kegiatan yang telah disepakati, kemudian dilakukan verifikasi oleh Sekretaris Desa, dan setelah dinyatakan sesuai, disahkan oleh Kepala Desa.

Hasil wawancara dengan informan YA selaku Sekretaris Desa Bulutellue menguatkan bahwa perencanaan anggaran dilakukan secara bertahap dan terarah, sebagaimana dinyatakan sebagai berikut.

“Perencanaan kegiatan dilakukan secara rinci dan bertahap. Biasanya kami mengadakan rapat terlebih dahulu agar penganggaran lebih terarah. Semua dirancang sedemikian rupa agar dana desa benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.”
(Wawancara YA, 15 April 2025)

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa proses perencanaan di Desa Bulutellue tidak dilakukan secara mendadak, melainkan melalui tahapan yang sistematis, yang didasarkan pada usulan masyarakat, hasil musyawarah, dan arahan kebijakan desa. Proses ini juga memperlihatkan bahwa perangkat desa telah memanfaatkan teknologi secara optimal melalui penggunaan aplikasi SISKEUDES dalam setiap tahapan perencanaan anggaran.

b. Pelaksanaan Anggaran

Tahap pelaksanaan anggaran merupakan proses realisasi dari rencana kegiatan yang telah disusun dalam dokumen APBDes.

Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, pelaksanaan anggaran desa harus memenuhi prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas. Pengelolaan penerimaan dan pengeluaran dilakukan oleh perangkat desa sesuai tugas dan kewenangan yang telah diatur dalam struktur organisasi pemerintah desa. Hasil observasi 14 April 2025 menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan keuangan di Desa Bulutellue telah dilakukan secara digital melalui aplikasi SISKEUDES versi 2.0.7. Seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran desa diinput secara digital menggunakan aplikasi SISKEUDES versi 2.0.7. Kode rekening kegiatan muncul secara otomatis dalam sistem dan digunakan sebagai dasar pencatatan penerimaan dan pengeluaran desa.

Proses pencatatan kas masuk dan kas keluar dilakukan melalui menu penatausahaan pada aplikasi. Berdasarkan pengamatan langsung, operator terlihat memverifikasi dan mencocokkan data transaksi dengan bukti fisik seperti Surat Permintaan Pembayaran (SPP), slip transfer, dan kuitansi, sebelum data dimasukkan ke dalam sistem. Tahapan ini memastikan bahwa setiap transaksi yang dilakukan telah melalui verifikasi administrasi yang benar.



Gambar 4.6 Rincian SPP Pelaksanaan kegiatan (SISKEUDES)

Sistem pelaksanaan ini berjalan secara sistematis dan berjenjang, dimana permintaan pembayaran disusun oleh Kaur Keuangan, kemudian diverifikasi oleh Sekretaris Desa, dan disahkan oleh Kepala Desa. Setiap transaksi dibuktikan dengan dokumen fisik yang sah sebagai bentuk pertanggungjawaban. Hasil wawancara dengan informan RA selaku Kaur Keuangan Desa Bulutellue mengonfirmasi bahwa pelaksanaan anggaran dilakukan dengan cermat dan sesuai prosedur. Sebagaimana dijelaskan sebagai berikut.

“Setiap kali terdapat pengeluaran atau penerimaan, saya selalu menyiapkan bukti berupa nota pembelian, kuitansi, dan tanda tangan penerima. Seluruh dokumen tersebut menjadi dasar untuk diinput ke dalam aplikasi Sistem Keuangan Desa sesuai dengan kode rekening yang berlaku. Dengan begitu, dokumentasi kami lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan.” (Wawancara RA, 15 April 2025)

Pernyataan tersebut memperkuat temuan bahwa tahapan pelaksanaan anggaran dilakukan secara cermat dan sesuai prosedur yang berlaku. Pemanfaatan aplikasi SISKEUDES dalam proses ini berkontribusi langsung terhadap peningkatan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

c. Penatausahaan Anggaran

Penatausahaan anggaran merupakan tahap yang mencakup pencatatan seluruh transaksi keuangan desa secara sistematis, akurat, dan terdokumentasi. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan pada tanggal 14 April 2025 di Kantor Desa Bulutellue, penatausahaan keuangan telah dilaksanakan melalui aplikasi SISKEUDES versi 2.0.7. Pencatatan dilakukan secara digital, dengan memanfaatkan fitur-fitur penatausahaan dalam aplikasi. Operator memilih kode rekening kegiatan yang muncul otomatis dalam sistem untuk mencatat transaksi sesuai jenis belanja desa. Kaur keuangan menginput transaksi berdasarkan bukti fisik seperti Surat Permintaan Pembayaran (SPP), slip transfer, dan kuitansi. Selain bukti fisik, aplikasi juga menghasilkan dokumen elektronik seperti SPP digital dan bukti kas masuk/keluar, yang digunakan untuk pelaporan dan pertanggungjawaban. Semua proses ini direkam secara otomatis dalam sistem SISKEUDES melalui Buku Kas Umum, Buku Pembantu Kas Kegiatan, serta Buku Kas Pembantu Pajak.

Dokumentasi dari aplikasi memperlihatkan bahwa semua transaksi yang telah dicatat ditampilkan dalam format buku kas secara elektronik. Format digital yang dihasilkan menjadi dasar dalam pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Tampilan buku kas elektronik tersebut dapat dilihat dalam Gambar 4.7 dan Gambar 4.8.

Gambar 4.7 Buku Kas Umum Desa Bulutellue TA 2025 (SISKEUDES)

Gambar 4.8 Buku Kas Pembantu Kegiatan Desa Bulutellue TA 2025 (SISKEUDES)

Temuan observasi tersebut diperkuat dengan pernyataan informan RA selaku Kaur Keuangan Desa Bulutellue dalam wawancara berikut:

“Saya selalu memastikan bahwa setiap input data telah sesuai dengan prosedur. Semua informasi harus lengkap, mulai dari kode rekening, jumlah dana, hingga keterangannya. Setelah data penerimaan desa diinput, baru dilanjutkan dengan penginputan belanja. Selanjutnya, data tersebut diserahkan untuk diverifikasi sebelum disahkan. Saat ini, seluruh proses telah dilakukan secara digital menggunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES)

versi 2.0.7, sehingga pengelolaan keuangan menjadi lebih tertib dan terorganisir.” (Wawancara RA, 15 April 2025)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa penatausahaan keuangan di Desa Bulutellue dilakukan secara berurutan dan terdokumentasi.

Setiap tahapan input data selalu didahului dengan verifikasi administratif untuk memastikan kesesuaian antara data dan bukti fisik. Setelah semua data diverifikasi, informasi tersebut diserahkan untuk pemeriksaan akhir sebelum disahkan menjadi dokumen resmi.

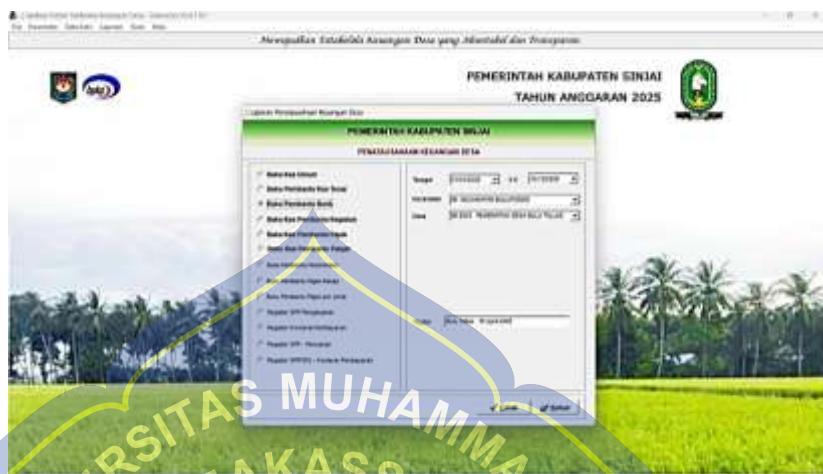
Penggunaan SISKEUDES versi terbaru turut meningkatkan efektivitas penatausahaan melalui digitalisasi dokumen dan transparansi sistem, yang memungkinkan pelacakan transaksi secara real-time. Praktik ini mencerminkan komitmen Pemerintah Desa Bulutellue dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang akuntabel, tertib, dan berbasis teknologi informasi.

d. Pelaporan

Pelaporan merupakan aspek penting dalam proses pengelolaan keuangan desa sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran. Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) versi 2.0.7 telah memberikan dukungan penuh dalam memenuhi ketentuan ini melalui fitur pelaporan otomatis.

Berdasarkan hasil observasi langsung di Kantor Desa Bulutellue tanggal 14 April 2025, diketahui bahwa laporan realisasi APBDes dapat ditampilkan secara otomatis dalam sistem SISKEUDES, lengkap dengan informasi mengenai persentase realisasi belanja, potongan pajak, serta detail kegiatan per bidang. Laporan ini dapat langsung dicetak dan digunakan sebagai dokumen resmi pelaporan

keuangan desa, setelah diverifikasi oleh perangkat desa yang berwenang. Berikut pada gambar 4.9 merupakan dokumentasi jenis-jenis laporan penatausahaan keuangan desa Bulutellue dari aplikasi SISKEUDES.



Gambar 4.9 Laporan Penatausahaan Keuangan Desa Bulutellue (SISKEUDES)

Temuan observasi tersebut diperkuat oleh pernyataan informan RA selaku Kaur Keuangan Desa Bulutellue, yang menjelaskan bahwa:

“Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) sudah menggunakan format baku. Jadi, jika data yang diinput telah benar, insya Allah sudah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan desa. Kami juga menyusun laporan pertanggungjawaban kegiatan dan keuangan. Sebelum laporan tersebut dikirim ke pihak kabupaten, terlebih dahulu dilakukan asistensi di tingkat kecamatan” (Wawancara RA, 15 April 2025)

Informan RA, selaku Kaur Keuangan Desa Bulutellue, menegaskan bahwa sistem pelaporan dalam SISKEUDES telah disesuaikan dengan format baku yang berlaku dalam standar akuntansi pemerintahan desa. Input data yang dilakukan secara benar akan menghasilkan laporan yang valid dan siap digunakan dalam proses

pertanggungjawaban. Prosedur pelaporan juga mencakup tahapan asistensi di tingkat kecamatan sebelum laporan dikirim ke kabupaten, sebagai bentuk kontrol kualitas administratif. Selain aspek administratif Keterbukaan informasi publik terkait hasil pelaporan juga telah diupayakan oleh pemerintah desa, melalui pemasangan baliho transparansi APBDes di depan Kantor Desa dan penyampaian informasi secara langsung saat musyawarah atau rapat desa.

Berdasarkan wawancara YA selaku Sekretaris Desa Bulutellue:

“Kami selalu menyiapkan laporan keuangan dalam bentuk baliho transparansi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang dipasang di depan kantor desa. Selain itu, laporan juga sering disampaikan secara langsung dalam forum rapat agar informasi lebih jelas dan mudah dipahami oleh masyarakat.” (Wawancara YA, 15 April 2025)

Hal ini menunjukkan bahwa pelaporan tidak hanya bersifat internal administratif, tetapi juga memenuhi prinsip keterbukaan kepada masyarakat sebagai bentuk akuntabilitas publik.

e. Pertanggungjawaban

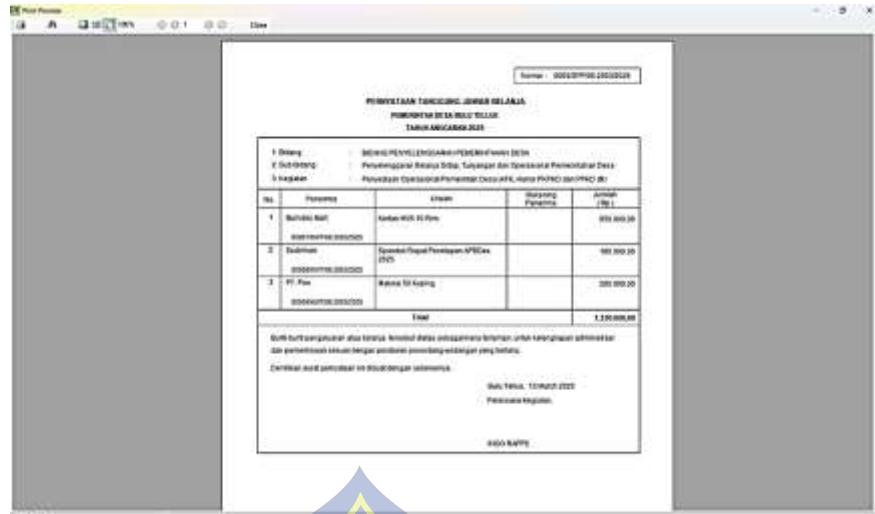
Pertanggungjawaban merupakan tahapan akhir dalam siklus pengelolaan keuangan desa yang berfungsi sebagai bentuk pelaporan resmi pemerintah desa atas pelaksanaan seluruh kegiatan anggaran selama satu tahun anggaran berjalan. Tahap ini menegaskan akuntabilitas penggunaan dana desa kepada pemerintah daerah dan masyarakat. Sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, laporan pertanggungjawaban wajib disusun secara tertib, lengkap, dan tepat waktu serta disampaikan kepada bupati/wali kota dan kepada masyarakat. Berdasarkan hasil

observasi di Kantor Desa Bulutellue tanggal 14 April 2025, laporan pertanggungjawaban keuangan desa disusun melalui output dari aplikasi SISKEUDES versi 2.0.7. Setelah dilakukan verifikasi internal oleh perangkat desa, laporan tersebut dikirim secara daring ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) serta Inspektorat Kabupaten Sinjai.

Proses ini menunjukkan adanya pemanfaatan teknologi informasi yang mempercepat pengiriman laporan dan mempermudah pemantauan serta evaluasi oleh instansi pengawas. Berikut ini adalah tampilan laporan tanda bukti pengeluaran uang dan pernyataan tanggung jawab belanja yang dihasilkan dari aplikasi SISKEUDES:



Gambar 4.10 Tanda Bukti Pengeluaran Uang (SISKEUDES)



Gambar 4.11 Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SISKEUDES)

Penyampaian laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat dilakukan melalui pemasangan baliho transparansi APBDes di depan Kantor Desa Bulutellue. Informasi anggaran dan realisasi belanja ditampilkan dalam format yang ringkas agar mudah dipahami oleh warga. Langkah ini mencerminkan komitmen pemerintah desa dalam menjaga keterbukaan informasi publik dan mendorong partisipasi warga dalam pengawasan keuangan desa. Temuan observasi ini diperkuat dengan pernyataan informan RA, selaku Kaur Keuangan Desa Bulutellue dalam wawancara:

“Laporan keuangan biasanya kami sampaikan terlebih dahulu dalam musyawarah desa agar masyarakat mengetahui secara langsung. Kami juga membuat baliho transparansi anggaran yang dipasang di depan kantor desa untuk memperjelas informasi. Sementara itu, laporan pertanggungjawaban dikirim secara online melalui aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES), sehingga lebih cepat diterima oleh dinas maupun inspektorat. Semua transaksi, baik penerimaan maupun pengeluaran, selalu disertai dengan bukti yang lengkap. Kami juga menyimpan dokumen dalam bentuk fisik maupun digital, sehingga apabila terjadi audit atau pemeriksaan, seluruh dokumen dapat langsung ditunjukkan.” (Wawancara RA, 15 April 2025)

Selain pelaporan digital, proses pertanggungjawaban juga didukung oleh dokumentasi fisik yang lengkap dan tersusun secara sistematis.

Seluruh transaksi keuangan, baik penerimaan maupun pengeluaran, wajib disertai bukti pendukung seperti nota pembelian, kuitansi, dan tanda tangan penerima. Dokumen-dokumen ini menjadi bagian penting dari arsip pelaporan desa serta menjadi referensi utama dalam proses audit. Kombinasi antara penggunaan teknologi informasi melalui aplikasi Siskeudes dan ketertiban administratif dalam bentuk fisik menunjukkan integritas serta kesiapan Desa Bulutellue dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan anggarannya secara transparan dan akuntabel. Hal ini juga memudahkan proses audit oleh instansi pengawas seperti Inspektorat dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD).

3. Penerapan Aplikasi SISKEUDES dalam Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan Desa Bulutellue Kabupaten Sinjai

Penerapan aplikasi SISKEUDES diharapkan dapat mendukung peningkatan akuntabilitas keuangan desa. Penelitian ini menganalisis tujuh aspek akuntabilitas, yaitu transparansi, kepatuhan, tanggung jawab, ketepatan, efisiensi, integritas, dan keterlibatan pemangku kepentingan. Setiap indikator dikaji berdasarkan hasil wawancara dengan informan kunci dan dilakukan di Kantor Desa Bulutellue. Uraian berikut memaparkan temuan pada masing-masing indikator tersebut.

a. Transparansi

Transparansi dalam pengelolaan keuangan desa merupakan prinsip keterbukaan kepada masyarakat dalam setiap tahapan

penggunaan anggaran. Pemerintah Desa Bulutellue Kabupaten Sinjai menunjukkan komitmennya terhadap transparansi dengan menyediakan informasi keuangan yang dapat diakses oleh masyarakat secara visual maupun verbal. Laporan keuangan desa disediakan dalam bentuk baliho yang dipasang di depan kantor desa agar mudah dilihat oleh masyarakat.

Pemasangan baliho transparansi APBDes tidak hanya dilakukan pada awal tahun, tetapi juga diumumkan kembali pada akhir tahun melalui musyawarah desa. Kegiatan ini bertujuan memberikan informasi pertanggungjawaban kepada masyarakat secara terbuka dan menyeluruh. Hal ini disampaikan informan RA, selaku Kaur Keuangan Desa Bulutellue dalam wawancara berikut:

“Kami menampilkan informasi keuangan desa dalam bentuk baliho transparansi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang dipasang di depan kantor desa agar masyarakat mudah mengakses dan mengetahui bagaimana anggaran desa digunakan. Selain itu, pada akhir tahun, informasi tersebut juga disampaikan kembali dalam forum musyawarah desa” (Wawancara RA, 15 April 2025).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa transparansi keuangan di Desa Bulutellue tidak hanya dilakukan secara internal, tetapi juga melibatkan masyarakat secara langsung melalui penyampaian informasi dalam bentuk visual dan forum tatap muka. Upaya ini memperkuat akuntabilitas publik dan membuka ruang bagi masyarakat untuk berperan dalam pengawasan pengelolaan keuangan desa.

b. Kepatuhan

Kepatuhan dalam pengelolaan keuangan desa mengacu pada pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan ketentuan hukum, khususnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pemerintah Desa Bulutellue, Kabupaten Sinjai menunjukkan komitmennya terhadap kepatuhan dengan memastikan bahwa setiap tahapan dalam pengelolaan anggaran diawali dengan proses perencanaan dan koordinasi yang melibatkan pendamping desa agar seluruh kegiatan tidak menyimpang dari ketentuan. Setiap pengambilan keputusan selalu berlandaskan pada aturan resmi yang berlaku, termasuk penggunaan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES).

Seluruh pengeluaran keuangan desa wajib mengacu pada dokumen APBDes yang telah disahkan. Semua belanja desa harus sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, dan bila ada perubahan peraturan, Kepala Desa atau Sekretaris akan segera menyampaikan kepada perangkat desa lainnya. Hal ini ditegaskan oleh informan RA, selaku Kaur Keuangan Desa Bulutellue:

“Kami selalu memastikan bahwa seluruh pengeluaran sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) serta peraturan yang berlaku. Apabila terdapat regulasi baru, biasanya segera diinformasikan oleh Sekretaris atau Kepala Desa untuk kemudian kami sesuaikan pelaksanaannya.” (Wawancara RA, 15 April 2025).

Pelaksanaan audit juga menjadi bagian penting dalam menjaga dan mengevaluasi kepatuhan pengelolaan keuangan desa. Pemerintah desa Bulutellue, Kabupaten Sinjai secara rutin melaksanakan audit internal setiap tiga bulan, dan audit eksternal oleh Inspektorat Kabupaten dilakukan setahun sekali. Sekretaris Desa selalu

menyiapkan dokumen-dokumen pendukung untuk proses audit tersebut. Hal ini disampaikan informan YA selaku Sekretaris Desa Bulutellue dalam wawancara:

“Audit internal biasanya kami laksanakan setiap tiga bulan untuk melakukan pengecekan awal, sehingga apabila ditemukan kesalahan, dapat segera dilakukan perbaikan. Saya biasanya menyiapkan seluruh dokumen pendukung. Sementara itu, audit eksternal oleh Inspektorat Kabupaten dilaksanakan satu kali dalam setahun. (Wawancara YA, 15 April 2025).

Temuan tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Bulutellue telah menjalankan prinsip kepatuhan secara konsisten. Hal ini tercermin dalam koordinasi internal, penggunaan aplikasi keuangan desa yang sesuai standar, penyusunan laporan pertanggungjawaban, serta pelaksanaan audit sebagai bentuk pengawasan dan evaluasi.

c. Tanggung Jawab

Tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan desa mencerminkan kejelasan peran setiap perangkat desa, prosedur pelaksanaan tugas yang terstruktur, serta upaya perbaikan terhadap kesalahan yang mungkin terjadi. Pemerintah Desa Bulutellue, Kabupaten Sinjai menerapkan prinsip tanggung jawab dengan membagi tugas secara fungsional dan memastikan adanya verifikasi berjenjang dalam setiap proses keuangan. Pembagian tugas dalam pengelolaan keuangan desa telah diatur secara rinci. Sekretaris Desa bertugas membantu pengecekan dokumen, melengkapi administrasi, dan menyusun notulen rapat, sedangkan pengelolaan kas dan penginputan data ke aplikasi SISKEUDES menjadi tanggung

jawab Kaur Keuangan. Hal ini disampaikan oleh informan YA, selaku Sekretaris Desa Bulutellue:

“Pembagian peran dan tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan desa sudah jelas. Saya bertugas membantu memeriksa kelengkapan administrasi, memastikan seluruh dokumen telah lengkap, dan menyusun notulen rapat. Sementara itu, Kaur Keuangan bertanggung jawab mengelola kas dan melakukan input data langsung ke dalam aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES).” (Wawancara YA, 15 April 2025).

Informan RA, selaku Kaur Keuangan, menambahkan bahwa ia juga bertugas menyusun laporan awal, yang kemudian diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa:

“Saya bertugas mengelola seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran dana desa, termasuk melakukan input data ke dalam aplikasi, serta menyusun laporan awal. Setelah itu, Sekretaris Desa melakukan pengecekan kelengkapan dokumen, dan Kepala Desa memberikan pengesahan. (Wawancara RA, 15 April 2025).

Seluruh pengeluaran dana desa harus dibahas dan disetujui dalam rapat desa sebelum dicairkan. Mekanisme ini bertujuan memastikan setiap pengeluaran tercatat resmi dan memiliki dokumen pendukung yang lengkap. Menurut informan YA, proses tersebut selalu dicatat dalam notulen rapat, sedangkan informan RA menegaskan bahwa setiap pencairan wajib dilengkapi bukti transaksi seperti nota atau tanda terima. Jika terjadi kesalahan administrasi, perangkat desa segera melakukan tindakan korektif. Kesalahan input data diperbaiki langsung melalui aplikasi SISKEUDES dan dilengkapi berita acara sebagai bukti perubahan. Informan RA selaku kaur keuangan Desa Bulutellue menjelaskan:

“Apabila terjadi kesalahan input atau data yang kurang tepat, saya segera melakukan perbaikan langsung pada aplikasi. Setelah

itu, kami menyusun berita acara sebagai bukti adanya koreksi yang dilakukan.” (Wawancara RA, 15 April 2025).

Temuan ini menunjukkan bahwa pelaksanaan tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan Desa Bulutellue dilakukan secara sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan. Pembagian tugas yang jelas, prosedur persetujuan pengeluaran yang ketat, serta tindakan korektif terhadap kesalahan menunjukkan bahwa perangkat desa menjalankan tanggung jawabnya secara profesional.

d. Ketepatan

Ketepatan dalam pengelolaan keuangan desa mencerminkan akurasi pencatatan dan pelaporan setiap transaksi keuangan berdasarkan kondisi dan waktu kejadian yang sebenarnya. Pemerintah Desa Bulutellue, Kabupaten Sinjai menunjukkan komitmennya terhadap prinsip ketepatan dengan menggunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) untuk mencatat seluruh transaksi keuangan secara sistematis, lengkap, dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Seluruh transaksi keuangan dicatat secara langsung ke dalam sistem oleh perangkat desa yang berwenang. Proses pencatatan ini disertai dengan dokumen pendukung seperti berita acara, kwitansi, dan nota pembelian sebagai bukti administratif. Pencatatan dilakukan secara real-time untuk memastikan keabsahan setiap data transaksi yang masuk dalam sistem. Berdasarkan wawancara informan YA:

“Kami memastikan seluruh transaksi dicatat secara langsung ke dalam aplikasi. Selain itu, dokumen pendukung seperti berita acara juga selalu disiapkan sebagai pelengkap administrasi.” (Wawancara YA, 15 April 2025).

Pada prosedur pencatatan seluruh data keuangan yang diinput ke dalam sistem harus dilengkapi secara menyeluruh, baik dari segi kode rekening, jumlah dana, hingga keterangannya. Selain itu, setelah proses input selesai, data akan diperiksa ulang sebelum disahkan. Selain itu, Pemerintah Desa Bulutellue juga rutin melakukan rekonsiliasi untuk mencocokkan data kas manual dengan data digital dalam aplikasi. Apabila ditemukan perbedaan data, seluruh transaksi akan diperiksa satu per satu, termasuk memverifikasi kelengkapan kuitansi dan nota pembelian. Koreksi dilakukan segera sebelum laporan disahkan. Hal ini ditegaskan oleh informan RA, selaku Kaur Keuangan Desa Bulutellue, dalam wawancara berikut:

“Rekonsiliasi kami laksanakan secara rutin setiap bulan. Kami mencocokkan kembali data kas yang tercatat dalam buku dengan yang ada di aplikasi SISKEUDES. Jika terdapat selisih, seluruh transaksi akan diperiksa ulang satu per satu, termasuk memeriksa kelengkapan kuitansi. Apabila ada dokumen yang belum lengkap, akan segera dilengkapi terlebih dahulu sebelum disahkan.” (Wawancara RA, 15 April 2025).

Sebelum laporan keuangan diserahkan kepada pihak yang berwenang, dilakukan pengecekan akhir oleh Sekretaris Desa. Proses ini penting untuk menghindari kesalahan data dan memastikan bahwa laporan yang disampaikan benar-benar sesuai dengan kondisi keuangan desa. Jika ditemukan kesalahan input data dalam aplikasi, Kaur Keuangan akan segera melakukan perbaikan dan melengkapi dokumentasinya. Proses koreksi ini juga melibatkan admin kabupaten untuk memastikan bahwa perbaikan data dilakukan

secara resmi. Berdasarkan wawancara informan RA selaku Kaur Keuangan Desa Bulutellue:

“Seluruh laporan pasti diperiksa ulang terlebih dahulu sebelum diinput. Namun, apabila masih ditemukan kesalahan saat proses input data dalam aplikasi, maka akan segera dilakukan koreksi melalui bantuan admin dari pihak kabupaten.” (Wawancara RA, 15 April 2025).

Pemerintah Desa Bulutellue telah menerapkan prinsip ketepatan dalam pengelolaan keuangan secara menyeluruh. Ketepatan ini diwujudkan melalui pencatatan yang akurat, rekonsiliasi rutin, serta verifikasi dan koreksi pelaporan yang dilakukan secara terstruktur, sehingga menghasilkan laporan keuangan yang valid, tepat waktu, dan dapat dipertanggungjawabkan.

e. Efisiensi

Efisiensi dalam pengelolaan keuangan desa menggambarkan kemampuan pemerintah desa dalam memanfaatkan sumber daya keuangan secara optimal dengan menghindari pemborosan dan memastikan bahwa dana yang digunakan memberikan hasil atau manfaat maksimal bagi masyarakat. Prinsip efisiensi diterapkan oleh Pemerintah Desa Bulutellue melalui perencanaan anggaran yang terstruktur, pengambilan keputusan secara kolektif, serta penghematan biaya pada pos-pos yang dianggap tidak prioritas dan didukung oleh penggunaan aplikasi SISKEUDES. Pengambilan keputusan anggaran juga selalu dibahas secara kolektif dalam musyawarah desa. Hal ini dilakukan untuk menghindari keputusan sepihak yang dapat menimbulkan pemborosan. Penting untuk dilakukan diskusi

dan pertimbangan efisiensi dalam setiap pengeluaran. Berdasarkan wawancara informan YA selaku Sekretaris Desa Bulutellue:

“Kami selalu mempertimbangkan efisiensi dalam penyusunan anggaran. Setiap keputusan keuangan selalu didiskusikan terlebih dahulu dalam rapat desa. Saya biasanya membantu menghitung kebutuhan agar pengeluaran disesuaikan dengan skala prioritas. (Wawancara YA, 15 April 2025).

Efisiensi juga ditunjukkan dengan memanfaatkan sarana yang tersedia di kantor desa secara maksimal. Hal ini mampu menekan biaya operasional tanpa mengganggu pelaksanaan kegiatan desa. Berdasarkan wawancara informan RA selaku Kaur Keuangan Desa Bulutellue:

“Kami biasanya melakukan penghematan pada biaya operasional dengan memanfaatkan fasilitas kantor secara maksimal. Misalnya, apabila ada acara atau musyawarah dengan masyarakat, kegiatan tersebut dilaksanakan di aula kantor desa.” (Wawancara RA, 15 April 2025).

Efisiensi dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Bulutellue telah diterapkan dengan baik melalui perencanaan anggaran yang terstruktur, penggunaan aplikasi SISKEUDES dalam penyusunan kegiatan, serta penghematan pengeluaran pada kebutuhan yang tidak prioritas. Langkah-langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah desa memiliki kesadaran dalam menjaga keberlanjutan keuangan desa sekaligus memastikan setiap dana yang digunakan dapat memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

f. Integritas

Integritas dalam pengelolaan keuangan desa merujuk pada prinsip kejujuran, tanggung jawab, dan konsistensi perangkat desa

dalam menjalankan tugas pengelolaan keuangan secara profesional dan dapat dipercaya. Pemerintah Desa Bulutellue, Kabupaten Sinjai menunjukkan penerapan nilai-nilai integritas melalui pembagian tugas yang jelas, sistem pengawasan internal, serta dokumentasi keuangan yang lengkap dan akuntabel. Dalam menjalankan pengelolaan keuangan, setiap keraguan harus diselesaikan dengan komunikasi terbuka untuk mencegah kesalahan di kemudian hari.

Berdasarkan wawancara informan YA selaku Sekretaris Desa Bulutellue:

“Apabila terdapat keraguan terkait aturan atau hal yang belum dipahami, sebaiknya segera ditanyakan agar tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Sebab, apabila terjadi kesalahan, seluruh pihak akan turut bertanggung jawab. Oleh karena itu, kami saling mengingatkan satu sama lain.” (Wawancara YA, 15 April 2025)

Pengelolaan keuangan desa juga menekankan pentingnya pertanggungjawaban keuangan melalui dokumentasi yang sah. Semua transaksi yang dilakukan harus disertai bukti yang lengkap dan tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Berdasarkan wawancara informan RA selaku Kaur Keuangan Desa Bulutellue:

“Saya selalu memastikan bahwa setiap transaksi disertai bukti yang lengkap. Tidak ada penggunaan dana tanpa nota. Terlebih saat ini sebagian besar transaksi dilakukan secara non tunai, sehingga disertai dengan bukti transfer. Oleh karena itu, pertanggungjawaban dapat dilakukan dengan melampirkan nota atau bukti transfer tersebut.” (Wawancara RA, 15 April 2025)

Integritas juga dijaga melalui sistem pemeriksaan berlapis yang dilakukan oleh perangkat desa. Seluruh dokumen keuangan tidak hanya diverifikasi oleh satu pihak, tetapi dicek ulang agar terhindar dari kesalahan atau kekeliruan dalam pencatatan. Selain itu,

pembagian tugas antar perangkat desa dilakukan dengan jelas, dan apabila ditemukan kendala dalam proses pengelolaan keuangan, maka segera dilakukan rapat internal untuk menyelesaikan permasalahan secara bersama. Berdasarkan wawancara YA selaku Sekretaris Desa Bulutellue:

“Di Desa Bulutellue, kami saling melakukan pemeriksaan. Setiap perangkat desa memiliki pembagian tugas yang jelas, dan seluruh dokumen keuangan harus melalui proses verifikasi ganda. Apabila terdapat kendala, biasanya segera kami bahas melalui rapat internal agar permasalahan dapat segera diselesaikan.” (Wawancara YA, 15 April 2025)

Selain itu, integritas dalam pengelolaan anggaran desa juga tercermin dari ketaatannya terhadap prinsip akuntabilitas dan pelaporan. Seluruh transaksi keuangan desa harus dilengkapi dengan bukti formal seperti nota, kwitansi, dan tanda tangan penerima. Tidak diperbolehkan ada transaksi yang dilakukan tanpa dokumen pendukung, dan selama ini tidak ditemukan adanya penyimpangan atau penyelewengaan dana desa. Berdasarkan wawancara informan RA selaku Kaur Keuangan Desa Bulutellue:

“Prinsipnya, setiap pengeluaran harus disertai bukti, seperti nota, kuitansi, dan tanda tangan penerima. Sejauh ini, Alhamdulillah, saya dapat menyampaikan bahwa tidak terdapat temuan korupsi atau penyalahgunaan.” (Wawancara RA, 15 April 2025)

Selain menjaga kelengkapan dokumen, integritas juga diterapkan melalui mekanisme koreksi cepat ketika ditemukan kesalahan dalam pencatatan atau pelaporan. Data yang masuk ke dalam sistem akan diperiksa ulang dan segera diperbaiki apabila terjadi kekeliruan, sehingga proses pelaporan tetap akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Penerapan integritas dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Bulutellue tidak hanya terlihat dari kelengkapan administrasi, tetapi juga dari pola kerja perangkat desa yang menjunjung tinggi sikap tanggung jawab, keterbukaan, dan kehati-hatian dalam mengelola anggaran. Kebiasaan saling mengingatkan, pengecekan dua lapis, pengawasan langsung dari Kepala Desa, serta tidak adanya temuan penyalahgunaan dana menunjukkan bahwa integritas telah menjadi bagian dari budaya kerja yang dijaga secara konsisten.

g. Keterlibatan Pemangku Kepentingan

Keterlibatan pemangku kepentingan dalam pengelolaan keuangan desa merupakan bentuk partisipasi aktif dari masyarakat yang direpresentasikan melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta komunikasi terbuka antara perangkat desa dan warga. Prinsip ini penting untuk menciptakan tata kelola keuangan desa yang inklusif, transparan, dan akuntabel. Pemerintah Desa Bulutellue menunjukkan komitmen terhadap prinsip ini melalui pelibatan masyarakat dalam penyusunan anggaran, penyampaian laporan secara terbuka, serta pemberian ruang bagi warga untuk menyampaikan masukan secara langsung. Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan anggaran difasilitasi melalui kehadiran BPD dalam rapat-rapat desa. Dalam forum tersebut, BPD menyampaikan aspirasi masyarakat untuk dijadikan dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Berdasarkan wawancara informan YA selaku Sekretaris Desa Bulutellue:

“Masyarakat diwakili oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menyampaikan aspirasi saat rapat anggaran. Saya biasanya membantu mencatat usulan-usulan tersebut untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).” (Wawancara YA, 15 April 2025)

Meskipun keterlibatan masyarakat telah difasilitasi dalam bentuk forum musyawarah, mekanisme digital atau tertulis belum tersedia. Namun demikian pemerintah desa tetap merespons setiap masukan sebagai bentuk keterbukaan informasi. Informasi anggaran juga disampaikan secara visual melalui baliho agar mudah diakses oleh masyarakat luas. Berdasarkan wawancara informan RA, selaku Kaur Keuangan Desa Bulutellue:

“Masyarakat berhak mengetahui. Mereka dapat melihat langsung baliho Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang kami tempel di tempat umum. Isinya sudah mencakup seluru jenis anggaran dan pengeluaran, sehingga cukup jelas. Namun, hingga saat ini, kami memang belum dapat menyediakannya secara daring.” (Wawancara RA, 15 April 2025)

Keterlibatan pemangku kepentingan dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Bulutellue telah diterapkan melalui forum musyawarah, partisipasi BPD, dan media visual seperti baliho. Meskipun belum memiliki sistem partisipasi tertulis yang terstruktur, pemerintah desa telah membuka ruang bagi masyarakat untuk terlibat secara aktif, baik dalam penyusunan anggaran maupun pengawasan keuangan, yang mencerminkan semangat akuntabilitas partisipatif dalam pemerintahan desa.

C. Pembahasan

Akuntabilitas di Desa Bulutellue, Kabupaten Sinjai, terus ditingkatkan melalui penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana penerapan SISKEUDES telah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dan bagaimana aplikasi ini mendukung peningkatan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa aplikasi SISKEUDES telah diterapkan secara lengkap dan konsisten pada seluruh tahapan pengelolaan keuangan desa. Penggunaan aplikasi ini mencakup lima tahapan utama sesuai Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Dalam praktiknya, semua tahapan tersebut dijalankan oleh perangkat desa sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing, menggunakan aplikasi SISKEUDES versi 2.0.7. Kaur Keuangan bertanggung jawab melakukan input dan pencatatan anggaran, yang kemudian diverifikasi oleh Sekretaris Desa, dan disahkan oleh Kepala Desa. Seluruh proses ini berdasarkan data dari hasil musyawarah desa yang melibatkan masyarakat. Setiap transaksi keuangan yang dilakukan selalu dilengkapi dengan dokumen pendukung yang disimpan baik secara fisik maupun digital. Cara kerja yang terstruktur dan sistematis ini menunjukkan bahwa tata kelola keuangan desa telah dilakukan secara tertib, transparan, dan akuntabel.

Makna dari temuan ini tidak hanya menunjukkan keberhasilan penggunaan aplikasi digital dalam pengelolaan keuangan, tetapi juga memperlihatkan adanya perubahan budaya kerja di lingkup pemerintahan desa. Pemerintah Desa Bulutellue telah berhasil mengubah kebiasaan lama yang sebelumnya berbasis manual menjadi sistem digital yang lebih terorganisir, terdokumentasi, dan dapat diperiksa kembali jika diperlukan.

Hal ini bukan sekadar bentuk pemenuhan aturan administratif, tetapi lebih jauh menunjukkan bahwa ada kesadaran kolektif dari para aparatur desa untuk mengelola keuangan secara lebih bertanggung jawab. Bahkan di tengah keterbatasan infrastruktur dan kondisi geografis desa yang berada di daerah pegunungan, Pemerintah Desa Bulutellue mampu menjalankan digitalisasi dengan baik. Hal ini membuktikan bahwa transformasi digital dalam pemerintahan desa tidak hanya menjadi simbol modernisasi, melainkan sudah menjadi bagian nyata dari sistem kerja yang berjalan.

Temuan ini diperkuat oleh teori administrasi publik yang menekankan bahwa proses pemerintahan harus dijalankan melalui pengorganisasian dan koordinasi sumber daya secara sistematis untuk mewujudkan pelaksanaan kebijakan yang efektif dan bertanggung jawab. Menurut Peters (2018) dan Molenveld et al (2020), administrasi publik merupakan mekanisme yang mengatur bagaimana sumber daya dan personel publik digunakan untuk merumuskan, melaksanakan, serta mengevaluasi kebijakan publik. Dalam konteks pengelolaan keuangan Desa Bulutellue, penerapan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) menjadi wujud nyata dari penguatan mekanisme administrasi publik, karena mampu mengintegrasikan fungsi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban dalam satu sistem digital yang tertelusur dan transparan. Selain itu, penggunaan sistem berbasis teknologi dapat meningkatkan keakuratan laporan keuangan dan memperkuat pengambilan keputusan dalam sektor publik (Hall et al., 2016)

Secara empiris, hasil penelitian ini sejalan dengan beberapa penelitian sebelumnya. Maharani & Akbar (2020) menjelaskan bahwa

penerapan SISKEUDES membantu desa menyusun laporan keuangan secara lebih tertib, teratur, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Utami et al. (2023) menegaskan bahwa pengelolaan aplikasi SISKEUDES di Desa Karangrejo telah mencerminkan indikator akuntabilitas yang baik, mulai dari mekanisme pertanggungjawaban hingga transparansi laporan. Milenia et al. (2022) juga menunjukkan bahwa SISKEUDES efektif dalam memenuhi indikator laporan keuangan desa yang akuntabel secara vertikal maupun horizontal, meskipun masih ditemukan kendala teknis seperti kelengkapan SPJ.

Lebih lanjut, temuan di lapangan juga menunjukkan bahwa penggunaan SISKEUDES tidak hanya menunjukkan kesesuaian terhadap aturan administrasi, tetapi juga membawa dampak yang nyata terhadap peningkatan akuntabilitas keuangan desa secara keseluruhan. Akuntabilitas dalam penelitian ini dilihat dari tujuh indikator utama, yaitu: transparansi, kepatuhan, tanggung jawab, ketepatan, efisiensi, integritas, dan keterlibatan pemangku kepentingan. Transparansi terlihat dari adanya penyampaian informasi tentang APBDes dan laporan realisasi anggaran melalui baliho desa dan forum musyawarah. Kepatuhan dan tanggung jawab terlihat dari pelaksanaan kegiatan yang mengikuti rencana kerja yang sudah disusun dan pencatatan yang dilakukan secara teliti. Proses verifikasi dilakukan secara berlapis, sehingga kesalahan bisa diminimalkan. Ketepatan dan efisiensi meningkat karena laporan keuangan dapat dihasilkan secara cepat dan otomatis melalui sistem aplikasi. Integritas dijaga melalui dokumentasi lengkap dan prosedur yang dapat diaudit kapan saja. Keterlibatan masyarakat dan BPD dalam perencanaan dan pengawasan juga

menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa tidak hanya dilakukan secara teknis, tetapi juga melibatkan partisipasi aktif warga.

Dampak positif dari penggunaan SISKEUDES di Desa Bulutellue terlihat dari tiga hal utama. Pertama, meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa karena informasi keuangan disampaikan secara terbuka dan mudah diakses. Kedua, efisiensi kerja perangkat desa semakin baik karena mereka terbantu oleh sistem digital dalam melakukan pencatatan dan pelaporan, sehingga tidak banyak waktu dan tenaga yang terbuang. Ketiga, sistem dokumentasi dan verifikasi digital membantu mencegah risiko penyimpangan anggaran karena setiap transaksi tercatat dan mudah dilacak. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Diana et al. (2023) dan Utami et al. (2023), yang menyebutkan bahwa digitalisasi pengelolaan keuangan desa melalui SISKEUDES mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang jujur, terbuka, dan melibatkan masyarakat dalam proses pengawasan.

Temuan ini sejalan dengan teori konsep akuntabilitas menurut Sulfiani & Reski (2020), yang menekankan pentingnya pertanggungjawaban lembaga terhadap setiap kebijakan dan pengelolaan sumber daya kepada masyarakat sebagai pemangku kepentingan. Dalam konteks Desa Bulutellue, SISKEUDES telah menjadi sarana pertanggungjawaban yang efektif karena mendukung prinsip keterbukaan, ketelitian, dan transparansi dalam setiap tahap pengelolaan keuangan desa. Lebih jauh lagi, digitalisasi dalam sistem keuangan publik dapat mempercepat proses perencanaan, pelaporan, dan pengawasan (Olaru et al., (2022). Fakta ini sesuai dengan kondisi di lapangan, di mana pemerintah desa telah memanfaatkan aplikasi

SISKEUDES untuk menciptakan tata kelola yang efisien dan terdokumentasi secara digital.

Penerapan SISKEUDES di Desa Bulutellue tidak hanya sekadar memenuhi aturan dari pemerintah, tetapi juga benar-benar membantu meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan desa. Praktik ini mencerminkan kombinasi antara pemanfaatan teknologi, kemampuan sumber daya manusia, serta komitmen dari lembaga pemerintahan desa dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang baik. Penelitian ini memberikan kontribusi bagi pengembangan teori tentang sistem informasi keuangan desa dan akuntabilitas publik. Selain itu, temuan dari penelitian ini juga dapat dijadikan contoh atau model bagi desa-desa lain yang ingin memperbaiki pengelolaan keuangannya secara lebih modern, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan berikut merupakan hasil dari prosedur penelitian yang telah dilakukan diantaranya:

1. Pemerintah Desa Bulutellue Kabupaten Sinjai telah menerapkan aplikasi SISKEUDES secara menyeluruh dan konsisten sesuai dengan lima aspek pengelolaan keuangan desa berdasarkan regulasi yang berlaku. Setiap tahapan telah dilaksanakan oleh perangkat desa sesuai tugas dan fungsinya, dengan dokumentasi yang lengkap baik secara fisik maupun digital, serta melalui mekanisme musyawarah bersama masyarakat.
2. Peningkatan akuntabilitas keuangan desa telah terwujud di Desa Bulutellue, Kabupaten Sinjai, melalui penerapan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES). Aplikasi ini mempercepat pelaporan keuangan digital yang akurat, meningkatkan kepatuhan dan akuntabilitas melalui pencatatan dan verifikasi berlapis, serta mendorong transparansi melalui keterbukaan informasi keuangan. Selain itu, pendekatan ini mendorong keterlibatan dalam evaluasi anggaran dan perencanaan masyarakat sekaligus memperkuat integritas dan pengawasan melalui dokumentasi yang menyeluruh dan mudah diaudit.

B. Saran

Peneliti memberikan beberapa rekomendasi yang diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi:

1. Bagi Pemerintah Desa, disarankan untuk meningkatkan pemanfaatan SISKEUDES melalui pelatihan aparatur dan penyediaan infrastruktur pendukung. Perlu juga disiapkan forum pengaduan formal seperti kotak saran atau formulir tertulis.
2. Bagi Masyarakat, diharapkan lebih aktif dalam mengakses informasi keuangan dan mengawasi pengelolaannya melalui musyawarah maupun sarana aduan yang tersedia, guna mendukung transparansi dan akuntabilitas desa.
3. Bagi studi selanjutnya, penelitian ini dibatasi pada komunitas tertentu. Sehubungan dengan hal tersebut untuk mendapatkan hasil yang lebih menyeluruh, disarankan agar memperluas fokus dan mempertimbangkan penggunaan pendekatan lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardiansyah, M., & Wibowo, N. E. (2024). Implementation of The Village Financial System Application (SISKEUDES) In Luwuk Sampun Village, Tualan Hulu District, East Kotawaringin Regency. *Journal Of Public Administration Science: Policy Dynamics Public Services and Bureaucracy Transformation*, 1(2), 85–96. <Https://Doi.Org/10.70074/Jaspdt.V1i2.38>
- Bingilar, P. F., & Temitope, A. (2019). Accountability And Public Sector Financial Management in Nigeria. *Journal Of Accounting and Financial Management*, 5(3), 11–25.
- Carey, G., & Crammond, B. (2015). What Works in Joined-Up Government? An Evidence Synthesis. *International Journal of Public Administration*, 38(13–14), 1020–1029. <Https://Doi.Org/10.1080/01900692.2014.982292>
- Choiriyah, I. U., Sabilillah, S. F., & Riyad, A. (2022). Kemampuan Adaptasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Di Desa Larangan Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo. *Reformasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 12(1), 152–162.
- Damanik, A. R., Firmansyah, R., & Hafizhah, A. N. (2023). *Enhancing Smart Digitalized System Through SISKEUDES Application in Ensuring Village Accountability*. Aebmr, 245, 74–85.
- Del Paso, R. L., Pattanayak, S., Uña, G., & Tourpe, H. (2023). *Digital Solutions Guidelines for Public Financial Management. Technical Notes and Manuals*, 2023(007), 1–69. <Https://Doi.Org/10.5089/9798400251566.005>
- Duggappa, V. (2024). Understanding The Impact of Digitalisation on Society. *Miac Journal for Arts, Commerce and Sciences (M-Jacs)*, 2(1), 16–20. <Https://Doi.Org/10.59415/Mjacs.V2i1.43>
- DJPK Kemenkeu. (2025). *Rincian Dana Desa TA 2025*. 1, 652–676. <https://djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2024/10/Provinsi-Sulawesi-Selatan.pdf>
- Elfirar, I., & Putri, N. E. (2024). Penerapan Penggunaan Aplikasi SISKEUDES Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Desa Di Nagari Selayo. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*, 5(1), 11. <Https://Doi.Org/10.47134/Villages.V5i1.90>

- Eo Kutu Goo, E., & Mario Sanda, E. (2022). Analisis Pelaksanaan Tata Kelola Rencana Strategis, Akuntabilitas Dan Transparansi Dana Desa Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi di Desa Magepanda Kecamatan Magepanda). *Accounting UNIPA - Jurnal Akuntansi*, 1(1). <https://doi.org/10.59603/accounting.v1i1.124>
- Faizah, A., & Sari, R. (2022). Analisis Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Dalam Pengelolaan Keuangan Di Desa Banyudono Kecamatan Dukun. *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, 5(1), 763–776. <Https://Doi.Org/10.36778/Jesya.V5i1.539>
- Fan, Y. (2024). *Accountability In Public Organization: A Systematic Literature Review and Future Research Agenda*. *Public Organization Review*. <Https://Doi.Org/10.1007/S11115-024-00792-Y>
- Fikriyani, F. (2019). Efektivitas Penerapan Aplikasi SISKEUDES Dalam Meningkatkan Trasparansi Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Desa Rantau Jaya Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016). *Jurnal Umy*, 1(1), 1–16.
- Gaspar, M. R., Gabriel, J. P., Manuel, M. B., Ladrillo, D. S., Gabriel, E. R., & Gabriel, A. G. (2022). Transparency And Accountability of Managing School Financial Resources. *Journal Of Public Administration and Governance*, 12(2), 102–115. <Https://Doi.Org/10.5296/Jpag.V12i2.20146>
- Gualano, M. R., Buttigieg, S., & Moscato, U. (2023). *Editorial: Impact Of Digitalization on Workers' Health and Work-Life Balance*. *Frontiers In Public Health*, 11. <Https://Doi.Org/10.3389/Fpubh.2023.1204465>
- Hall, A. T., Frink, D. D., & Buckley, M. R. (2016). An Accountability Account: A Review and Synthesis Of The Theoretical And Empirical Research On Felt Accountability. *Journal Of Organizational Behavior*, 38(2), 204–224. <Https://Doi.Org/10.1002/Job.2052>
- Hartika, D., Stepani, G., Regar, N. A., Sugihwarni, P., & Malasari, T. (2023). Analysis of The Impact of Digital Technology On People's Social Life. *Jurnal Pendidikan Mandala*, 8(4), 1624–1631.
- Lacuzzi, S. (2022). An Appraisal of Financial Indicators for Local Government: A Structured Literature Review. *Journal Of Public Budgeting, Accounting & Financial Management*, 34(6), 69–94. <Https://Doi.Org/10.1108/Jpbafm-04-2021-0064>

- Junaidi, S. (2022). *Analisis Link and Match Lulusan Dengan Industri Kerja (Studi Kasus Alumni Perbankan Syariah Uin Sumatera Utara)*. Uinsu.
- Kadir, A., Widarini, K. N., Gunawan, D. I., & Puspitasari, D. (2016). The Indonesian Perspectives on Village Financial Management Accountability. *International Journal of Economics, Business and Management Research*, 1(4), 234–251.
- Kesa, D. D., Nurfikri, A., & Lee, C.-W. (2024). *Evaluation of The Village Financial Information System (SISKEUDES) In Enhancing Governance and Financial Transparency In Indonesian Village Administration*. *Khazanah Sosial*, 6(3), 427–446. <Https://Doi.Org/10.15575/Ks.V6i3.38933>
- Kryzhanovskij, O. A., Baburina, N. A., & Ljovkina, A. O. (2021). *How To Make Digitalization Better Serve an Increasing Quality of Life? Sustainability*, 13(2), 611. <Https://Doi.Org/10.3390/Su13020611>
- Lawson, A. (2015). *Public Financial Management* (University of Birmingham, Ed.; 1st Ed., Vol. 1). Gsdrc Professional Development Reading Pack No. 6. Birmingham.
- Lindberg, S. I. (2013). Mapping Accountability: Core Concept and Subtypes. *International Review of Administrative Sciences*, 79(2), 202–226. <Https://Doi.Org/10.1177/0020852313477761>
- Madan, M. (2022). Government Policy Implementation Through Public Administration. *Journal Of Public Administration and Policy Research*, 4(2).
- Mahmud, A., Susilowati, N., Handayani, B. D., Leonita, A., & Santoso, A. (2024). Smart Village: Evaluating The Role of SISKEUDES Management in Enhancing Village Fund Accountability. *Edelweiss Applied Science and Technology*, 8(6), 7712–7725. <Https://Doi.Org/10.55214/25768484.V8i6.3679>
- Milenia, H. A., Effendy, L., & Nurabiah, N. (2023). Efektivitas Penerapan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Laporan Keuangan Desa (Studi Kasus Desa Taman Sari Kecamatan Gunungsari). *Jurnal Akuntansi & Keuangan Unja*, 7(2), 67–81. <Https://Doi.Org/10.22437/Jaku.V7i2.18494>
- Molenveld, A., Verhoest, K., Voets, J., & Steen, T. (2020). *Images Of Coordination: How Implementing Organizations Perceive Coordination Arrangements*. *Public Administration Review*, 80(1), 9–22. <Https://Doi.Org/10.1111/Puar.13136>

- Mariyadi. (2024). *Besaran Dana Desa 2024 sesuai UU dan Kemenkeu*. *Updesa.Com*.https://updesa.com/besaran-dana-desa-2024/#google_vignette
- Nadaa, D., & Priyanti, E. (2023). *Inovasi Digital Dalam Pelaksanaan Penggunaan Aplikasi SISKEUDES*. *Matra Pembaruan*, 7(1), 61–73. <Https://Doi.Org/10.21787/Mp.7.1.2023.61-73>
- Nurlinda, N. (2018). *Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa*. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 6(1), 63–72.
- Nurrrizkiana, B., Handayani, L., & Widiastuty, E. (2017). Determinan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah dan Implikasinya Terhadap Kepercayaan Public-Stakeholders. *Jurnal Akuntansi Dan Investasi*, 18(1), 28–47. <https://doi.org/10.18196/jai.18159>
- Nurfajriani, W. V., Mahendra, M. W. I. A., & Sirodj, R. A. 2024. “*Triangulasi Data Dalam Analisis Data Kualitatif*.” *Ilmiah Wahana Pendidikan* 10(17):826–33. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13929272>.
- Olaru, E. A., Hlaciuc, E., Apetrei, A., Tulvischi, M., & Graur, A. (2022). *Status And Perspectives of Digitalization on Public Accounting*. *Communications Of International Proceedings*, 20.
- Osho, A. E., & Afolabi, M. B. (2014). The Effects and Effectiveness of Accountability and Transparency in Government Sectors. *iosr Journal of Business and Management (iosr-Jbm)*, 16(4), 46–54.
- Peters, B. G. (2018). *The Challenge of Policy Coordination*. *Policy Design and Practice*, 1(1), 1–11. <Https://Doi.Org/10.1080/25741292.2018.1437946>
- Pasaribu, S. N., Nasution, Y. S. J., & Harmain, H. (2023). Pengelolaan Keuangan Desa Dan Sistem Akuntansi Keuangan Desa Dalam Rangka Meningkatkan Kinerja Pemerintah Desa Sibito. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 7(3), 95–111. <https://doi.org/10.31955/mea.v7i3.3307>
- Puspa, D. F., & Prasetyo, R. A. (2020). Pengaruh Kompetensi Pemerintah Desa, Sistem Pengendalian Internal, Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, 20(2), 281–298. <Https://doi.org/10.25105/mraai.v20i2.7894>
- Qomaruddin, Q., & Sa'diyah, H. (2024). Kajian Teoritis tentang Teknik Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif: Perspektif Spradley, Miles dan Huberman.

- Journal of Management, Accounting, and Administration, 1(2), 77–84.*
<https://doi.org/10.52620/jomaa.v1i2.93>
- Ramadhan, T. S. (2025). Menilai Keberhasilan Sistem Keuangan Desa Menggunakan Model Kesuksesan Sistem Informasi Delone & Mclean (Studi Empiris Pada Pemerintah Desa Di Kota Pariaman). *Jurnal Manajemen Dan Pemasaran Digital, 3(1), 21–34.*
<Https://Doi.Org/10.38035/Jmpd.V3i1.294>
- Rosari, R., & Manabulu, H. A. (2020). Increasing An Accountability of Village Financial Management with Apparatus Competence and Government's Internal Control System. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Airlangga, 5(2), 902–919.*
- Rambu, R., Rawambaku, L., Kerihi, A. S. Y., Tefa, S. G., & Cendana, U. N. (2024). Analisis Penerapan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Kota Soe Kabupaten Timor Tengah Selatan. *Jurnal Inovasi Ekonomi Syariah Dan Akuntansi (JIESA), 1(5), 271–284.* <https://doi.org/10.61132/jiesa.v1i5.524>
- Rijali, A. (2019). Analisis Data Kualitatif. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah, 17(33), 81.* <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>
- Sandfort, J., & Moulton, S. (2015). *Effective Implementation in Practice: Integrating Public Policy and Management* (1st Ed., Vol. 1). Jossey-Bass.
- Saputra, K. A. K., Anggiriawan, P. B., & Sutapa, I. N. (2018). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Perspektif Budaya Tri Hita Karana. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Airlangga, 3(1), 306–321.*
- Saputra, R. (2023). *Analisis Penerapan Sistem Keuangan Desa SISKEUDES Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Desa Balangtaroang [Program Studi Akuntansi]. Universitas Muhammadiyah Makassar.*
- Setiowati, M., & Isna Fitria Agustina. (2024). Efektivitas Penggunaan Aplikasi SISKEUDES Dalam Pelaporan Keuangan Di Desa Permisan Kecamatan Jabon. *Journal Publicuho, 7(3), 1663–1676.*
<Https://Doi.Org/10.35817/Publicuho.V7i3.527>
- Setiawan, A., Prihatni, R., & Handarini, D. (2024). Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Menggunakan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di Desa Kabupaten Bogor. *Jurnal Akuntansi, Perpajakan Dan Auditing, 5(3), 613–625.*
<https://doi.org/10.21009/japa.0503.10>

- Sabir, R., Mustanir, A., Yasin, A., Firman, F., & Sofyan, W. (2022). Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Dana Desa Di Desa Talawe. *PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan*, 10(1), 49–54. <https://doi.org/10.55678/prj.v10i1.576>
- Sulfiani, A. N., & Reski, K. (2020). Akuntabilitas dan Transparansi Pelayanan BPJS Kesehatan di Kota Palopo. *Prosiding Seminar Nasional Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7–11. <http://jurnal.poliupg.ac.id/index.php/snp2m/article/download/2320/2032>
- Tkachenko, L. (2020). Public Finance Management: Challenges And Opportunities. *Athens Journal of Business & Economics*, 6(1), 73–98. <Https://Doi.Org/10.30958/Ajbe.6-1-4>
- Triwibowo, E., & Malik, I. A. (2023). Analisis Implementasi Pengelolaan Dana Desa Menggunakan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Di Desa Gandasari Kecamatan Cikarang Barat. *Jurnal Ekonomi Efektif*, 6(1), 30–42.
- Tomi, A., Made, A., & Sari, A. R. (2024). Analisis Tata Kelola Dana Desa Dalam Rangka Peningkatan pembangunan Desa (Studi DesaNgebruk , Desa Senggreng , Desa Sambigede , Desa Jatiguwi di Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang). *JURNAL AKUNTANSI NERACA E-ISSN : 2987- 1352*, 1(4), 1–6.
- Usman, A., & Sundari, S. (2024). The Influence of Village Financial System (SISKEUDES Application), Transparency, And Internal Control on Fraud Prevention. *Public And Municipal Finance*, 13(2), 24–30. [Https://Doi.Org/10.21511/Pmf.13\(2\).2024.03](Https://Doi.Org/10.21511/Pmf.13(2).2024.03)
- Warsaleh, A., Darwanis, D., & Indayani, I. (2023). The Effect of SISKEUDES Implementation, Village Apparatus Training, And Internal Control System on The Quality of Village Financial Reports (The Study of Villages in Simeulue Regency, Aceh Province). *Jurnal Akuntansi*, 13(2), 83–97(Waruwu, 2024)
- Waruwu, M. (2024). Pendekatan Penelitian Kualitatif: Konsep, Prosedur, Kelebihan dan Peran di Bidang Pendidikan. *Afeksi: Jurnal Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan*, 5(2), 198–211. <https://doi.org/10.59698/afeksi.v5i2.236>



Lampiran 1 Surat Izin Penelitian Desa Bulutellue



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
KECAMATAN BULUPODDO
DESA BULU TELLUE

Alamat : Jln. Maitirodeceng No. 01 Desa Bulu Tellue Kec. Bulupodo Kab. Sinjai Kode Pos : 92654

Nomor: 19 /BTL/BP/2025

Lamp : -

Perihal : Persetujuan Izin Penelitian

Yth. Bapak Ketua LP3M Universitas Muhammadiyah Makassar

Di-
Makassar

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Sinjai, Nomor : 00262/16/07/DPM-PTSP/IV/2025 perihal Izin Penelitian dalam rangka pembuatan Skripsi, dengan judul "Analisis Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan Desa Bulu Tellue Kabupaten Sinjai" Maka kami dari pihak Kantor Desa Bulu Tellue Kecamatan Bulupodo Kabupaten Sinjai Memberikan Izin kegiatan tersebut. Adapun nama Mahasiswa(i) tersebut di bawah ini :

NO.	NIM	NAMA MAHASISWA	FAKULTAS/PRODI
1.	105731106521	INDRIANI	AKUNTANSI

Demikian surat ini kami sampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan banyak terimakasih.

Bulu Tellue, 14 April 2025



Lampiran 2 Surat Izin Penelitian DPMPTSP Kabupaten Sinjai

PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Jalan Perseutan Raya No. 116, Kelurahan Bringgire, Kabupaten Sinjai Telp. : (0482) 210099 Fax. : (0482) 22460 Kode Pos. : 90812 Kabupaten Sinjai

Yth. Kepala Desa Bulupoddo Kec. Bulupoddo
 Kab. Sinjai

Nomor : 00262/16/07/DPM-PTSP/IV/2025
 Sifat : Biasa
 Lampiran : Izin Penelitian
 Perihal : Izin Penelitian

Berdasarkan Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu provinsi
 Sulawesi Selatan, Nomor : 6683/S.01/PTSP/2025, Tanggal 25 Maret 2025 Perihal : Penelitian .
 Bawha Mahasiswa/Peneliti yang tersertai di bawah ini :

Nama	INDRIANI
Tempat / Tanggal Lahir	Makassar/16 Mei 2003
Nama Perguruan Tinggi	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
NIM	105731106621
Program Studi	AKUNTANSI
Jenis Kelamin	Perempuan
Pekerjaan	Mahasiswa S1
Alamat	Dusun Samanre, Kel./Desa Desa Bulu Tellue, Kecamatan Bulupoddo Kabupaten Sinjai

Bermaksud akan Mengadakan Penelitian di Daerah Bantuan Saudara Dalam Rangka Penyusunan Skripsi, Dengan Jutul : ANALISIS PENERAPAN APLIKASI SISTEM KEUANGAN DESA DALAM MENINGKATKAN AKUNTABILITAS KEUANGAN DESA BULU TELLUE KABUPATEN SINJAI

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. 09 April s/d 09 Juni 2025
 Pengaruh

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, pada prinsipnya kami dapat menyelanjuti kegiatan dimaksud dengan ketentuan :

1. Setiap kali dan sesudah melaksanakan kegiatan yang bersangkutan harus melaporkan di kepada instansi tersebut di atas;
2. Kegiatan tidak boleh menyimpang dari masalah yang telah diturunkan semata-mata kepentingan penggunaan data;
3. Membatasi semua peraturan perundang-undangan dan menghindari adat issadal setempat;
4. Menyerahkan 1 (satu) berkas copy hasil Laporan kepada instansi tersebut di atas; dan
5. Menyerahkan 1 (satu) berkas copy hasil Laporan kepada Bupati Sinjai Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai.

Demikian Surat Izin Penelitian ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetahkan di Kabupaten Sinjai
 Pada tanggal : 08 April 2025
 a.n. **BUPATI SINJAI**
 KEPALA DINAS,

LUKMAN DAHLAN, S.I.P, M.Si
 Pangkat : Pembina Utama Muda / M
 NIP : 197011301990031002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Sinjai (sebagai laporan);
2. Ketua LP3M UNISMUH Makassar
3. Camat Bulupoddo Kab. Sinjai
4. Yang Bersangkutan (Indriani)
5. Arsite

Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik yang tersertifikasi oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSE) sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah.

Lampiran 3 Lembar Wawancara

Instrumen Lembar Wawancara



Nama Informan :

Jabatan :

Hari/tanggal :

1. Wawancara ini bersifat privasi dan hanya digunakan untuk keperluan akademik dalam rangka penyusunan skripsi dengan topik "Analisis Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa dalam Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan Desa Bulutellue Kabupaten Sinjai". Oleh karena itu, informasi terkait pengelolaan keuangan desa akan dijaga kerahasiaannya.
2. Mohon untuk menjawab setiap pertanyaan secara objektif dan sejurnu-jurnya, agar hasil penelitian ini dapat mencerminkan kondisi riil dan tidak bias.
3. Identitas narasumber akan disamarkan dalam bentuk inisial pada penulisan hasil penelitian, sehingga kerahasiaan pribadi tetap terjaga dengan baik.

Daftar Pertanyaan Wawancara:

No.	Aspek	Indikator	Pertanyaan Wawancara
1.	Transparansi	Ketersediaan laporan keuangan bagi pemangku kepentingan	1. Bagaimana cara Kantor Desa Bulutellue memastikan laporan keuangan dapat diakses oleh pemangku kepentingan?
		Dokumentasi transaksi keuangan yang jelas	2. Seberapa jelas dokumentasi transaksi keuangan yang dilakukan di Kantor Desa Bulutellue?

		Akses terbuka terhadap alokasi anggaran dan pengeluaran	3. Apakah alokasi anggaran dan pengeluaran dapat diakses oleh pihak masyarakat desa? Jika bisa, bagaimana mekanismenya?
2.	Kepatuhan	Kepatuhan terhadap regulasi dan kebijakan keuangan	4. Bagaimana langkah-langkah yang diambil oleh Kantor Desa Bulutellue untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan kebijakan keuangan?
		Kesesuaian dengan standar akuntansi	5. Sejauh mana kesesuaian laporan keuangan Kantor Desa Bulutellue dengan standar akuntansi yang berlaku?
		Audit internal dan eksternal secara berkala	6. Seberapa sering audit internal dan eksternal dilakukan oleh Kantor Desa Bulutellue dan bagaimana hasilnya digunakan?
3.	Tanggung Jawab	Peran dan tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan yang jelas	7. Bagaimana pembagian peran dan tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan di Kantor Desa Bulutellue?
		Akuntabilitas pejabat keuangan atas keputusan dan pengeluaran	8. Bagaimana langkah yang diambil oleh pejabat keuangan desa atas setiap keputusan dan pengeluaran dana desa yang dilakukan?
		Penerapan tindakan korektif terhadap kesalahan pengelolaan	9. Apa tindakan yang diterapkan oleh Kantor Desa Bulutellue jika terjadi kesalahan dalam pengelolaan keuangan desa Bulutellue?

		keuangan	
4.	Ketepatan	Pencatatan dan pembukuan keuangan yang akurat	10. Bagaimana cara Kantor Desa Bulutellue memastikan pencatatan dan pembukuan keuangan tetap akurat?
		Rekonsiliasi data keuangan secara tepat waktu	11. Seberapa rutin dilakukan rekonsiliasi data keuangan oleh Kantor Desa Bulutellue dan bagaimana prosedurnya?
		Pelaporan keuangan bebas dari kesalahan	12. Apa langkah yang dilakukan oleh Kantor Desa Bulutellue untuk memastikan laporan keuangan bebas dari kesalahan?
5.	Efisiensi	Pengalokasian dan pemanfaatan sumber daya keuangan secara optimal	13. Bagaimana strategi yang digunakan Kantor Desa Bulutellue untuk mengalokasikan dan memanfaatkan sumber daya keuangan desa Bulutellue secara optimal?
		Pengambilan keputusan keuangan yang hemat biaya	14. Apa faktor utama yang dipertimbangkan Kantor Desa Bulutellue dalam pengambilan keputusan keuangan desa agar lebih hemat dalam penggunaan dana desa?
		Pengurangan pengeluaran yang tidak perlu	15. Bagaimana cara Kantor Desa Bulutellue mengurangi pengeluaran yang tidak perlu tanpa mengganggu operasional?

6.	Integritas	Pengelolaan sumber daya keuangan secara etis	16. Bagaimana cara memastikan pengelolaan sumber daya keuangan Kantor Desa Bulutellue dilakukan secara etis?
		Tidak adanya kecurangan, korupsi, atau penyalahgunaan keuangan	17. Apa langkah yang diambil oleh Kantor Desa Bulutellue untuk mencegah kecurangan, korupsi, atau penyalahgunaan keuangan?
		Mekanisme pengendalian internal yang kuat	18. Seberapa kuat mekanisme pengendalian internal Kantor Desa Bulutellue dalam memastikan integritas keuangan desa?
7.	Keterlibatan Pemangku Jabatan	Partisipasi publik dalam perencanaan dan evaluasi anggaran	19. Seberapa besar partisipasi publik dalam perencanaan dan evaluasi anggaran dana desa Bulutellue?
		Pelaporan dan komunikasi yang rutin dengan pemangku kepentingan	20. Bagaimana mekanisme pelaporan dan komunikasi yang diterapkan oleh Kantor Desa Bulutellue terhadap pemangku jabatan dan masyarakat desa?
		Mekanisme umpan balik dan pengaduan terkait keuangan	21. Apakah terdapat mekanisme umpan balik dan pengaduan terkait keuangan desa? Jika ada, bagaimana mekanismenya?

Lampiran 4 Coding dan Transkrip Wawancara

CODING WAWANCARA

1. Coding Indikator

- I : Ketersediaan laporan keuangan bagi pemangku kepentingan
- I-A : Dokumentasi transaksi keuangan yang jelas
- I-B : Akses terbuka terhadap alokasi anggaran dan pengeluaran
- II : Kepatuhan terhadap regulasi dan kebijakan keuangan
- II-A : Kesesuaian dengan standar akuntansi
- II-B : Audit internal dan eksternal secara berkala
- III : Peran dan tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan
- III-A : Akuntabilitas pejabat keuangan atas keputusan dan pengeluaran
- III-B : Tindakan korektif terhadap kesalahan pengelolaan keuangan
- IV : Ketepatan pencatatan dan pembukuan keuangan yang akurat
- IV-A : Rekonsiliasi data keuangan secara tepat waktu
- IV-B : Pelaporan keuangan bebas dari kesalahan
- V : Pengalokasian sumber daya keuangan secara optimal
- V-A : Pengambilan keputusan keuangan yang hemat biaya
- V-B : Pengurangan pengeluaran yang tidak perlu
- VI : Pengelolaan keuangan secara etis
- VI-A : Pencegahan kecurangan, korupsi/penyalahgunaan keuangan
- VI-B : Mekanisme pengendalian internal yang kuat
- VII : Partisipasi publik dalam perencanaan dan evaluasi anggaran
- VII-A : Pelaporan dan komunikasi dengan pemangku kepentingan
- VII-B : Mekanisme umpan balik dan pengaduan terkait keuangan

2. Coding Key Informan

- YA : Yahya (Sekretaris Desa Buliutellue Kabupaten Sinjai)
- RA : Ramli Agus (Kaur Keuangan Desa Buliutellue Kabupaten Sinjai)

Wawancara Key Informan 1

Nama : Yahya
 Kode : YA
 Jabatan : Sekretaris Desa
 Tanggal Wawancara : 15 April 2025

Kode	Data Wawancara	Baris	Penulisan
I	<ul style="list-style-type: none"> • kita selalu siapkan laporan keuangan itu dalam bentuk baliho transparansi APBDes yang dipasang di depan kantor desa. Selain itu juga sering kita sampaikan secara langsung saat rapat biar lebih jelas. 	3	<p>YA/I/1/3</p> <p>Keterangan: Yahya menjelaskan ketersediaan laporan keuangan bagi pemangku kepentingan terdapat pada lampiran 1 baris ke 3.</p>
I-A	<ul style="list-style-type: none"> • Semua transaksi, baik itu penerimaan maupun pengeluaran, selalu ada buktinya. Kita juga simpan dokumen fisik dan file digitalnya, supaya kalau ada audit atau pemeriksaan, bisa langsung ditunjukkan. 	9	<p>YA/I-A/1/9</p> <p>Keterangan: Yahya menjelaskan dokumentasi transaksi keuangan yang jelas terdapat pada lampiran 1 baris 9.</p>
I-B	<ul style="list-style-type: none"> • masyarakat bisa lihat melalui baliho yang sudah dipasang. kita juga sampaikan secara lisan supaya lebih jelas saat rapat. 	15	<p>YA/I-B/1/15</p> <p>Keterangan: Yahya menjelaskan akses terbuka terhadap alokasi anggaran dan pengeluaran terdapat pada lampiran 1 baris 15.</p>
II	<ul style="list-style-type: none"> • Kita selalu berpatokan pada aturan dek, terutama Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dan untuk mendukung itu, kita juga pakai 	19	<p>YA/II/1/19</p> <p>Keterangan: Yahya menjelaskan kepatuhan terhadap regulasi dan kebijakan</p>

	<p>aplikasi Sistem Keuangan Desa yang kita gunakan sejak tahun 2016, waktu masih masa pemerintahannya Pak A. Sudirman. Setiap ada kegiatan pengelolaan keuangan, kita pasti rapat dulu, koordinasi dengan pendamping desa, supaya tidak ada yang keliru.</p>		<p>keuangan terdapat pada lampiran 1 baris 19.</p>
II-A	<ul style="list-style-type: none"> • Kita selalu ikuti format yang sudah ada di SISKEUDES. 	26	<p>YA/II-A/1/26</p> <p>Keterangan: Yahya menjelaskan kesesuaian dengan standar akuntansi terdapat pada lampiran 1 baris 26.</p>
II-B	<ul style="list-style-type: none"> • Audit internal biasanya kita lakukan tiap tiga bulan, untuk cek-cek dulu biar ada perbaikan kalau ada kesalahan. Saya biasanya siapkan dokumennya. Kalau audit eksternal dari inspektorat kabupaten itu setahun sekali. 	32	<p>YA/II-B/1/32</p> <p>Keterangan: Yahya menjelaskan audit internal dan eksternal secara berkala terdapat pada lampiran 1 baris 32.</p>
III	<ul style="list-style-type: none"> • Peran dan tanggung jawab masing-masing sudah jelas. Kalau saya 	39	<p>YA/III/1/39</p> <p>Keterangan:</p>

	disini kerjanya nya dek bantu cek-cek administrasi, memastikan dokumen sudah lengkap, dan biasanya juga buat laporan notulen. Kalau Kaur Keuangan itu lebih ke yang pegang kas dan input langsung data ke SISKEUDES.		Yahya menjelaskan peran dan tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan terdapat pada lampiran 1 baris 39.
III-A	<ul style="list-style-type: none"> Kalau ada pengeluaran, kita selalu bahas dulu dalam rapat. Biasanya saya yang catat notulen rapat, lalu setelah ada kesepakatan, baru Kaur Keuangan proses pencairannya. 	45	<p>YA/III-A/1/47</p> <p>Keterangan: Yahya menjelaskan akuntabilitas pejabat keuangan atas keputusan dan pengeluaran terdapat pada lampiran 1 baris 45.</p>
III-B	<ul style="list-style-type: none"> Kalau terjadi kekeliruan, misalnya ada salah input data di SISKEUDES atau ada dokumen yang kurang lengkap biasanya saya langsung koordinasi dengan Kaur Keuangan untuk diperbaiki. 	53	<p>YA/III-B/1/53</p> <p>Keterangan: Yahya menjelaskan tindakan korektif terhadap kesalahan pengelolaan keuangan terdapat pada lampiran 1 baris 53.</p>
IV	<ul style="list-style-type: none"> Kita pastikan, dek, semua transaksi itu langsung dicatat di aplikasi. Kita juga ada 	60	<p>YA/IV/1/60</p> <p>Keterangan: Yahya menjelaskan ketepatan pencatatan dan</p>

	dokumen pendukung seperti berita acara.		pembukuan keuangan yang akurat terdapat pada lampiran 1 baris 60.
IV-A	<ul style="list-style-type: none"> Rekonsiliasi kita lakukan rutin setiap bulan, dek. Biasanya setelah akhir bulan, saya sama Kaur Keuangan duduk bareng di kantor, kita cocokkan laporan kas dengan saldo yang ada di SISKEUDES. 	65	YA/IV-A/1/65 Keterangan: Yahya menjelaskan rekonsiliasi data keuangan secara tepat waktu terdapat pada lampiran 1 baris 65.
IV-B	<ul style="list-style-type: none"> Biasanya sebelum laporan final diserahkan, saya cek dulu data dan dokumen dek. Kalau ada yang keliru, saya minta diperbaiki dulu biar tidak ada masalah di kemudian hari. 	73	YA/IV-B/1/73 Keterangan: Yahya menjelaskan pelaporan keuangan bebas dari kesalahan terdapat pada lampiran 1 baris 73.
V	<ul style="list-style-type: none"> Tentu dilakukan perencanaan kegiatan secara rinci dan bertahap dek Biasanya kita adakan rapat biar penganggaran lebih terarah. Jadi semua itu dirancang biar dana desa benar-benar terasa manfaatnya untuk masyarakat. 	79	YA/V/1/79 Keterangan: Yahya menjelaskan pengalokasian sumber daya keuangan secara optimal terdapat pada lampiran 1 baris 79.
V-A	<ul style="list-style-type: none"> Kita selalu mempertimbangkan 	86	YA/V-A/1/86

	efisiensi anggaran dek. Keputusan keuangan juga selalu kita diskusikan dalam rapat desa. Saya biasanya bantu hitung kebutuhan, biar pengeluaran sesuai prioritas.		Keterangan: Yahya menjelaskan pengambilan keputusan keuangan yang hemat biaya terdapat pada lampiran 1 baris 86.
V-B	<ul style="list-style-type: none"> • Kita lihat apakah pengeluaran itu penting atau bisa dihemat. kita bisa kurangi di bagian-bagian yang tidak terlalu penting, misalnya alat tulis kantor, kalau masih ada stok, tidak usah beli baru dulu. Rapat-rapat juga kita adakan di kantor desa. Jadi semua itu dikontrol, biar operasional tetap jalan tapi pengeluaran tetap bisa hemat. 	91	YA/V-B/1/91 Keterangan: Yahya menjelaskan pengurangan pengeluaran yang tidak perlu terdapat pada lampiran 1 baris 91.
VI	<ul style="list-style-type: none"> • kalau ada yang ragu soal aturan atau kurang dimengerti, mending tanya dulu daripada nanti repot di belakang. Karena kalau ada salah, semua pasti ikut tanggung jawab. Jadi kita saling ingatkan satu sama lain. 	98	YA/VI/1/98 Keterangan: Yahya menjelaskan pengelolaan keuangan desa secara etis terdapat pada lampiran 1 baris 98.

VI-A	<ul style="list-style-type: none"> • setiap ada transaksi itu pasti ada buktinya. Jadi tidak bisa sembarangan ambil uang. Pak Desa juga selalu ingatkan terus jangan sampai ada yang main-main. 	104	<p>YA/VI-A/1/104</p> <p>Keterangan: Yahya menjelaskan pencegahan kecurangan, korupsi/penyalahgunaan keuangan terdapat pada lampiran 1 baris 104.</p>
VI-B	<ul style="list-style-type: none"> • Di sini kita saling cek, dek. Ada pembagian tugas, dan semua dokumen harus dicek dua kali. Kalau ada masalah, biasanya kita rapatkan supaya cepat diselesaikan. 	109	<p>YA/VI-B/1/109</p> <p>Keterangan: Yahya menjelaskan mekanisme pengendalian internal yang kuat terdapat pada lampiran 1 baris 109.</p>
VII	<ul style="list-style-type: none"> • masyarakat diwakili oleh BPD datang menyampaikan aspirasi mereka saat rapat anggaran. Saya biasanya bantu catat usulan mereka biar jadi dasar penyusunan APBDes. 	116	<p>YA/VII/1/116</p> <p>Keterangan: Yahya menjelaskan partisipasi publik dalam perencanaan dan evaluasi anggaran terdapat pada lampiran 1 baris 116.</p>
VII-A	<ul style="list-style-type: none"> • Kita laporkan pada saat rapat desa, kita sampaikan secara lisan dan kita juga bikinkan baliho untuk transparansinya dek 	121	<p>YA/VII-A/1/121</p> <p>Keterangan: Yahya menjelaskan pelaporan dan komunikasi dengan pemangku kepentingan terdapat pada lampiran 1 baris 121.</p>

VII-B	<ul style="list-style-type: none"> • Kadang kalau ada warga yang mau kasih masukan atau kurang paham soal laporan keuangan, mereka langsung datang ke kantor. Kadang juga ada yang disampaikan waktu musyawarah desa. Tapi memang belum ada semacam kotak saran atau formulir tertulis, semua masih secara lisan. 	127	<p>YA/VII-B/1/127</p> <p>Keterangan: Yahya menjelaskan mekanisme umpan balik dan pengaduan terkait keuangan terdapat pada lampiran 1 baris 127.</p>
-------	--	-----	--



Transkrip Wawancara Key Informan 1

Peneliti: Bagaimana cara Kantor Desa Bulutellue memastikan laporan keuangan dapat diakses oleh pemangku kepentingan?

Yahya: Biasanya, dek, kita selalu siapkan laporan keuangan itu dalam bentuk baliho transparansi APBDes yang dipasang di depan kantor desa. Selain itu juga sering kita sampaikan secara langsung saat rapat biar lebih jelas. (I Baris 3) Intinya masyarakat bisa tahu penggunaan anggarannya.

Peneliti: Seberapa jelas dokumentasi transaksi keuangan yang dilakukan di Kantor Desa Bulutellue?

Yahya: Dokumentasi kita lengkap dek. Semua transaksi, baik itu penerimaan maupun pengeluaran, selalu ada buktinya. Kita juga simpan dokumen fisik dan file digitalnya, supaya kalau ada audit atau pemeriksaan, bisa langsung ditunjukkan. (I-A Baris 9)

Peneliti: Apakah alokasi anggaran dan pengeluaran dapat diakses oleh pihak masyarakat desa? Jika bisa, bagaimana mekanismenya?

Yahya: Bisa dek, masyarakat bisa lihat melalui baliho yang sudah dipasang. kita juga sampaikan secara lisan supaya lebih jelas saat rapat. (I-B Baris 15)

Peneliti: Bagaimana langkah-langkah yang diambil oleh Kantor Desa Bulutellue untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan kebijakan keuangan?

Yahya: Kita selalu berpatokan pada aturan dek, terutama Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dan untuk mendukung itu, kita juga pakai aplikasi Sistem Keuangan Desa yang kita gunakan sejak tahun 2016, waktu masih masa pemerintahannya Pak A. Sudirman. Setiap ada kegiatan pengelolaan keuangan, kita pasti rapat dulu, koordinasi dengan pendamping desa, supaya tidak ada yang keliru. (II Baris 19)

Peneliti: Sejauh mana kesesuaian laporan keuangan Kantor Desa Bulutellue dengan standar akuntansi yang berlaku?

Yahya: Sudah sesuai. **Kita selalu ikuti format yang sudah ada di SISKEUDES.** (II-A Baris 26) Biasanya saya bantu cek dokumen dulu, pastikan semua sudah lengkap, baru Kaur Keuangan input datanya. Jadi insya Allah sudah sesuai standar, meskipun kadang ada revisi kalau ada kekeliruan kecil.

Peneliti: Seberapa sering audit internal dan eksternal dilakukan oleh Kantor Desa Bulutellue dan bagaimana hasilnya digunakan?

Yahya: **Audit internal biasanya kita lakukan tiap tiga bulan, untuk cek-cek dulu biar ada perbaikan kalau ada kesalahan. Saya biasanya siapkan dokumennya. Kalau audit eksternal dari inspektorat kabupaten itu setahun sekali.** (II-B Baris 32) Hasil audit biasanya kitajadikan bahan evaluasi, kalau ada catatan, langsung kita tindak lanjuti.

Peneliti: Bagaimana pembagian peran dan tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan di Kantor Desa Bulutellue?

Yahya: **Peran dan tanggung jawab masing-masing sudah jelas. Kalau saya disini kerjanya nya dek bantu cek-cek administrasi, memastikan dokumen sudah lengkap, dan biasanya juga buat laporan notulen. Kalau Kaur Keuangan itu lebih ke yang pegang kas dan input langsung data ke SISKEUDES.** (III Baris 39)

Peneliti: Bagaimana langkah yang diambil oleh pejabat keuangan desa atas setiap keputusan dan pengeluaran dana desa yang dilakukan?

Yahya: **Kalau ada pengeluaran, kita selalu bahas dulu dalam rapat. Biasanya saya yang catat notulen rapat, lalu setelah ada kesepakatan, baru Kaur Keuangan proses pencairannya.** (III-A Baris 45) Jadi kita di sini saling kontrol, dek, biar tidak ada yang lolos. Karena kalau sampai ada yang salah, itu bisa panjang urusannya,

dek. Jadi saya ini semacam jembatan, yang pastikan administrasi itu lengkap sebelum laporan disahkan.

Peneliti: Apa tindakan yang diterapkan oleh Kantor Desa Bulutellue jika terjadi kesalahan dalam pengelolaan keuangan desa Bulutellue?

Yahya: Kalau terjadi kekeliruan, misalnya ada salah input data di SISKEUDES atau ada dokumen yang kurang lengkap biasanya saya langsung koordinasi dengan Kaur Keuangan untuk diperbaiki. (III-B Baris 53) Kita tidak menunggu lama, dek, supaya kalau sewaktu-waktu ada pemeriksaan, laporan kita sudah beres.

Peneliti: Bagaimana cara Kantor Desa Bulutellue memastikan pencatatan dan pembukuan keuangan tetap akurat?

Yahya: Kita pastikan, dek, semua transaksi itu langsung dicatat di aplikasi. Kita juga ada dokumen pendukung seperti berita acara. (IV Baris 60) Jadi tidak cuma di belakang meja, saya juga ikut turun langsung.

Peneliti: Seberapa rutin dilakukan rekonsiliasi data keuangan oleh Kantor Desa Bulutellue dan bagaimana prosedurnya?

Yahya: Rekonsiliasi kita lakukan rutin setiap bulan, dek. Biasanya setelah akhir bulan, saya sama Kaur Keuangan duduk bareng di kantor, kita cocokkan laporan kas dengan saldo yang ada di SISKEUDES. (IV-A Baris 65) Kalau ada selisih, kita cek satu-satu transaksinya, apakah ada yang kelewatan diinput atau ada kesalahan penulisan. Jadi tiap bulan harus clear, supaya laporan bulanan itu rapi, tidak ada masalah kalau diaudit.

Peneliti: Apa langkah yang dilakukan oleh Kantor Desa Bulutellue untuk memastikan laporan keuangan bebas dari kesalahan?

Yahya: Biasanya sebelum laporan final diserahkan, saya cek dulu data dan dokumen dek. Kalau ada yang keliru, saya minta diperbaiki dulu biar tidak ada masalah di kemudian hari. (IV-B Baris 73)

Peneliti: Bagaimana strategi yang digunakan Kantor Desa Bulutellue untuk mengalokasikan dan memanfaatkan sumber daya keuangan desa Bulutellue secara optimal?

Yahya: Tentu dilakukan perencanaan kegiatan secara rinci dan bertahap dek Biasanya kita adakan rapat biar penganggaran lebih terarah. Jadi semua itu dirancang biar dana desa benar-benar terasa manfaatnya untuk masyarakat. (V Baris 79)

Peneliti: Apa faktor utama yang dipertimbangkan Kantor Desa Bulutellue dalam pengambilan keputusan keuangan desa agar lebih hemat dalam penggunaan dana desa?

Yahya: Kita selalu mempertimbangkan efisiensi anggaran dek. Keputusan keuangan juga selalu kita diskusikan dalam rapat desa. Saya biasanya bantu hitung kebutuhan, biar pengeluaran sesuai prioritas. (V-A Baris 86)

Peneliti: Bagaimana cara Kantor Desa Bulutellue mengurangi pengeluaran yang tidak perlu tanpa mengganggu operasional?

Yahya: Kita lihat apakah pengeluaran itu penting atau bisa dihemat. Kita bisa kurangi di bagian-bagian yang tidak terlalu penting, misalnya alat tulis kantor, kalau masih ada stok, tidak usah beli baru dulu. Rapat-rapat juga kita adakan di kantor desa. Jadi semua itu dikontrol, biar operasional tetap jalan tapi pengeluaran tetap bisa hemat. (V-B Baris 91)

Peneliti: Bagaimana cara memastikan pengelolaan sumber daya keuangan Kantor Desa Bulutellue dilakukan secara etis?

Yahya: Biasanya kalau ada rapat kita selalu sampaikan, kalau ada yang ragu soal aturan atau kurang dimengerti, mending tanya dulu daripada nanti repot di belakang. Karena kalau ada salah, semua pasti ikut tanggung jawab. Jadi kita saling ingatkan satu sama lain. **(VI Baris 98)**

Peneliti: Apa langkah yang diambil oleh Kantor Desa Bulutellue untuk mencegah kecurangan, korupsi, atau penyalahgunaan keuangan?

Yahya: Supaya aman, setiap ada transaksi itu pasti ada buktinya. Jadi tidak bisa sembarang ambil uang. Pak Desa juga selalu ingatkan terus jangan sampai ada yang main-main. **(VI-A Baris 104)**

Peneliti: Seberapa kuat mekanisme pengendalian internal Kantor Desa Bulutellue dalam memastikan integritas keuangan desa?

Yahya: Di sini kita saling cek, dek. Ada pembagian tugas, dan semua dokumen harus dicek dua kali. Kalau ada masalah, biasanya kita rapatkan supaya cepat diselesaikan. **(VI-B Baris 109)** Kaur Keuangan input data dan pegang kas, saya cek ulang dokumennya, Kepala Desa yang tanda tangan pengesahan. Kalau ada yang salah, langsung dikembalikan untuk diperbaiki.

Peneliti: Seberapa besar partisipasi publik dalam perencanaan dan evaluasi anggaran dana desa Bulutellue?

Yahya: cukup aktif, dek. masyarakat diwakili oleh BPD datang menyampaikan aspirasi mereka saat rapat anggaran. Saya biasanya bantu catat usulan mereka biar jadi dasar penyusunan APBDes. **(VII Baris 116)**

Peneliti: Bagaimana mekanisme pelaporan dan komunikasi yang diterapkan oleh Kantor Desa Bulutellue terhadap pemangku jabatan?

Yahya: Kita laporkan pada saat rapat desa, kita sampaikan secara lisan dan kita juga bikinkan baliho untuk transparansinya dek. **(VII-A Baris 121)** Kalau ada warga

yang mau tanya detail, bisa datang langsung ke kantor, saya biasanya yang jelaskan.

Peneliti: Apakah terdapat mekanisme umpan balik dan pengaduan terkait keuangan desa? Jika ada, bagaimana mekanismenya?

Yahya: Kadang kalau ada warga yang mau kasih masukan atau kurang paham soal laporan keuangan, mereka langsung datang ke kantor. Kadang juga ada yang disampaikan waktu musyawarah desa. Tapi memang belum ada semacam kotak saran atau formulir tertulis, semua masih secara lisan. (VII-B Baris 127)



Wawancara Key Informan 2

Nama : Ramli Agus
 Kode : RA
 Jabatan : Kaur Keuangan
 Tanggal Wawancara : 15 April 2025

Kode	Data Wawancara	Baris	Penulisan
I	<ul style="list-style-type: none"> • Kita tampilkan dalam bentuk baliho transparansi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dek. Ada kita pasang di depan kantor desa, biar masyarakat gampang mengakses dan tahu bagaimana penggunaan anggaran desa dan Setiap akhir tahun biasanya juga saya umumkan lagi pas akhir tahun saat musyawarah desa. 	3	<p>RA/I/2/3</p> <p>Keterangan: Ramli Agus menjelaskan ketersediaan laporan keuangan bagi pemangku kepentingan terdapat pada lampiran 2 baris ke 3.</p>
I-A	<ul style="list-style-type: none"> • Setiap ada pengeluaran atau penerimaan, saya selalu siapkan bukti nota pembelian, kwitansi, dan tanda tangan penerima. Semua itu dijadikan dasar untuk input di aplikasi Sistem Keuangan Desa sesuai kode rekening yang 	10	<p>RA/I-A/2/10</p> <p>Keterangan: Ramli Agus menjelaskan dokumentasi transaksi keuangan yang jelas terdapat pada lampiran 2 baris 10.</p>

	berlaku. Jadi dokumentasi kita lengkap dan bisa dipertanggungjawabkan.		
I-B	<ul style="list-style-type: none"> masyarakat berhak tahu. Mereka bisa lihat langsung di baliho APBDes yang kita tempel di tempat umum. Isinya sudah mencakup semua jenis anggaran dan pengeluaran, jadi cukup jelas. Tapi memang belum bisa kita sediakan secara daring. 	16	<p>RA/I-B/2/16</p> <p>Keterangan: Ramli Agus menjelaskan akses terbuka terhadap alokasi anggaran dan pengeluaran terdapat pada lampiran 2 baris 16.</p>
II	<ul style="list-style-type: none"> Kita selalu pastikan semua pengeluaran sesuai dengan APBDes dan aturan yang berlaku dek. Kalau ada regulasi baru, biasanya langsung diinformasikan oleh Sekretaris atau Kepala Desa baru kita sesuaikan. 	22	<p>RA/II/2/22</p> <p>Keterangan: Ramli Agus menjelaskan kepatuhan terhadap regulasi dan kebijakan keuangan terdapat pada lampiran 2 baris 22.</p>
II-A	<ul style="list-style-type: none"> Aplikasi Sistem <p>Keuangan Desa itu sudah format baku. jadi kalau kita input datanya dengan benar, insya Allah sudah sesuai standar akuntansi pemerintahan desa. Kita</p>	28	<p>RA/II-A/2/28</p> <p>Keterangan: Ramli Agus menjelaskan kesesuaian dengan standar akuntansi terdapat pada lampiran 2 baris 28.</p>

	juga buatkan laporan pertanggungjawaban kegiatan dan keuangan. Sebelum laporan dikirim ke pihak kabupaten, dilakukan asistensi dulu di kecamatan.		
II-B	<ul style="list-style-type: none"> Audit internal biasanya tiga bulan sekali, dek. Itu kita rapatkan, cek semua dokumen, kas, dan laporan di SISKEUDES. Kalau audit eksternal, setahun sekali dari inspektorat. 	35	<p>RA/II-B/2/35</p> <p>Keterangan: Ramli Agus menjelaskan audit internal dan eksternal secara berkala terdapat pada lampiran 2 baris 35.</p>
III	<ul style="list-style-type: none"> Saya sebagai Kaur Keuangan bertugas mengelola uang masuk dan keluar, termasuk input data di Sistem Keuangan Desa dan penyusunan laporan awal. Sekretaris mengecek kembali kelengkapan berkas, dan Kepala Desa mengesahkan. 	40	<p>RA/III/2/40</p> <p>Keterangan: Ramli Agus menjelaskan peran dan tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan terdapat pada lampiran 2 baris 40.</p>
III-A	<ul style="list-style-type: none"> kalau ada pengeluaran, itu tidak bisa saya langsung keluarkan uangnya tanpa persetujuan. Biasanya kita rapatkan dulu. Saya 	47	<p>RA/III-A/2/47</p> <p>Keterangan: Ramli Agus menjelaskan akuntabilitas pejabat keuangan atas keputusan</p>

	<p>pastikan semua pengeluaran ada notanya, tanda terimanya, baru saya pegang kas untuk keluarkan uangnya.</p>		<p>dan pengeluaran terdapat pada lampiran 2 baris 47.</p>
III-B	<ul style="list-style-type: none"> Saat ada salah input atau data kurang pas, langsung saya betulkan di aplikasi. Lalu kita buatkan berita acara sebagai bukti adanya koreksi. 	56	<p>RA/III-B/2/56</p> <p>Keterangan: Ramli Agus menjelaskan tindakan korektif terhadap kesalahan pengelolaan keuangan terdapat pada lampiran 2 baris 56.</p>
IV	<ul style="list-style-type: none"> Saya selalu pastikan input data itu sesuai prosedur, dek. Semua datanya harus lengkap, mulai dari kode rekening, jumlah uang, sampai keterangannya. Setelah penerimaan desa diinput, baru bisa lanjut input belanja. Setelah itu, datanya saya serahkan untuk dicek sebelum disahkan. Sekarang semuanya sudah serba digital. Kita juga pakai aplikasi SISKEUDES versi terbaru yaitu 2.0.7 untuk 	61	<p>RA/IV/2/61</p> <p>Keterangan: Ramli Agus menjelaskan ketepatan pencatatan dan pembukuan keuangan yang akurat terdapat pada lampiran 2 baris 61.</p>

	pengelolaan keuangan jadi lebih rapi.		
IV-A	<ul style="list-style-type: none"> Rekonsiliasi kita laksanakan rutin sebulan sekali, kita cocokkan lagi data kas di buku sama yang ada di SISKEUDES. Kalau ada yang selisih, kita cek ulang semua transaksi, satu per satu, kwitansinya juga dicek, ada atau tidak. Kalau ada yang kurang lengkap, kita lengkap dulu, baru disahkan. 	69	<p>RA/IV-A/2/69</p> <p>Keterangan: Ramli Agus menjelaskan rekonsiliasi data keuangan secara tepat waktu terdapat pada lampiran 2 baris 69.</p>
IV-B	<ul style="list-style-type: none"> Pastiya semua laporan di cek ulang dulu sebelum di input dek. Tapi jika masih didapat kesalahan pada saat input data di aplikasi dikoreksi langsung melalui bantuan admin dari kabupaten. 	76	<p>RA/IV-B/2/76</p> <p>Keterangan: Ramli Agus menjelaskan pelaporan keuangan bebas dari kesalahan terdapat pada lampiran 2 baris 76.</p>
V	<ul style="list-style-type: none"> Strateginya itu kita mulai dari perencanaan yang rapi dulu, dek. Penyusunan RKP Desa juga kita pakai aplikasi SISKEUDES, mulai dari input daftar kegiatan sampai besaran 	82	<p>RA/V/2/82</p> <p>Keterangan: Ramli Agus menjelaskan pengalokasian sumber daya keuangan secara optimal terdapat pada lampiran 2 baris 82.</p>

	anggarannya. Memang kadang jaringan jadi kendala, tapi secara keseluruhan sangat membantu karena penyusunannya jadi lebih sistematis. Jadi dari awal semua sudah tertata rapi dalam sistem, supaya anggaran yang ada bisa dipakai tepat sasaran dan sesuai kebutuhan desa.		
V-A	<ul style="list-style-type: none"> Setiap pengambilan keputusan selalu didiskusikan dalam rapat desa dek kita juga selalu utamakan kepentingan bersama. 	92	RA/V-A/2/92 Keterangan: Ramli Agus menjelaskan pengambilan keputusan keuangan yang hemat biaya terdapat pada lampiran 2 baris 92.
V-B	<ul style="list-style-type: none"> Biasanya kita hemat di biaya operasional, dek. Kita manfaatkan fasilitas kantor semaksimal mungkin. Misal kita adakan acara atau musyawarah dengan masyarakat kita adakan di aula kantor. 	96	RA/V-B/2/96 Keterangan: Ramli Agus menjelaskan pengurangan pengeluaran yang tidak perlu terdapat pada lampiran 2 baris 96.
VI	<ul style="list-style-type: none"> Saya selalu pastikan semua transaksi ada 	101	RA/VI/2/101

	buktinya, dek. Tidak ada yang pakai uang tanpa nota. Apalagi sekarang kebanyakan sudah non tunai, pakai bukti transfer. Jadi pertanggungjawabannya tinggal kita sertakan nota atau bukti transfer saja.		Keterangan: Ramli Agus menjelaskan pengelolaan keuangan desa secara etis terdapat pada lampiran 2 baris 101.
VI-A	<ul style="list-style-type: none"> Dek, prinsipnya semua pengeluaran harus ada buktinya, ada nota, kwitansi, ada tanda tangan. Sejauh ini alhamdulillah saya bisa bilang tidak ada temuan korupsi atau penyalahgunaan. 	107	RA/VI-A/2/107 Keterangan: Ramli Agus menjelaskan pencegahan kecurangan, korupsi/penyalahgunaan keuangan terdapat pada lampiran 2 baris 107.
VI-B	<ul style="list-style-type: none"> • Semua data dicek berlapis dan kalau ada yang salah, kita langsung cepat perbaiki. 	112	RA/VI-B/2/112 Keterangan: Ramli Agus menjelaskan mekanisme pengendalian internal yang kuat terdapat pada lampiran 2 baris 112.
VII	<ul style="list-style-type: none"> Pada saat rapat penyusunan APBDes, BPD mewakili masyarakat juga kita hadirkan dek. Jadi mereka ikut 	116	RA/VII/2/116 Keterangan: Ramli Agus menjelaskan partisipasi publik dalam perencanaan dan evaluasi

	menyampaikan saran dan masukan. Tugas saya menyesuaikan dengan anggaran yang ada.		anggaran terdapat pada lampiran 2 baris 116.
VII-A	<ul style="list-style-type: none"> • kita laporkan di musyawarah desa dulu, dek, biar masyarakat bisa tahu langsung. Kita juga buat baliho transparansi anggaran supaya lebih jelas. Kalau untuk laporan pertanggungjawaban, itu biasanya langsung terkirim setelah kita input ke aplikasi SISKEUDES secara online. Jadi cepat sampai ke dinas atau ke inspektorat. 	121	<p>RA/VII-A/2/121</p> <p>Keterangan: Ramli Agus menjelaskan pelaporan dan komunikasi dengan pemangku kepentingan terdapat pada lampiran 2 baris 121.</p>
VII-B	<ul style="list-style-type: none"> • belum ada mekanisme formal seperti kotak saran atau form tertulis. Biasanya masyarakat langsung datang ke kantor kalau ada yang mau ditanyakan, atau disampaikan pada saat musyawarah desa. 	129	<p>RA/VII-B/2/129</p> <p>Keterangan: Ramli Agus menjelaskan mekanisme umpan balik dan pengaduan terkait keuangan terdapat pada lampiran 2 baris 129.</p>

Transkrip Wawancara Key Informan 2

Peneliti: Bagaimana cara Kantor Desa Bulutellue memastikan laporan keuangan dapat diakses oleh pemangku kepentingan?

Ramli Agus: Kita tampilkan dalam bentuk baliho transparansi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dek. Ada kita pasang di depan kantor desa, biar masyarakat gampang mengakses dan tahu bagaimana penggunaan anggaran desa dan Setiap akhir tahun biasanya juga saya umumkan lagi pas akhir tahun saat musyawarah desa. (I Baris 3)

Peneliti: Seberapa jelas dokumentasi transaksi keuangan yang dilakukan di Kantor Desa Bulutellue?

Ramli Agus: Setiap ada pengeluaran atau penerimaan, saya selalu siapkan bukti nota pembelian, kwitansi, dan tanda tangan penerima. Semua itu dijadikan dasar untuk input di aplikasi Sistem Keuangan Desa sesuai kode rekening yang berlaku. Jadi dokumentasi kita lengkap dan bisa dipertanggungjawabkan. (I-A Baris 10)

Peneliti: Apakah alokasi anggaran dan pengeluaran dapat diakses oleh pihak masyarakat desa? Jika bisa, bagaimana mekanismenya?

Ramli Agus: Bisa dek, masyarakat berhak tahu. Mereka bisa lihat langsung di baliho APBDes yang kita tempel di tempat umum. Isinya sudah mencakup semua jenis anggaran dan pengeluaran, jadi cukup jelas. Tapi memang belum bisa kita sediakan secara daring. (I-B Baris 16)

Peneliti: Bagaimana langkah-langkah yang diambil oleh Kantor Desa Bulutellue untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan kebijakan keuangan?

Ramli Agus: Kita selalu pastikan semua pengeluaran sesuai dengan APBDes dan aturan yang berlaku dek. Kalau ada regulasi baru, biasanya langsung

diinformasikan oleh Sekretaris atau Kepala Desa baru kita sesuaikan. (II Baris 22)
Jadi tetap terarah sesuai aturan.

Peneliti: Sejauh mana kesesuaian laporan keuangan Kantor Desa Bulutellue dengan standar akuntansi yang berlaku?

Ramli Agus: Aplikasi Sistem Keuangan Desa itu sudah format baku. jadi kalau kita input datanya dengan benar, insya Allah sudah sesuai standar akuntansi pemerintahan desa. Kita juga buatkan laporan pertanggungjawaban kegiatan dan keuangan. Sebelum laporan dikirim ke pihak kabupaten, dilakukan asistensi dulu di kecamatan. (II-A Baris 28)

Peneliti: Seberapa sering audit internal dan eksternal dilakukan oleh Kantor Desa Bulutellue dan bagaimana hasilnya digunakan?

Ramli Agus: Audit internal biasanya tiga bulan sekali, dek. Itu kita rapatkan, cek semua dokumen, kas, dan laporan di SISKEUDES. Kalau audit eksternal, setahun sekali dari inspektorat. (II-B Baris 35) Hasil audit itu jadi bahan evaluasi kita, dek.

Peneliti: Bagaimana pembagian peran dan tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan di Kantor Desa Bulutellue?

Ramli Agus: Pembagian tugasnya disini jelas. Saya sebagai Kaur Keuangan bertugas mengelola uang masuk dan keluar, termasuk input data di Sistem Keuangan Desa dan penyusunan laporan awal. Sekretaris mengecek kembali kelengkapan berkas, dan Kepala Desa mengesahkan. (III Baris 40) Semua sudah ada tupoksinya dan dijalankan sesuai prosedur.

Peneliti: Bagaimana langkah yang diambil oleh pejabat keuangan desa atas setiap keputusan dan pengeluaran dana desa yang dilakukan?

Ramli Agus: Kalau ada pengeluaran, itu tidak bisa saya langsung keluarkan uangnya tanpa persetujuan. Biasanya kita rapatkan dulu. Saya pastikan semua

pengeluaran ada notanya, tanda terimanya, baru saya pegang kas untuk keluarkan uangnya. (III-A Baris 47) Terus saya buat laporan awal dulu, lengkap dengan bukti-bukti transaksi, kayak kwitansi atau nota pembelian. Setelah itu, saya serahkan ke Sekretaris untuk dicek ulang, apakah dokumen sudah lengkap, tanda tangan semua sudah ada, baru ke Pak Desa untuk tanda tangan pengesahan.

Peneliti: Apa tindakan yang diterapkan oleh Kantor Desa Bulutellue jika terjadi kesalahan dalam pengelolaan keuangan desa Bulutellue?

Ramli Agus: Saat ada salah input atau data kurang pas, langsung saya betulkan di aplikasi. Lalu kita buatkan berita acara sebagai bukti adanya koreksi. (III-B Baris 56) Jadi semua proses tetap tercatat dan bisa dipertanggungjawabkan.

Peneliti: Bagaimana cara Kantor Desa Bulutellue memastikan pencatatan dan pembukuan keuangan tetap akurat?

Ramli Agus: Saya selalu pastikan input data itu sesuai prosedur, dek. Semua datanya harus lengkap, mulai dari kode rekening, jumlah uang, sampai keterangannya. Setelah penerimaan desa diinput, baru bisa lanjut input belanja. Setelah itu, datanya saya serahkan untuk dicek sebelum disahkan. Sekarang semuanya sudah serba digital. Kita juga pakai aplikasi SISKEUDES versi terbaru yaitu 2.0.7 untuk pengelolaan keuangan jadi lebih rapi. (IV Baris 61)

Peneliti: Seberapa rutin dilakukan rekonsiliasi data keuangan oleh Kantor Desa Bulutellue dan bagaimana prosedurnya?

Ramli Agus: Rekonsiliasi kita laksanakan rutin sebulan sekali, kita cocokkan lagi data kas di buku sama yang ada di SISKEUDES. Kalau ada yang selisih, kita cek ulang semua transaksi, satu per satu, kwitansinya juga dicek, ada atau tidak. Kalau ada yang kurang lengkap, kita lengkapi dulu, baru disahkan. (IV-A Baris 69) Prosedurnya memang kita bikin simpel, tapi harus teliti, dek.

Peneliti: Apa langkah yang dilakukan oleh Kantor Desa Bulutellue untuk memastikan laporan keuangan bebas dari kesalahan?

Ramli Agus: Pastinya semua laporan di cek ulang dulu sebelum di input dek. Tapi jika masih didapat kesalahan pada saat input data di aplikasi dikoreksi langsung melalui bantuan admin dari kabupaten. (IV-B Baris 76)

Peneliti: Bagaimana strategi yang digunakan Kantor Desa Bulutellue untuk mengalokasikan dan memanfaatkan sumber daya keuangan desa Bulutellue secara optimal?

Ramli Agus: Strateginya itu kita mulai dari perencanaan yang rapi dulu, dek. Penyusunan RKP Desa juga kita pakai aplikasi SISKEUDES, mulai dari input daftar kegiatan sampai besaran anggarannya. Memang kadang jaringan jadi kendala, tapi secara keseluruhan sangat membantu karena penyusunannya jadi lebih sistematis. Jadi dari awal semua sudah tertata rapi dalam sistem, supaya anggaran yang ada bisa dipakai tepat sasaran dan sesuai kebutuhan desa (V Baris 82)

Peneliti: Apa faktor utama yang dipertimbangkan Kantor Desa Bulutellue dalam pengambilan keputusan keuangan desa agar lebih hemat dalam penggunaan dana desa?

Ramli Agus: Setiap pengambilan keputusan selalu didiskusikan dalam rapat desa dek kita juga selalu utamakan kepentingan bersama. (V-A Baris 92)

Peneliti: Bagaimana cara Kantor Desa Bulutellue mengurangi pengeluaran yang tidak perlu tanpa mengganggu operasional?

Ramli Agus: Biasanya kita hemat di biaya operasional, dek. Kita manfaatkan fasilitas kantor semaksimal mungkin. Misal kita adakan acara atau musyawarah dengan masyarakat kita adakan di aula kantor. (V-B Baris 96)

Peneliti: Bagaimana cara memastikan pengelolaan sumber daya keuangan Kantor Desa Bulutellue dilakukan secara etis?

Ramli Agus: Saya selalu pastikan semua transaksi ada buktinya, dek. Tidak ada yang pakai uang tanpa nota. Apalagi sekarang kebanyakan sudah non tunai, pakai bukti transfer. Jadi pertanggungjawabannya tinggal kita sertakan nota atau bukti transfer saja. (VI Baris 101)

Peneliti: Apa langkah yang diambil oleh Kantor Desa Bulutellue untuk mencegah kecurangan, korupsi, atau penyalahgunaan keuangan?

Ramli Agus: Dek, prinsipnya semua pengeluaran harus ada buktinya, ada nota, kwitansi, ada tanda tangan. Sejauh ini alhamdulillah saya bisa bilang tidak ada temuan korupsi atau penyalahgunaan. (VI-A Baris 107)

Peneliti: Seberapa kuat mekanisme pengendalian internal Kantor Desa Bulutellue dalam memastikan integritas keuangan desa?

Ramli Agus: Kalau dibilang kuat, insya Allah cukup kuat, dek. Semua data dicek berlapis dan kalau ada yang salah, kita langsung cepat perbaiki. (VI-B Baris 112)

Peneliti: Seberapa besar partisipasi publik dalam perencanaan dan evaluasi anggaran dana desa Bulutellue?

Ramli Agus: Pada saat rapat penyusunan APBDes, BPD mewakili masyarakat juga kita hadirkan dek. Jadi mereka ikut menyampaikan saran dan masukan. Tugas saya menyesuaikan dengan anggaran yang ada. (VII Baris 116)

Peneliti: Bagaimana mekanisme pelaporan dan komunikasi yang diterapkan oleh Kantor Desa Bulutellue terhadap pemangku jabatan?

Ramli Agus: Biasanya kita laporan di musyawarah desa dulu, dek, biar masyarakat bisa tahu langsung. Kita juga buat baliho transparansi anggaran

supaya lebih jelas. Kalau untuk laporan pertanggungjawaban, itu biasanya langsung terkirim setelah kita input ke aplikasi SISKEUDES secara online. Jadi cepat sampai ke dinas atau ke inspektorat. (VII-A Baris 121) Jadi semua transparan, dek, semua bisa tahu.

Peneliti: Apakah terdapat mekanisme umpan balik dan pengaduan terkait keuangan desa? Jika ada, bagaimana mekanismenya?

Ramli Agus: Kalau sekarang dek, belum ada mekanisme formal seperti kotak saran atau form tertulis. Biasanya masyarakat langsung datang ke kantor kalau ada yang mau ditanyakan, atau disampaikan pada saat musyawarah desa. (VII-B Baris 129)



Lampiran 5 Lembar Observasi

Instrumen dan Temuan Observasi



Nama Peneliti : Indriani
 Hari/Tanggal Observasi : Senin 14, April 2025
 Tempat Observasi : Kantor Desa Bulutellue

Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 dan Akuntabilitas Keuangan Desa di Desa Bulutellue Kabupaten Sinjai.

No	Aspek	Indikator	Sesuai (✓)	Tidak Sesuai (x)	Temuan Lapangan
1	Perencanaan Anggaran	Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dalam SISKEUDES	✓		RKP Desa telah diinput ke dalam aplikasi SISKEUDES versi 2.0.7 oleh Kaur Keuangan. Sebelumnya dilaksanakan musyawarah desa yang dibuktikan melalui dokumentasi kegiatan dalam bentuk foto.
		Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) secara sistematis	✓		Penyusunan APBDes dilakukan secara bertahap melalui SISKEUDES, dimulai dari input daftar kegiatan hingga pengalokasian anggaran. Proses verifikasi dilakukan oleh Sekretaris Desa sebelum disahkan.
2	Pelaksanaan Anggaran	Pengelolaan penerimaan dan pengeluaran keuangan desa secara digital	✓		Semua transaksi keuangan dicatat secara digital melalui aplikasi SISKEUDES. Kode rekening kegiatan muncul otomatis dalam sistem dan digunakan sebagai acuan pencatatan.
		Penatausahaan kas desa melalui aplikasi	✓		Proses pencatatan kas masuk dan keluar dilakukan langsung melalui fitur

					penatausahaan dalam aplikasi SISKEUDES versi 2.0.7. Operator terlihat memverifikasi data sesuai bukti transaksi.
3	Penatausaha-an Anggaran	Pencatatan transaksi keuangan sesuai kode rekening yang berlaku	✓		Pencatatan transaksi dilakukan berdasarkan kode rekening kegiatan yang tersedia otomatis dalam sistem SISKEUDES. Operator memilih kode yang sesuai untuk tiap belanja desa.
		Penggunaan bukti transaksi elektronik dalam pelaporan keuangan	✓		Bukti transaksi seperti slip transfer, kuitansi, dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dihasilkan langsung dari aplikasi. Dokumen ini digunakan dalam proses pelaporan dan pertanggungjawaban.
4	Pelaporan	Penyusunan laporan realisasi APBDes secara otomatis	✓		Aplikasi SISKEUDES menampilkan laporan realisasi APBDes secara otomatis, termasuk perincian persentase belanja dan potongan pajak. Laporan dapat langsung dicetak dan diverifikasi.
5	Pertanggung-jawaban	Penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan desa tepat waktu	✓		Laporan pertanggungjawaban disusun menggunakan output SISKEUDES, lalu dikirim secara daring ke Dinas PMD dan Inspektorat Kabupaten setelah melalui verifikasi internal perangkat desa dan disampaikan kepada masyarakat melalui pemasangan baliho transparansi APBDes di depan Kantor Desa Bulutellue.

Lampiran 6 Dokumentasi**Wawancara Sekretaris Desa Bulutellue****Wawancara Kaur Keuangan Desa Bulutellue****Baliho Transparansi APBDesa Bulutellue TA 2024 DAN 2025**



Kantor Desa Bulutellue Kabupaten Sinjai



Verifikasi laporan keuangan oleh Sekretaris Desa di SISKEUDES



Musyawarah Desa dalam rangka pembahasan Rancangan APBDes

Lampiran 7 Validasi Data Penelitian Kualitatif

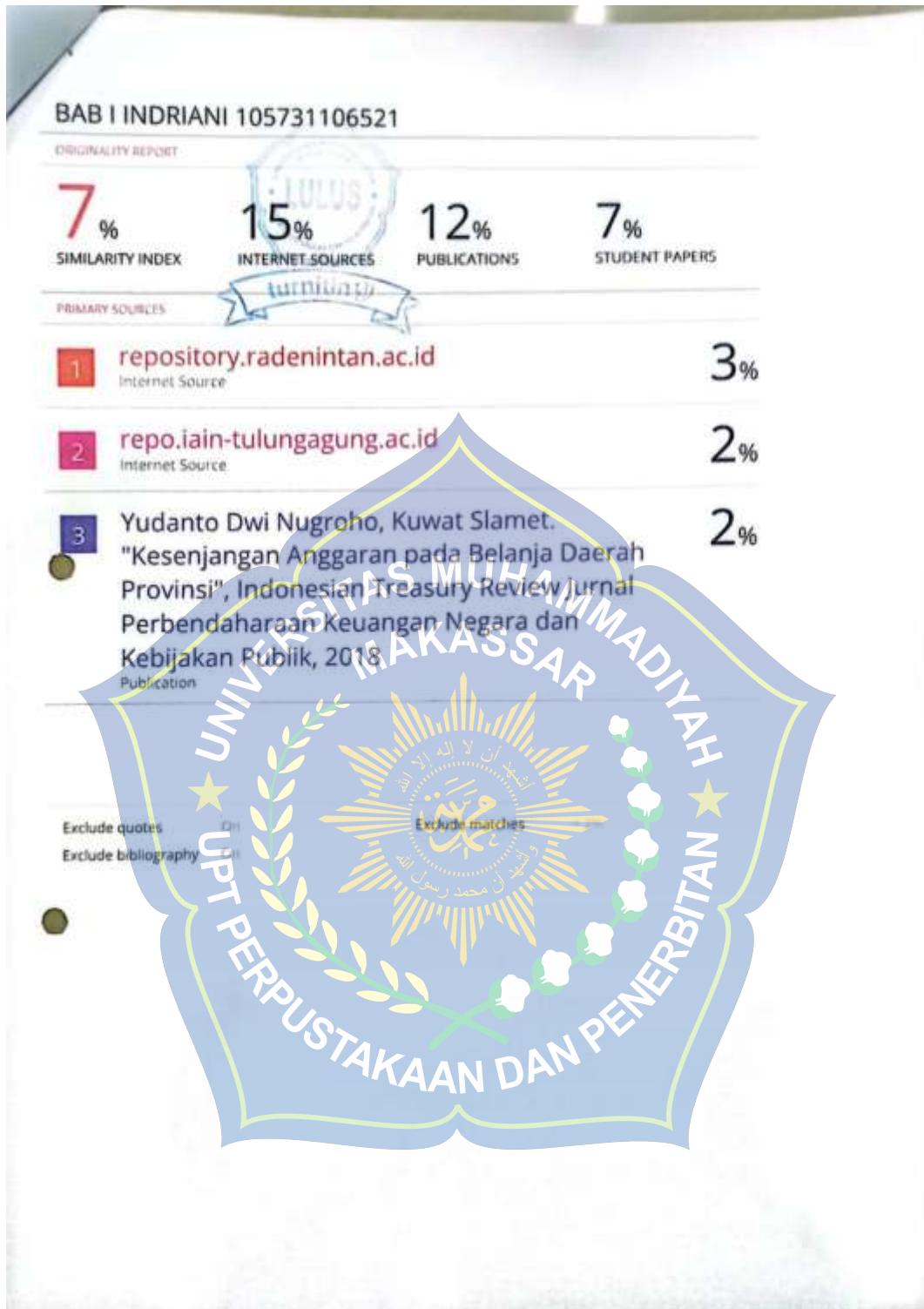
 <p align="center">UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS PUSAT VALIDASI DATA <small>jl. Teuku Umar 211 Makassar, Sulawesi Selatan, 90111, Indonesia</small></p>			
LEMBAR KONTROL VALIDASI PENELITIAN KUALITATIF			
NAMA MAHASISWA	INDRIANI		
NIM	105731106521		
PROGRAM STUDI	AKUNTANSI		
JUDUL SKRIPSI	ANALISIS PENERAPAN APLIKASI SISTEM KEUANGAN DESA DALAM MENINGKATKAN AKUNTABILITAS KEUANGAN DESA BULUTELLUE KABUPATEN SINJAI		
NAMA PEMBIMBING 1	Dr. H. Muhammad Najib Kasim, S.E., M.Si		
NAMA PEMBIMBING 2	Nurul Firda, S.ST., M.Si		
NAMA VALIDATOR	Dr. Muhammad Nur Abdi SE MM		
No	Dokumen	Tanggal Revisi	Uraian Perbaikan/saran
1	Pedoman wawancara/observasi/catatan lapangan/atau pedoman lainnya	17/07/25	Dapat di ACC
2	Hasil verbatim dan coding wawancara/observasi/catatan lapangan/atau pedoman lainnya	17/07/25	Dapat di ACC
3	Hasil Uji Keabsahan Data	17/07/25	Dapat di ACC
4	Hasil deskripsi penelitian	17/07/25	Dapat di ACC
5	Dokumentasi penelitian (rekaman wawancara/foto/dokumentasi lainnya)	17/07/25	Dapat di ACC
6	Hasil analisis	17/07/25	Dapat di ACC
<small>*Harap validator memberi paraf ketika koreksi telah disetujui</small>			

Lampiran 8 Validasi Data Abstrak

 <p align="center">UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS PUSAT VALIDASI DATA</p> <p>Jl. Sultan Alauddin 259 Makassar, Gedung Ipa lt. 8 e-mail: pvd.feb@unismuh.ac.id</p>			
<u>LEMBAR KONTROL VALIDASI</u>			
<u>ABSTRAK</u>			
NAMA MAHASISWA		INDRIANI	
NIM		105731106521	
PROGRAM STUDI		Akuntansi	
JUDUL SKRIPSI		Penerapan aplikasi Sistem Keuangan Desa dalam Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan Desa Buluteilue Kabupaten Sinjal.	
NAMA PEMBIMBING 1		Dr. H. Muhammad Najib Kasim, S.E., M.Si	
NAMA PEMBIMBING 2		Nurul Fuadah, S.ST., M.Si	
NAMA VALIDATOR		Sherry Adelia S.E, M.Mktg	
No	Dokumen	Tanggal Revisi/Acc	Uraian Perbaikan/Saran
1	Abstrak	13 agustus 2025	<p align="center">Typo penulisan, Tolong dicek kembali, sebelum di print.</p> <p align="right">D</p>
<small>*Harap validator memberi paraf ketika koreksi telah disetujui</small>			

Lampiran 9 Turnitin







BAB III INDRIANI 105731106521

ORIGINALITY REPORT

3% SIMILARITY INDEX

2% INTERNET SOURCES

6% PUBLICATIONS

6% STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1 Submitted to Sultan Agung Islamic University 2%
Student Paper

2 www.scribd.com 2%
Internet Source

Exclude quotes: On
Exclude bibliography: On
Exclude matches: On







Lampiran 7 Biografi Penulis



Indriani, panggilan Indri lahir di Makassar pada tanggal 16 Mei 2003 dari pasangan suami istri Bapak Baharuddin dan Ibu Hadreani. Peneliti adalah anak kedua dari 4 bersaudara. Peneliti sekarang tinggal bersama orangtua dan bertempat tinggal di Jl. Ade Irma Nasution 4, Wala-Walaya, Kecamatan Tallo, Kota Makassar. Pendidikan yang ditempuh oleh peneliti yaitu SDN 101 Bulu-Bulu lulus tahun 2015, MTsN 1 Poso lulus tahun 2018, MAN 1 Sinjai lulus tahun 2021 dan mulai tahun 2021 mendaftar dan kuliah pada Program S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis kampus Universitas Muhammadiyah Makassar sampai dengan sekarang. Sampai dengan penulisan skripsi ini peneliti masih terdaftar sebagai mahasiswa Program S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

